



Laporan Tahunan 2020



PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN
2021

LAPORAN TAHUNAN TA 2020



**Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
2021**

LAPORAN TAHUNAN TA 2020

Tim Penyusun

Penanggung Jawab: Sudi Mardianto

Ketua : Sumedi

Sekretaris : Julia F. Sinuraya

**Anggota : Erma Suryani
Ikarianto Haryadi
Eni Widjajati
Muhammad Suryadi
Sunarsih
Frans B.M. Dabukke
Ina Purwantini**



**Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
2021**

KATA PENGANTAR



Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) sebagai institusi pemerintahan/negara dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diembannya. Berdasarkan Permentan Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tupoksi PSEKP sebagai bagian dari Kementerian Pertanian adalah memberikan opsi, pertimbangan, dan informasi bagi pimpinan agar dapat membuat dan melaksanakan program fasilitasi, kebijakan, dan peraturan terbaik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan petani.

Laporan ini berisi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh PSEKP selama tahun anggaran 2020 yang meliputi: struktur organisasi PSEKP, sumber daya manusia, sarana dan prasarana penelitian, program, pendayagunaan hasil dan kerja sama penelitian, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, laporan ini juga memuat sinopsis hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan PSEKP pada tahun 2020.

Kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung mulai dari persiapan sampai penyelesaian laporan ini disampaikan terima kasih. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja PSEKP ke depan.

Bogor, Februari 2021
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si.
NIP 196803161997031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Visi dan Misi.....	2
1.2. Tupoksi, Sasaran, dan Struktur Organisasi.....	3
1.3. Sasaran Kelompok Pengguna Hasil Penelitian.....	3
II. SUMBER DAYA MANUSIA.....	5
III. SARANA DAN PRASARANA.....	17
IV. PROGRAM.....	23
4.1. Tujuan dan Luaran Kegiatan.....	23
4.2. Perencanaan Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2020.....	23
V. SINOPSIS PENELITIAN PSEKP TAHUN 2020.....	29
5.1. Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Pertanian.....	29
5.2. Kinerja dan Manfaat Adopsi Teknologi Tanaman Pangan dan Peternakan Hasil Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian...	30
5.3. Strategi Peningkatan Produksi Pangan Utama Berkelanjutan.....	31
5.4. Pengoptimalan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Mendukung Peningkatan Produksi Pangan.....	31
5.5. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Ekspor Kelapa dan Lada.....	32
5.6. Strategi Peningkatan Investasi Pertanian.....	33
5.7. Dinamika Sosial Ekonomi Perdesaan (PATANAS): Studi Panel di Berbagai Agroekosistem.....	34
VI. PENDAYAGUNAAN HASIL DAN KERJA SAMA PENELITIAN.....	36
6.1. Pendayagunaan Hasil.....	36
6.1.1. Bentuk-bentuk Diseminasi Hasil Penelitian dan Analisis Kebijakan.....	36
6.1.2. Distribusi Publikasi.....	53

6.1.3. Perpustakaan.....	53
6.2. Kerja Sama Penelitian	58
VII. EVALUASI DAN PELAPORAN	66
7.1. Kegiatan Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.....	66
7.2. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi	67
7.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TA 2020.....	67
7.3.1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian	70
7.3.2. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Penelitian	78
7.3.3. Pelayanan Perpustakaan.....	82
7.3.4. Evaluasi Pelayanan Publikasi.....	83
7.3.5. Sarana Penelitian	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.	Keragaan SDM PSEKP berdasarkan jabatan, 2020.....	5
2.	Jumlah peneliti menurut bidang kepakaran, 2020	6
3.	Bezetting dan kebutuhan jabatan fungsional peneliti, 2020–2024.....	6
4.	Kenaikan pangkat (KP) pegawai PSEKP periode April 2020	7
5.	Kenaikan pangkat (KP) pegawai PSEKP periode Oktober 2020	7
6.	Kenaikan jenjang jabatan, 2020.....	8
7.	Peningkatan kapasitas SDM PSEKP melalui pendidikan informal, 2020	8
8.	Peningkatan kapasitas SDM PSEKP melalui seminar, 2020	9
9.	Judul naskah orasi Profesor Riset, 2020.....	10
10.	Nilai komponen budaya kerja PSEKP, 2020	12
11.	Daftar kondisi barang inventaris Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020	18
12.	Perkembangan pelaksanaan keuangan kegiatan utama dan kegiatan penunjang Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020	21
13.	Realisasi anggaran per jenis pengeluaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020	21
14.	Realisasi anggaran per kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020	21
15.	Rekapitulasi PNPB Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020.....	22
16.	Judul penelitian/kajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian PSEKP TA 2020.....	25
17.	Judul proposal penelitian/kajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian PSEKP TA 2021	27
18.	Statistik naskah jurnal PSEKP, 2020	36
19.	Judul dan penulis artikel pada Jurnal Agro Ekonomi Volume 37 Nomor 2, Oktober 2019.....	37
20.	Judul dan penulis artikel pada Jurnal Agro Ekonomi Volume 38 Nomor 1, Mei 2020	38
21.	Judul dan penulis artikel pada Forum Agro Ekonomi Volume 37 Nomor 2, Desember 2019	39
22.	Judul dan penulis artikel pada Forum Agro Ekonomi Volume 38 Nomor 1, Juli 2020	39

23. Judul dan penulis artikel pada Analisis Kebijakan Pertanian Volume 17 Nomor 2, Desember 2019.....	41
24. Judul dan penulis artikel pada Analisis Kebijakan Pertanian Volume 18 Nomor 1, Juni 2020	41
25. Analisis Kebijakan Pertanian Volume 18 Nomor 2, Desember 2020..	42
26. Daftar judul leaflet, 2020	44
27. Isi Website PSEKP, 2020	44
28. Topik kegiatan FGD/workshop yang diselenggarakan Subbid PH, 2020.....	52
29. Koleksi bahan pustaka di Perpustakaan PSEKP, 2020.....	55
30. Ringkasan kegiatan kerja sama penelitian PSEKP TA 2020.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
1.	Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.	4
2.	Mekanisme perencanaan kegiatan penelitian internal PSEKP	26
3.	Sertifikat akreditasi dan Jurnal Agro Ekonomi yang terbit tahun 2020.....	37
4.	Forum Agro Ekonomi yang terbit tahun 2020	39
5.	Sertifikat akreditasi dan Jurnal AKP yang terbit tahun 2020	40
6.	Terbitan Newsletter PSEKP TA 2020.....	43
7.	Buku Bunga Rampai “Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian” PSEKP TA 2020	43
8.	Sebaran isi konten website Jendela Covid-19, 2020	47
9.	Sebaran jumlah konten per bulan, 2020.....	47
10.	Keragaan <i>followers</i> pada masing-masing akun media sosial, 2020	48
11.	Jumlah konten masing-masing media sosial per bulan, 2020	49
12.	Bagan Keterkaitan Tim Teknis, Tim Monev, dan Tim Editor di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	69
13.	Seminar proposal tim penelitian TA 2020, 11–12 Februari 2020.....	71
14.	Rapat Pleno Monev Tahap II pada tanggal 28–29 Juli 2020	73
15.	Kegiatan seminar hasil penelitian PSEKP, 10–11 Desember 2020.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Uraian	Halaman
1.	Pengadaan bahan pustaka TA 2020	86

I. PENDAHULUAN

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan sebuah lembaga penelitian setingkat Eselon II yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Berdirinya lembaga ini berawal dari adanya Proyek Survei Agro Ekonomi (SAE) yang dibentuk pada tahun 1974. Seiring dengan dinamika permasalahan pembangunan pertanian, beberapa kali lembaga ini mengalami perubahan nama. Pada tahun 1976, SAE berubah menjadi Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE), kemudian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (P/SE) pada tahun 1990, dan selanjutnya menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Puslitbangsosek Pertanian).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Dengan nama yang sama sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT/010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, PSEKP adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Namun demikian melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 232/Kpts/OT.010/4/2016 Pembinaan teknis penelitian, pembinaan teknis pejabat fungsional peneliti PSEKP tetap berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang meliputi: penilaian angka kredit, pendidikan, pelatihan serta peningkatan kapasitas dan kompetensi. Semua anggaran yang digunakan oleh PSEKP untuk membiayai belanja baik pegawai, modal, operasional maupun nonoperasional dialokasikan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Dalam kurun waktu lebih dari tiga dasawarsa dari sejak berdirinya (1976–2020), PSEKP telah dipimpin oleh sembilan Kepala Pusat, yaitu Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah (1976–1983), Dr. Faisal Kasryno (1983–1989), Prof. Dr. Effendi Pasandaran (1989–1995), Prof. Dr. Achmad Suryana (1995–1998), Prof. Dr. Tahlum Sudaryanto (1998–2002 dan 2005–2010), Prof. Dr. Pantjar Simatupang (2002–2005), Dr. Handewi P. Saliem (2010–2016), Dr. Ir. Abdul Basit, M.S (2016–2019), dan Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si. (2019–sekarang).

Sebagai institusi lingkup Kementerian Pertanian yang diberi mandat melaksanakan penelitian sosial ekonomi secara nasional, PSEKP diharapkan menjadi lembaga yang mampu mengintegrasikan berbagai kegiatan, yaitu penelitian dan pengembangan sosial ekonomi pertanian (sebagai lembaga ilmiah), analisis kebijakan pembangunan pertanian (sebagai lembaga pemerintahan), penyuluhan (sebagai

elemen penunjang sistem agribisnis), dan advokasi pembangunan pertanian (sebagai lembaga kemasyarakatan) guna mewujudkan tujuan pembangunan dengan pelayanan berkelanjutan. Program analisis sosial ekonomi dan kebijakan PSEKP dirancang untuk meningkatkan peran dan kemampuan institusi PSEKP dalam merumuskan alternatif dan advokasi kebijakan pembangunan pertanian pada masa depan. Hal ini secara rinci telah dituangkan dalam Renstra yang memayungi program tersebut serta menetapkan strategi dan kebijakan umum untuk merealisasikannya. Program tersebut disusun berlandaskan visi dan misi yang futuristik sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan paradigma pembangunan pertanian masa datang.

Inovasi kebijakan yang dihasilkan PSEKP harus berkualitas, cepat, dan akurat serta difokuskan pada masalah-masalah aktual pembangunan sektor pertanian yang berkaitan dengan: (1) perdagangan multilateral perjanjian regional dan bilateral, (2) informasi dan data yang berkaitan dengan dinamika sosial ekonomi pedesaan secara berkala, (3) informasi dan data mengenai penyebab penurunan produktivitas produk pertanian (*supply constraint*), (4) peningkatan daya saing, nilai tambah, dan pengembangan produk pertanian (agroindustri), (5) ketahanan pangan dan kemiskinan terkait SDG's, dan (6) penurunan kualitas infrastruktur dan sumber daya pertanian.

1.1. Visi dan Misi

Visi tersebut dirumuskan berdasarkan kesadaran bahwa PSEKP adalah lembaga pemerintah, sehingga harus berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui partisipasi secara aktif dalam memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian. Untuk mewujudkan visi di atas, misi yang akan dijadikan sebagai arahan kegiatan PSEKP adalah:

Visi

“Menjadi pusat analisis dan pengkajian yang handal dan terpercaya dalam menghasilkan inovasi dan inovasi di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk mendukung terwujudnya pertanian yang maju, mandiri dan modern”

Misi

1. Melakukan penelitian dan pengkajian guna menghasilkan inovasi sosial ekonomi dan kebijakan pertanian sesuai kebutuhan.
2. Melakukan analisis, pengkajian, sintesis, telaah ulang, atau evaluasi kebijakan pertanian untuk menghasilkan rumusan alternatif atau penyempurnaan kebijakan pembangunan pertanian.
3. Melakukan layanan rekomendasi, diseminasi, dan advokasi kebijakan pertanian dalam mendukung pembangunan menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern secara berkelanjutan.
4. Mengembangkan kerja sama, kemampuan SDM, dan kapasitas institusi PSEKP dalam pelaksanaan analisis dan kajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

I.2. Tupoksi, Sasaran, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015 Pasal 1225 dan Pasal 1226, tugas pokok dan fungsi PSEKP sebagai bagian dari institusi Kementerian Pertanian adalah memberikan opsi, pertimbangan, dan informasi bagi pimpinan agar dapat membuat dan melaksanakan program fasilitasi, kebijakan, dan peraturan terbaik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan petani.

Tugas Pokok:

Melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian
(Pasal 1225 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015)

Fungsi:

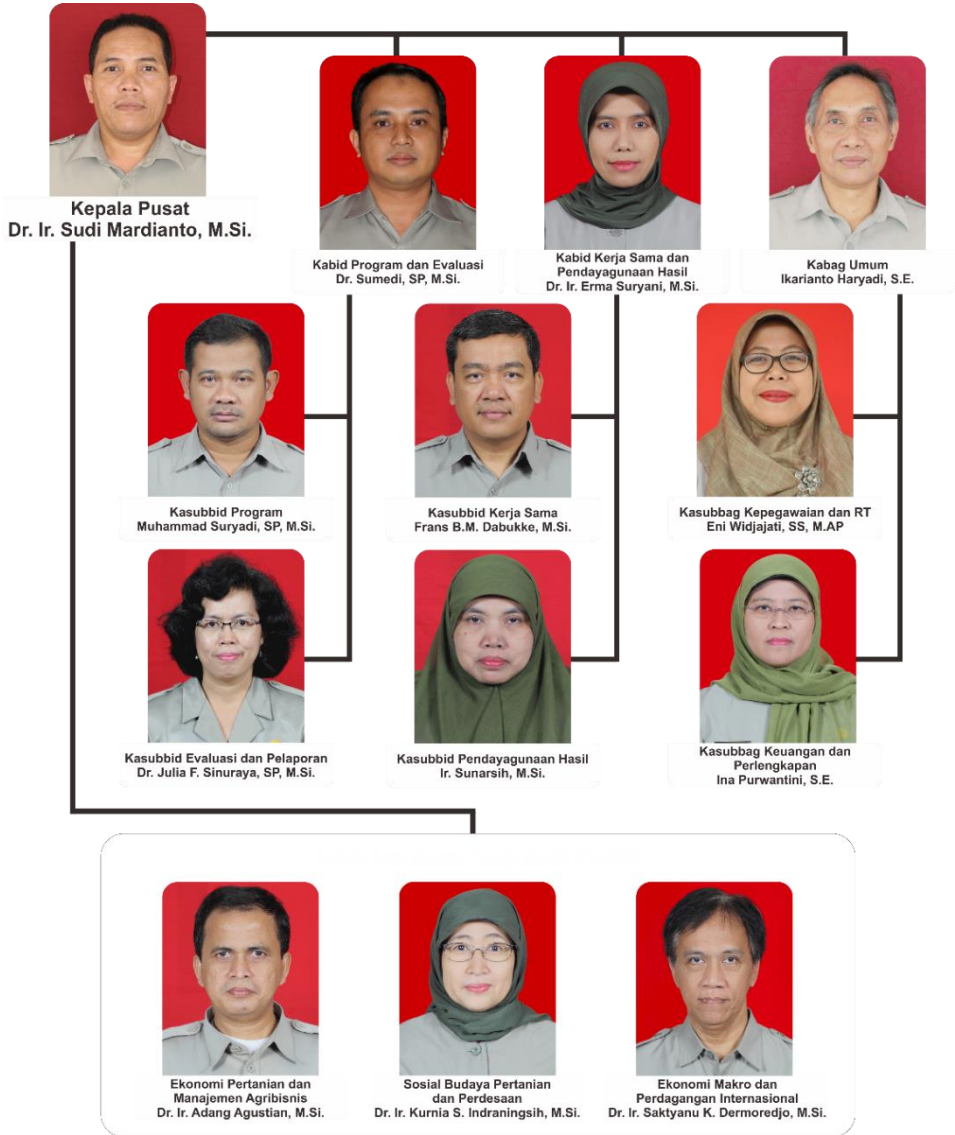
1. Perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
2. Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan di bidang pertanian.
3. Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan di bidang pertanian.
4. Pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
5. Pelaksanaan kerja sama dan mendayagunakan hasil analisis dan pengkajian serta konsultasi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
6. Evaluasi dan pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
7. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Pasal 1226 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015).

I.3. Sasaran Kelompok Pengguna Hasil Penelitian

1. Pejabat pembuat dan pengelola kebijakan pembangunan pertanian lingkup Kementerian Pertanian;
2. Pejabat pembuat kebijakan lembaga negara di luar Kementerian Pertanian;
3. Praktisi agribisnis;
4. Politisi, ilmuwan, dan masyarakat peminat pembangunan pertanian; dan
5. Peneliti.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/ Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, PSEKP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat setingkat Eselon IIA, dibantu oleh tiga unit struktural setingkat Eselon IIIA, yaitu Bagian Umum, Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil, Bidang Program dan Evaluasi, serta dilengkapi dengan Kelompok Jabatan Fungsional. Sementara masing-masing eselon IIIA dibantu oleh 2 unit struktural di

bawahnya setingkat eselon IVA, dengan struktur organisasi seperti disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

II. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian berdasarkan komposisi jabatan terdiri dari 8,77% jabatan struktural, 40,35% fungsional peneliti, 11,61% fungsional tertentu, dan 37,72% jabatan fungsional umum, serta dua orang dipekerjakan sebagai Attani oleh Kementerian Luar Negeri (Tabel 1).

Tabel 1. Keragaan SDM PSEKP berdasarkan jabatan, 2020

No.	Jabatan	Jumlah	Bobot (%)
1.	Struktural	10	8,77
2.	Fungsional Peneliti	46	40,35
	Peneliti Ahli Utama	16	14,04
	Peneliti Ahli Madya	15	13,16
	Peneliti Ahli Muda	6	5,26
	Peneliti Ahli Pertama	9	7,89
3.	Fungsional Tertentu	13	11,61
	Analisis Kebijakan Madya	1	0,88
	Analisis Kebijakan Pertama	1	0,88
	Analisis Kepegawaian Terampil	1	12,61
	Arsiparis Ahli Muda	1	0,88
	Arsiparis Ahli Pertama	1	0,88
	Pranata Humas Ahli Pertama	1	13,61
	Pranata Humas Terampil	1	0,88
	Pustakawan Ahli Muda	1	0,88
	Pustakawan Ahli Pertama	1	14,61
	Calon Perencana Ahli Pertama	1	0,88
	Calon Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0,88
	Calon Pranata Komputer Terampil	1	0,88
	Calon Statistisi	1	12,61
4.	Fungsional Umum	43	37,72
5.	Dipekerjakan pada Kementerian Luar Negeri	2	1,75
		114	100,00

Jumlah jabatan fungsional peneliti PSEKP sebanyak 46 orang terbagi atas beberapa bidang kepakaran. Berdasarkan bidang kepakaran, menunjukkan bahwa sebagian besar peneliti mempunyai keahlian dalam bidang kepakaran Ekonomi SDA dan Lingkungan, yaitu sebanyak 37 orang (80,43%), dan sisanya terbagi atas bidang kepakaran Sosiologi Pertanian, dan Kebijakan Pertanian sebanyak sembilan orang (19,57%) sebagaimana rincian pada Tabel 2. Selain bidang kepakaran tersebut, sampai dengan tahun 2020, PSEKP tercatat memiliki enam orang tenaga ahli dalam bidang riset dengan memperoleh penghargaan kepangkatan tertinggi

pada jenjang peneliti ahli utama, yaitu meraih gelar Profesor Riset. Dalam waktu yang akan datang jumlah Profesor Riset dan Peneliti Utama PSEKP diharapkan akan terus bertambah sejalan dengan tuntutan profesionalisme kegiatan di bidang pengkajian dan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Tabel 2. Jumlah peneliti menurut bidang kepakaran, 2020

No.	Bidang Kepakaran	Peneliti				Jumlah (orang)
		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	
1.	Ekonomi SDA dan Lingkungan	8	4	12	13	37
2.	Sosiologi Pertanian	1	2	3	2	8
3.	Kebijakan Pertanian	-	-	-	1	1
Jumlah		9	6	15	16	46

1. Formasi Jabatan Fungsional Peneliti dan Analis Kebijakan

PSEKP telah melakukan perhitungan kebutuhan peneliti sampai tahun 2024. Tabel 3 menunjukkan *bezetting* tahun 2020 untuk pejabat fungsional peneliti sebanyak 46 orang dan dua orang pejabat fungsional analis kebijakan. Sesuai dengan kebutuhan tahunan yang telah ditetapkan maka pada tahun 2024 dibutuhkan 76 orang peneliti dan 32 orang analis kebijakan.

Tabel 3. Bezetting dan kebutuhan jabatan fungsional peneliti, 2020–2024

No.	Jenjang Jabatan	Bezetting	Kebutuhan Tahun				
		2020	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peneliti Ahli Utama	16	20	23	23	23	23
2.	Peneliti Ahli Madya	15	23	23	23	23	23
3.	Peneliti Ahli Muda	6	12	12	15	15	15
4.	Peneliti Ahli Pertama	9	14	14	14	15	15
5.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	1	5	8	10	12
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	0	1	5	8	10	10
7.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	1	4	5	7	10
Jumlah		48	72	86	96	103	108

2. Kenaikan Pangkat Pegawai selama Tahun 2020

Sesuai ketentuan bagi PNS yang telah memenuhi syarat dapat diproses kenaikan pangkat (KP), yaitu pada periode April dan Oktober. Pegawai PSEKP yang naik pangkat pada periode bulan April dan Oktober tahun 2020 sebagai berikut:

a. Kenaikan Pangkat Periode April 2020

Tabel 4. Kenaikan Pangkat (KP) pegawai PSEKP periode April 2020 Kenaikan Pangkat PNS PSEKP pada periode April 2020 sebanyak enam orang. Kenaikan pangkat pegawai tersebut berdasarkan jenisnya terdiri dari lima orang merupakan kenaikan pangkat reguler (4 tahun dari jabatan fungsional umum) dan satu orang kenaikan pangkat pilihan (dari jabatan fungsional).

Tabel 4. Kenaikan pangkat (KP) pegawai PSEKP periode April 2020

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Keterangan
1.	Agus Suganda Nurwan 196708202000031001	Penata Muda Tk.I/ III/b	Pengemudi	KP Reguler
2.	Julvinus Saragih 196709222003121001	Penata Muda/ III/a	Pengemudi	KP Reguler
3.	Mas Hidayat R 196304032000031001	Penata Muda Tk.I/ III/b	Pengumpul Data	KP Reguler
4.	Iman Somantri 197003172000031001	Penata Muda Tk.I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	KP Reguler
5.	Maryadi 197007082003121001	Penata Muda/ III/a	Satuan Pengamanan	KP Reguler
6.	Ir. Tri Bastuti Purwantini 196207261989032002	Pembina/IV/a	Peneliti Ahli Madya	KP Pilihan

b. Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2020

Tabel 5 menunjukkan kenaikan Pangkat PNS PSEKP pada periode Oktober 2020 sebanyak dua orang. Kenaikan pangkat pegawai tersebut berdasarkan jenisnya terdiri dari satu orang merupakan kenaikan pangkat reguler (4 tahun dari jabatan fungsional umum) dan satu orang kenaikan pangkat pilihan (dari jabatan fungsional).

Tabel 5. Kenaikan pangkat (KP) pegawai PSEKP periode Oktober 2020

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Keterangan
1.	Dede Supriatna 196302221992031001	Pengatur Muda/ II/a	Satuan Pengamanan	KP Reguler
2.	Sheila Savitri, S.Sos 19770920200712001	Penata Muda Tk.I/III/b	Pustakawan Ahli Muda	KP Pilihan

3. Kenaikan Jenjang Jabatan

Tahun 2020 ada tiga pegawai PSEKP yang mengalami kenaikan jenjang jabatan. Adapun ketiga pegawai dan jenjang jabatan yang mengalami perubahan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Kenaikan jenjang jabatan, 2020

No.	Nama/NIP	Kenaikan jenjang jabatan		PAK Terakhir
		Dari	Ke	
1.	Sheila Savitri, S.Sos. 19770920200712001	Pustakawan Ahli Pertama/III/b	Pustakawan Ahli Muda/III/c	247,161
2.	Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D. 197412221999031001	Peneliti Ahli Pertama/III/b	Peneliti Ahli Muda/III/c	378,28
3.	Cut Rabiatul Adawiyah, S.P., M.Si. 197705162009122001	Peneliti Ahli Muda/III/c	Peneliti/Ahli Muda/III/d	306,22

4. Peningkatan Kapasitas SDM PSEKP selama tahun 2020

a. Pendidikan Informal

Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM PSEKP yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Peningkatan kapasitas SDM PSEKP melalui pendidikan informal, 2020

No.	Nama Kegiatan	Nama Pegawai/NIP	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
1.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Kartika Sari Septanti, S.T., M.E. 198809282019022002	30 Maret sd Mei 2020	Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA Lembaga Administrasi Negara)
2.	Mengikuti proses seleksi Petugas Belajar (S2)	Fajri Shoutun Nida, S.P. 199405112018012001	Awal bulan April – Desember 2020	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
3.	Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa	Muhammad Suryadi, S.P., M.Si. 197305102001121002	November 2020	Biro Umum dan Pengadaan
4.	Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) II	Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si. 196803161997031002	Agustus – Desember 2020	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
5.	Lomba Pustakawan Berprestasi	Sheila Savitri, S.Sos. 19770920200712001	November 2020	Pustaka Kementan

b. Seminar

Selain Pendidikan Informal, untuk meningkatkan kompetensi SDM, beberapa pejabat fungsional meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti seminar inter-

nasional sebagai pemakalah. Makalah seminar menghasilkan prosiding yang akan diterbitkan dalam jurnal internasional terakreditasi dan dapat menjadi *output* Hasil Kerja Minimal (HKM) pejabat fungsional peneliti sebagai syarat kenaikan jenjang jabatan. Adapun pegawai yang mengikuti seminar ditunjukkan pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Peningkatan kapasitas SDM PSEKP melalui seminar, 2020

No.	Tema Seminar	Waktu dan Penyelenggara	Judul Makalah
1.	International Conference on Agribusiness and Rural Development (IConARD)	13-14 Oktober 2021 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKMA Evaluation Formed Form PUAP Program in Overcoming Farming Financing in Rural Areas (Case Study: Magelang Regency). Pemakalah: Dr. Ir. Kurnia Suci, M.Si. 2. Analysis of Indonesian Nutmeg Export Development. Pemakalah: Dr. Helena J.P, M.Si. 3. The Study of Bioenergy with Molasses Raw Materials: Analysis of Potential and Problems in its Development: Pemakalah: Dr. Ir Adang Agustian, M.P. 4. LKMA Evaluation Formed Form PUAP Program in Overcoming Farming Financing in Rural Areas (Case Study: Magelang Regency). Pemakalah: Ir. Valeriana D, M.M 5. Farmers in ISPO Implementation: Ecological Issues, Legality and Sustainability. Pemakalah: Dr. Ir. Delima HA, M.S.
2.	The ^{2nd} International Conference on Sustainable Agriculture for Rural Development 2020	20 Oktober 2020 The Faculty of Agriculture, Jenderal Soedirman University (ICASARD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enhancing Onion Agribusiness Development Trough:e-planting Calender and Production Allovcation. Pemakalah: Ir. Sri Wahyuni, M.S. 2. Sweet Potato Agribusiness Development Strategy to Improve Farmers' Income. Pemakalah: Dr. Saktyanu Adi, M.Si. 3. Predicting The Impact of Climate Change on Indonesia's Five Main Horticulture Commities. Pemakalah: Dr. Ir. Adisetyanto, M.Si.

Tabel 8. Peningkatan kapasitas SDM PSEKP melalui seminar, 2020 (lanjutan)

No.	Tema Seminar	Waktu dan Penyelenggara	Judul Makalah
3.	1 st International Conference on Sustainable Tropical Land Management (ICSTLM)	16-22 September 2020 Indonesian Center for Agricultural Land Resources Research and Development (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian)	1. Study on the Use of Mining Land: Analysis of Land Potential and Constraints Faced. Pemakalah: Dr. Ir. Adang Agustian, M.P. 2. Challenges of soybean self-sufficiency policy in Indonesia. Pemakalah: Dr. Ir. Bambang Sayaka, M.Sc. 3. The Readiness Status of Independent Palm Oil: Pemakalah: Dr. Delima HA, M.S
4.	ICoSaPS (The 6 th International Conference on Social and Political Sciences) 2020	7-8 Oktober 2020 Universitas Sebelas Maret	Resilience of Women Tourism Workers during the Covid19 Pandemic in Bali. Pemakalah: Dr. Ir. Gabriella S, M.P.

5. Pengukuhan Profesor Riset

Pada tahun 2020, PSEKP memfasilitasi pejabat fungsional peneliti ahli utama yang memenuhi kriteria untuk melaksanakan Orasi Ilmiah sebanyak tiga orang yang telah dikukuhkan menjadi Profesor Riset. Judul naskah orasi ditunjukkan pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Judul naskah orasi Profesor Riset, 2020

No.	Nama	Judul Naskah Ilmiah	Pelaksanaan Orasi
1.	Prof. Dr. Ir. Saptana, M.Si.	Reformulasi Kemitraan Usaha Agribisnis sebagai Strategi Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura dan Unggas	1 September 2020
2.	Prof. Dr. Ir. Mat Syukur, M.S.	Inovasi Kelembagaan Keuangan Mikro untuk Meningkatkan Akses Petani Kecil pada Sumber Permodalan	1 September 2020
3.	Prof. Dr. Ir. Erwidodo, M.S.	Reorientasi Arah dan Strategi Menuju Ketahanan Pangan Berkemandirian dan Berdaya Saing di Era Pasar Global	21 Desember 2020

6. Evaluasi Kinerja Pegawai PSEKP

a. Penegakan Disiplin Pegawai Masa Pandemi Covid 19

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, serta memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, maka dilakukan perubahan sistem kerja Aparatur Sipil Negara agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

Maka untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: 1829/SE/KP.370/A/06/ 2020 tanggal 3 Juni 2020.

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 yang dilakukan PSEKP yaitu melakukan pengaturan kepadatan jumlah pegawai pada hari kerja dengan penugasan berupa penjadwalan pelaksanaan tugas kedinasan secara *work from office* (WFO) dan *work from home* (WFH) setiap bulan. Persentase pegawai yang bekerja di kantor (WFO) rata rata 40–65% dari total seluruh pegawai (baik PNS maupun tenaga PPNNP) pada setiap hari kerja.

b. Pemantauan Kinerja Pegawai

Pemantauan kehadiran dan kinerja pegawai dilakukan secara rutin dengan melaporkan rekap kehadiran pegawai kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian, sedangkan pemantauan kinerja pegawai dilakukan dengan menyelenggarakan rapat koordinasi melalui virtual meeting dengan seluruh pegawai yang dilakukan setiap bulan.

c. Verifikasi dan Penilaian Kinerja Bulanan dan Tahunan

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat, telah dibentuk Tim Verifikasi Kinerja yang bertugas untuk melakukan verifikasi kinerja pegawai berupa penilaian SKP bulanan, khususnya penilaian untuk pejabat fungsional. Hasil penilaian oleh pejabat yang ditunjuk kemudian diputuskan dalam rapat koordinasi, untuk selanjutnya disetujui oleh Kepala Pusat sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja pegawai. Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja/absensi dan tidak berkinerja sesuai dengan

ketentuan, dikenakan sanksi pemotongan tunjangan kinerja sesuai Permentan Nomor 12 dan 17 Tahun 2019, serta diterapkannya sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

7. Pengukuran Indeks Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja (IPNBK) PSEKP tahun 2020

Pengukuran IPNBK merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.070/6/2015 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian. Variabel pokok dalam monitoring dan evaluasi IPNBK yaitu: Nilai budaya kerja terdiri atas lima komponen terdiri dari 25 indikator dan 29 pertanyaan. Lima komponen nilai-nilai (*values*) dan makna bekerja bagi pegawai Kementan diyakini dapat menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab terhadap peningkatan produktivitas kerja (KKPID). Tujuan Monitoring dan evaluasi untuk mengevaluasi penerapan nilai-nilai dan makna bekerja di lingkungan Kementerian Pertanian, khususnya pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Pengumpulan data menggunakan aplikasi *google forms*. Obyek pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) Tahun 2020 lingkup PSEKP adalah tingkat kualitas penerapan nilai budaya kerja pada PSEKP yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas persepsi seluruh pegawai terhadap budaya kerja di PSEKP. Responden pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK) Tahun 2020 lingkup PSEKP berjumlah 108 orang pegawai, yang terdiri dari:

- a. Pejabat Struktural
- b. Pejabat Fungsional Peneliti
- c. Pejabat Fungsional Tertentu Lainnya
- d. Pejabat Fungsional Umum

Tabel 10. Nilai komponen budaya kerja PSEKP, 2020

No.	Komponen	Pertanyaan	Nilai	Konversi
1.	Komitmen	1.1 – 1.6.	3,84	95,92
2.	Keteladanan	2.1 – 2.5.	3,75	93,71
3.	Profesionalisme	3.1. – 3.5.	3,68	92,00
4.	Integritas	4.1. – 4.5.	3,71	92,78
5.	Disiplin	5.1. – 5.4.	3,85	96,33
Nilai Kualitas Budaya Kerja (IPBNK)			3,76	94,15

Nilai IPNBK: **3,76**; nilai konversi: **94,15** dan klasifikasi kualitas budaya kerja kategori **A (sangat baik)**

Dalam melakukan pengolahan data sesuai dengan pedoman pengukuran IPNBK lingkungan Kementerian Pertanian, klasifikasi kualitas budaya kerja yang

diperoleh dari pengolahan data IPNBK tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi kualitas budaya kerja PSEKP adalah A (sangat baik) dengan nilai IPNBK sebesar 3,76 dengan nilai konversi IPNBK sebesar 94,15 dengan predikat sangat memuaskan (A). Analisa data yang diperoleh dari hasil pengolahan data budaya kerja di PSEKP terhadap 108 responden, maka dapat dijelaskan hasil indikator Nilai Komponen Budaya Kerja pada Tabel 10.

8. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2020 melalui Aplikasi e-Kinerja

Berdasarkan Pasal 4 PP No. 46 Tahun 2011, penilaian prestasi kerja PNS dibagi dalam dua unsur yaitu:

1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dan dilakukan berdasarkan kurun waktu tertentu. Sasaran kerja pegawai meliputi beberapa aspek.
2. Perilaku kerja merupakan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seorang PNS yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun unsur perilaku kerja meliputi: kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya.

9. Penilaian Angka Kredit Tahunan (AKT 2020) bagi Pejabat Fungsional Peneliti melalui Aplikasi e-Peneliti

Sesuai Peraturan LIPI Nomor 20 Tahun 2019, bahwa setiap akhir tahun dilakukan penilaian pejabat fungsional peneliti melalui aplikasi ePeneliti. Sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut setiap peneliti harus mengajukan hasil kerja/output yang telah dicapai pada tahun berjalan. Hasil kerja/output yang diajukan berupa kegiatan yang tertuang dalam SKP maupun non-SKP. Penilaian angka kredit dilakukan oleh para *assessor* dari internal PSEKP. Setelah dilakukan penilaian Kepala Pusat akan menetapkan hasil penilaian angka kredit (HAPAK) dan Berita Acara Penilaian.

KEGIATAN RUMAH TANGGA PSEKP

1. Penanganan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan Covid-19 Sebagai Pusat Krisis (*Crisis Center*) di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 203/Kpts/OT.OSO/M/03/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Penyebaran Penyakit *Corona Virus Disease* (Covid-19) Lingkup Kementerian Pertanian, PSEKP telah melaksanakan

langkah-langkah sesuai dengan protokol kesehatan di lingkungan kantor, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Menteri Kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan/kebersihan yang memadai dan mencukupi berupa:
 - ✓ Tempat cuci tangan di depan kantor dan depan auditorium Dr. Ismunaji sebanyak tiga unit;
 - ✓ Menyediakan *hand sanitizer* di lobi, di Lorong, dan ruang rapat sebanyak 19 unit;
 - ✓ Memfasilitasi masker kepada pegawai per bulan (kain, maupun masker kesehatan);
 - ✓ Memfasilitasi *hand sanitizer* saku yang praktis dibawa oleh pegawai;
 - ✓ Membagikan *Eucalyptus roll on* dan *inhalant*;
 - ✓ Memberikan suplemen penambah daya tahan tubuh berupa vitamin, susu, dan madu.
2. Melakukan disinfeksi seluruh area ruang kerja, koridor, area fasilitas umum dan lingkungan kantor. Dari awal pandemi bulan Maret sampai dengan akhir tahun 2020 telah melakukan disinfeksi sebanyak sembilan kali, terdiri dari pembiayaan melalui DIPA Biro Umum dan Pengadaan sebanyak tiga kali, dan lima kali dengan anggaran DIPA PSEKP;
3. Melakukan pemantauan kesehatan pegawai dan keluarganya secara proaktif dan reguler serta pemeriksaan *rapid test* secara berkala kepada seluruh pegawai dan/atau PCR/swab test jika diperlukan;
 - a. Pemeriksaan *rapid test* antibodi dua kali (pertama tanggal 21 Juli 2020 oleh Klinik Utama Kementan dan kedua tanggal 22 September 2020 oleh RS Hermina Bogor);
 - b. PCR/swab test dilakukan oleh Klinik Kementan bekerja sama dengan RS EMC, dan bantuan pembiayaan dan anggaran dari DIPA PSEKP.

2. Pemeliharaan Gedung, Gardu Listrik, Genset, Pompa Sumur Air Dalam, Pemeliharaan AC, Peralatan Pengolah Data dan Kendaraan Dinas

Pada tahun 2020 sudah dilakukan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pencegahan Covid-19 berupa penyediaan sarana cuci tangan, bilik disinfeksi, alat pengukur suhu (*thermo gun*), penanganan disinfeksi seluruh ruangan dan area lingkungan kantor sebanyak sembilan kali, penyediaan bahan-bahan mitigasi, alat *purifier*, dan alat pendeteksi virus pada ruang rapat.

Perawatan berkala gardu listrik dan panel listrik telah dilakukan Oktober 2020 dan pemeliharaan perangkat pemadam kebakaran berupa penggantian cairan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Untuk pemeliharaan genset telah dilaksanakan berupa penggantian suku cadang secara periodik. Pemeliharaan berkala pompa sumur dalam, perbaikan *filter* air dan pembersihan bak penampung air. Perawatan terhadap 103 unit alat pendingin ruangan/*air condition* (AC) yang terdiri dari jenis *split wall*, *inverter standing floor*, dan *carsette* dilakukan secara menyeluruh dan perbaikan terhadap beberapa AC yang rusak dengan melakukan penggantian komponen yang rusak. Pemeliharaan terhadap peralatan pengolah data berupa personal komputer, laptop, printer dilakukan secara rutin. Mengingat kondisi perangkat pengolah data banyak yang telah berusia tua dan berkurang performanya, serta dalam rangka meningkatkan dukungan kinerja PSEKP, maka pada tahun 2020 telah dilaksanakan pengadaan laptop sebanyak 11 unit, personal komputer sebanyak 26 unit, printer laser, *scanner* dan mesin *foto copy* seluruhnya berjumlah 20 unit, serta alat pengolah data (tab) sebanyak 25 unit, peralatan *teleconference* sebanyak tiga unit, serta peralatan pendukung sarana gedung lainnya.

Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas roda empat sebanyak 14 unit, roda dua sebanyak 13 unit dan satu unit kendaraan roda tiga, dilakukan secara berkala, berupa pemeliharaan mesin, AC, ban dan penggantian suku cadang, dan termasuk biaya administrasi perpanjangan STNK.

3. Pemeliharaan dan Peningkatan Layanan Jaringan Internet serta Jaringan Telepon (PABX)

Jaringan telepon dan internet di PSEKP menggunakan fasilitas *Fiber Optic* sehingga pemeliharaan jaringan telepon dan fax terpadu dalam sistem PABX dilakukan tiga kali pada tahun 2020, demikian juga dengan pemeliharaan jaringan internet yang dilakukan secara berkala. Dalam rangka meningkatkan layanan internet telah dilakukan penggantian penyedia jasa layanan dengan menambah jumlah *access point* (WIFI) dengan kuota internet 200 mbps (*dedicated*) yang disediakan oleh PT. CBN Indonesia.

III. SARANA DAN PRASARANA

Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai kegiatan utama PSEKP didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, yaitu terdiri dari barang-barang tidak bergerak dan barang-barang yang bergerak. Barang-barang yang tidak bergerak terdiri dari: (1) tanah bangunan rumah negara golongan II, (2) bangunan gedung kantor permanen, (3) gedung pertemuan Dr. Ir. Ismunadji; bangunan *groundtank*/rumah panel, serta (4) rumah negara golongan II tipe C dan D permanen. Sementara barang-barang bergerak secara umum meliputi alat angkutan (kendaraan roda 4 dan roda 2), *furniture*, elektronik, serta aset tetap lainnya.

Pengelolaan Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) walaupun merupakan tanggung jawab Bagian Umum, tetapi secara moral adalah tanggung jawab seluruh pegawai yang menggunakan. Secara rinci pada Tabel II disajikan daftar kondisi barang yang dimiliki PSEKP sampai pada periode 31 Desember 2020.

Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)

Barang-barang tidak bergerak yang dimiliki PSEKP meliputi tanah dan bangunan. Keseluruhan tanah yang dimiliki PSEKP seluas 1.558 m² yang terdiri dari tanah bangunan rumah negara golongan II seluas 1.558 m² terletak di Ciapus. Sementara itu, bangunan yang dimiliki PSEKP adalah kantor yang terdiri atas dua unit bangunan di Jl. Tentara Pelajar 3B; satu unit bangunan gedung pertemuan, satu unit bangunan *groundtank*/rumah panel dan empat buah rumah dinas, secara keseluruhan dalam kondisi baik. Rincian barang tidak bergerak disajikan pada Tabel II.

Barang-Barang Bergerak

Pada periode 2020, jumlah barang-barang bergerak yang dimiliki oleh PSEKP sebanyak 1.733 unit, 1730 unit dalam kondisi baik, dua unit kondisi rusak, dan satu unit kondisi rusak sekali. Barang dalam kondisi rusak adalah satu server dan satu *handy talky* (HT). Barang yang dalam kondisi rusak sekali adalah satu unit sepeda motor. Barang-barang bergerak tersebut meliputi sarana transportasi/kendaraan dinas, mesin dan peralatan kantor, sarana komunikasi, dan barang bergerak penunjang kegiatan kantor lainnya. Fasilitas penunjang kerja yang dimiliki adalah komputer (PC unit) 125 unit, lap top/notebook 55 unit, scanner 19 unit, dan Printer 116 unit.

a. Barang Inventaris Alat Angkutan

Pada tahun 2020, kendaraan roda empat yang dimiliki PSEKP terdiri atas tiga belas unit minibus (kapasitas penumpang <14 orang) dalam kondisi baik. Sepeda motor ada sebelas unit dalam keadaan baik dan satu unit kondisi rusak sekali.

b. Barang Inventaris Peralatan Kantor

Pada tahun anggaran 2020 keadaan barang inventaris peralatan kantor adalah sebanyak 1.730 unit dengan kondisi baik. Sumber dana pengadaan barang inventaris tersebut berasal dari akumulasi pengadaan pada tahun-tahun sebelumnya dan penganggaran untuk pengadaan barang inventaris peralatan kantor pada anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Daftar kondisi barang inventaris Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	R	RS
I. BARANG TIDAK BERGERAK					
1	Tanah bangunan rumah negara golongan II	1 (1,558 M2)	1	0	0
	Jumlah	1 (1,558 M2)	1	0	0
2	Bangunan gedung kantor permanen	2 (3,469 M2)	2	0	0
3	Gedung Pertemuan Dr. Ismunadji	1 (700 M2)	1	0	0
4	Bangunan <i>groundtank</i> /rumah panel	1 (50 M2)	1	0	0
5	Rumah negara golongan II type C dan D	4 (240 M2)	4	0	0
	Jumlah	8 (4,459 M2)	8	0	0
II. BARANG BERGERAK					
6	Mini bus (penumpang 14 orang kebawah)	13	13	0	0
7	Sepeda motor	11	10	0	1
8	Tripod	7	7	0	0
9	Mesin ketik manual portable (11-13 inch)	4	4	0	0
10	Mesin ketik manual (18- 27 inch)	3	3	0	0
11	Lemari besi/metal	37	37	0	0
12	lemari kayu	72	72	0	0
13	Rak besi/metal	12	12	0	0
14	Rak kayu	8	8	0	0
15	Filing kabinet besi	89	89	0	0
16	Brandkas	4	4	0	0
17	Meja kerja kayu	105	105	0	0
18	Meja komputer	1	1	0	0
19	Kursi besi/metal	577	577	0	0
20	Sice/sofa	28	28	0	0
21	Meja rapat	73	73	0	0
22	Jam elektronik	7	7	0	0
23	A.C. split	74	74	0	0
24	Televisi	4	4	0	0
25	Video cassette	1	1	0	0
26	Tape recorder	4	4	0	0

Tabel 11. Daftar kondisi barang inventaris Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020 (lanjutan)

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	R	RS
27	Finger print	5	5	0	0
28	Wireless transmision system	2	2	0	0
29	Router	2	2	0	0
30	Papan visual	1	1	0	0
31	Power amplifier	1	1	0	0
32	Amplifier	2	2	0	0
33	Equalizer	1	1	0	0
34	Loudspeaker	10	10	0	0
35	Mic confrence system	23	23	0	0
36	Audio mixing	1	1	0	0
37	UPS	5	5	0	0
38	Tustel	2	2	0	0
39	Camera digital	6	6	0	0
40	Camera film	2	2	0	0
41	Wireless speaker TOA	7	7	0	0
42	Handycam	3	3	0	0
43	Blitzer	1	1	0	0
44	Lensa kamera	3	3	0	0
45	Layar film OHP	7	7	0	0
46	Facsimile	2	2	0	0
47	P.C. unit (desktop)	125	125	0	0
48	Notebook/laptop	55	55	0	0
49	Printer laser jet/deskjet/dot matrix	116	116	0	0
50	Scanner	19	19	0	0
51	Server	3	2	1	0
52	Mesin jilid	2	2	0	0
53	LCD (infocus)	7	7	0	0
54	PABX	4	4	0	0
55	Handy talky (HT)	5	4	1	0
56	Pesawat telpon <i>extension</i>	39	39	0	0
57	<i>External hardisk</i>	59	59	0	0
58	Mesin potong rumput	1	1	0	0
59	Megaphone	1	1	0	0
60	Alat pemotong kertas	1	1	0	0
61	Penangkal petir	1	1	0	0
62	Vacuum cleaner	1	1	0	0
63	Voice recorder	11	11	0	0

Tabel 11. Daftar kondisi barang inventaris Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	R	RS
64	CCTV	26	26	0	0
65	Software	16	16	0	0
66	Lemari es/kulkas	1	1	0	0
67	Dispenser	1	1	0	0
68	Diagnostik Set	1	1	0	0
69	Monitor CCTV LED 23	2	2	0	0
70	Roll opack	3	3	0	0
71	Standing A.C	2	2	0	0
72	Touch screen (komputer lainnya)	2	2	0	0
Total		1.733	1.730	2	1

Keterangan: B = Baik; R = Rusak; RS = Rusak Sekali

Anggaran DIPA, PNPB, dan Kerja Sama Penelitian

Anggaran PSEKP tahun 2020 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran dan variabel kegiatan. Variabel jenis pengeluaran dibedakan menurut belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sedangkan variabel kegiatan dibedakan menurut jenis kegiatan, yakni: kegiatan utama mencakup penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, serta kegiatan penunjang. Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA 2020 adalah Rp29.671.301.000 yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai Rp10.644.483.000, (2) Belanja Barang Rp17.227.778.000, dan (3) Belanja Modal Rp1.799.040.000. Perkembangan pelaksanaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA 2020 periode 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa, realisasi capaian keuangan secara total mencapai Rp29.078.604.456 (98,00%), terdiri dari pengeluaran untuk belanja pegawai Rp10.533.349.463 (98,96%), sementara belanja barang yang sudah direalisasikan Rp16.750.897.056 (97,23%) dan belanja modal yang sudah direalisasikan Rp1.794.357.937 (97,74%). Dengan demikian sisa anggaran per 31 Desember 2020 adalah Rp592.696.544 (2%).

Perkembangan pelaksanaan keuangan PSEKP TA 2020 periode 31 Desember 2020 secara rinci berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 12 hingga Tabel 15. Capaian PNPB PSEKP tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 15. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada PSEKP tahun 2020 senilai Rp73.100.000 yang diperoleh dari penerimaan umum, sedangkan PNPB dari penerimaan fungsional tidak ada. Hal ini disebabkan keluaran kegiatan penelitian PSEKP tidak bersifat teknis, namun berupa rekomendasi kebijakan yang bersifat *intangible* dan ditujukan bagi *stakeholder*.

Tabel 12. Perkembangan pelaksanaan keuangan kegiatan utama dan kegiatan penunjang Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020

Kegiatan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi		Sisa anggaran	
		Rp	%	Rp	%
1. Kegiatan utama (penelitian dan pengembangan sosial ekonomi dan kebijakan pertanian)	13.453.459.000	13.079.549.740	97,22	373.909.260	2,78
2. Kegiatan penunjang	16.217.842.000	15.999.054.715	98,65	218.787.284	1,35
Total	29.671.301.000	29.078.604.456	98,00	592.696.544	2,00

Tabel 13. Realisasi anggaran per jenis pengeluaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa anggaran	
			Rp	%	Rp	%
51	Belanja pegawai	10.644.483.000	10.533.349.463	98,96	111.133.537	1,04
52	Belanja barang	17.227.778.000	16.750.897.056	97,23	476.880.944	2,77
53	Belanja modal	1.799.040.000	1.794.357.937	99,74	4.682.063	0,26
	Jumlah	29.671.301.000	29.078.604.456	98,00	592.696.544	2,00

Tabel 14. Realisasi anggaran per kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan pertanian, 2020

Kode	Program/ kegiatan output	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi		Sisa anggaran	
			Rp	%	Rp	%
499.001	Layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian berkelanjutan	13.453.459.000	13.079.549.740	97,45	373.909.260	2,78
4992.951	Layanan internal	1.760.440.000	1.755.757.937	99,73	4.682.063	0,27
4992.994	Layanan perkantoran	14.457.402.000	14.243.296.779	98,52	214.105.221	1,48
	Jumlah	29.671.301.000	29.078.604.456	98,00	592.696.544	2,00

Tabel 15. Rekapitulasi PNPB Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan pertanian, 2020

Kode MAK	Uraian MAK	Perkiraan target penerimaan (Rp)	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa target penerimaan (Rp)	Target (%)
Penerimaan umum						
425131	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	73.100.000	6.798.152	6.789.152	66.301.848	
425912	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara					
425129	Penerimaan kembali belanja		19.412.401	19.412.401	0	
425911	Pegawai TAYL					
	Jumlah penerimaan umum	73.100.000	26.210.553	26.210.553	43.889.447	35,85
Penerimaan fungsional						
423216	Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC	0	0	0	0	0
	Jumlah penerimaan fungsional					
	Jumlah umum + fungsional	73.100.000	26.210.553	26.210.553	43.889.447	35,85

IV. PROGRAM

4.1. Tujuan dan Luaran Kegiatan

Tujuan umum kegiatan penyusunan program adalah untuk mendapatkan arah penelitian yang lebih terencana dan sistematis agar pelaksanaan kegiatan dan penelitian layak untuk dilaksanakan.

Secara rinci pelaksanaan kegiatan program bertujuan untuk:

1. Membuat perencanaan kegiatan dan penelitian PSEKP
2. Memperoleh implikasi tindak lanjut pelaksanaan program yang akan datang berdasarkan evaluasi kegiatan sebelumnya

Luaran yang diharapkan:

1. Rencana kegiatan dan penelitian PSEKP
2. Saran tindak lanjut pelaksanaan program yang akan datang

4.2. Perencanaan Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2020

Tujuan perencanaan kegiatan adalah agar seluruh kegiatan PSEKP dapat terlaksana secara optimal sesuai tahapan yang telah direncanakan. Sesuai dengan siklus perencanaan, penyusunan kegiatan PSEKP dilakukan pada satu tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Artinya, rencana kegiatan TA 2020 telah dilakukan pada TA 2019; perencanaan kegiatan TA 2021, telah dilakukan pada TA 2020; dan seterusnya. Usulan bentuk dan besaran anggaran untuk kegiatan rutin dikordinasikan oleh penanggung jawab kegiatan masing-masing bidang dan bagian berdasarkan kebutuhan riil kegiatan serta ketersediaan anggaran. Namun khusus kegiatan penelitian, dalam rangka memudahkan koordinasi dan meningkatkan kualitas kajian/penelitian yang akan dilakukan, Kepala PSEKP membentuk Tim Perencanaan Kegiatan dan Program Penelitian yang terdiri dari Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Ketua Kelti, peneliti senior PSEKP dan Staf Subbidang Program. Pada TA 2020, susunan Tim Teknis Perencanaan Kegiatan dan Program Penelitian sesuai Surat Penugasan Kepala PSEKP Nomor: B-23/Kpts/OT.160/A.11/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Pengarah : Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Program dan Evaluasi PSEKP
(merangkap anggota)

Ketua : Prof. Dr. Tahlil Sudaryanto (merangkap anggota)

Wakil Ketua : Dr. Mat Syukur (merangkap anggota)

Sekretaris : Kepala Subbidang Program PSEKP (merangkap anggota)

- Anggota : 1. Prof. Dr. Dewa K. Sadra S
2. Dr. Erwidodo
3. Dr. Handewi Purwati Saliem
4. Dr. Saptana
5. Dr. Sumaryanto
6. Dr. Bambang Irawan
7. Prof. Dr. Benny Rachman
8. Dr. Syahyuti
- Kesekretariatan : 1. Annisa Rika Rachmita, SP (Staf Subbidang Program)
2. Sri Suharyono, S.Sos. (Staf Subbidang Program)
3. Chaerudin, SE (Staf Subbidang Program)
4. Drs. Agus Abdul Syukur (Staf Subbidang Program)
5. Nur Intan Syamsiah (Staf Subbidang Program)
6. Resty Puspa Perdana, S.P., M.P. (Staf Subbidang Program)

Mekanisme Perencanaan Kegiatan Penelitian TA 2020 dan Pelaksanaan Tupoksi Subbidang Program

Tahapan perencanaan kegiatan penelitian PSEKP pada saat di bawah koordinasi Badan Litbang dibanding setelah dikoordinasikan Sekjen Kementan (merujuk Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian) pada prinsipnya tidak banyak berubah. Perubahan lebih terletak pada ruang lingkup kajian. Dengan dikoordinasi oleh Setjen, PSEKP diharapkan lebih mampu berperan besar dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan pertanian dalam lingkup yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada kegiatan Badan Litbang.

Tahap pertama dari siklus proses perencanaan penelitian dimulai dengan penjarangan topik-topik penelitian PSEKP yang disinkronkan dengan Rencana Strategis (Renstra) PSEKP, Sekjen dan Badan Litbang, serta program-program utama Kementan. Tahap selanjutnya dari penjarangan isu penelitian adalah penentuan topik yang menjadi prioritas yang akan diteliti/dikaji. Pada tahap ini Tim Teknis menyusun matriks ringkas kajian yang memuat gambaran judul, justifikasi, dan ruang lingkup yang akan dilakukan. Proses selanjutnya adalah penentuan penanggung jawab dan mentoring penyusunan proposal. Setelah proposal tersusun, maka dilanjutkan evaluasi dan penajaman oleh tim teknis kembali.

Pada tahap penajaman proposal diberikan saran dan komentar untuk penyempurnaan proposal tersebut terhadap aspek-aspek: (a) perumusan masalah, *review* hasil penelitian sebelumnya dan justifikasi penelitian, (b) perumusan tujuan dan keluaran, (c) kerangka pemikiran (landasan teoritis), (d) perencanaan *sampling*

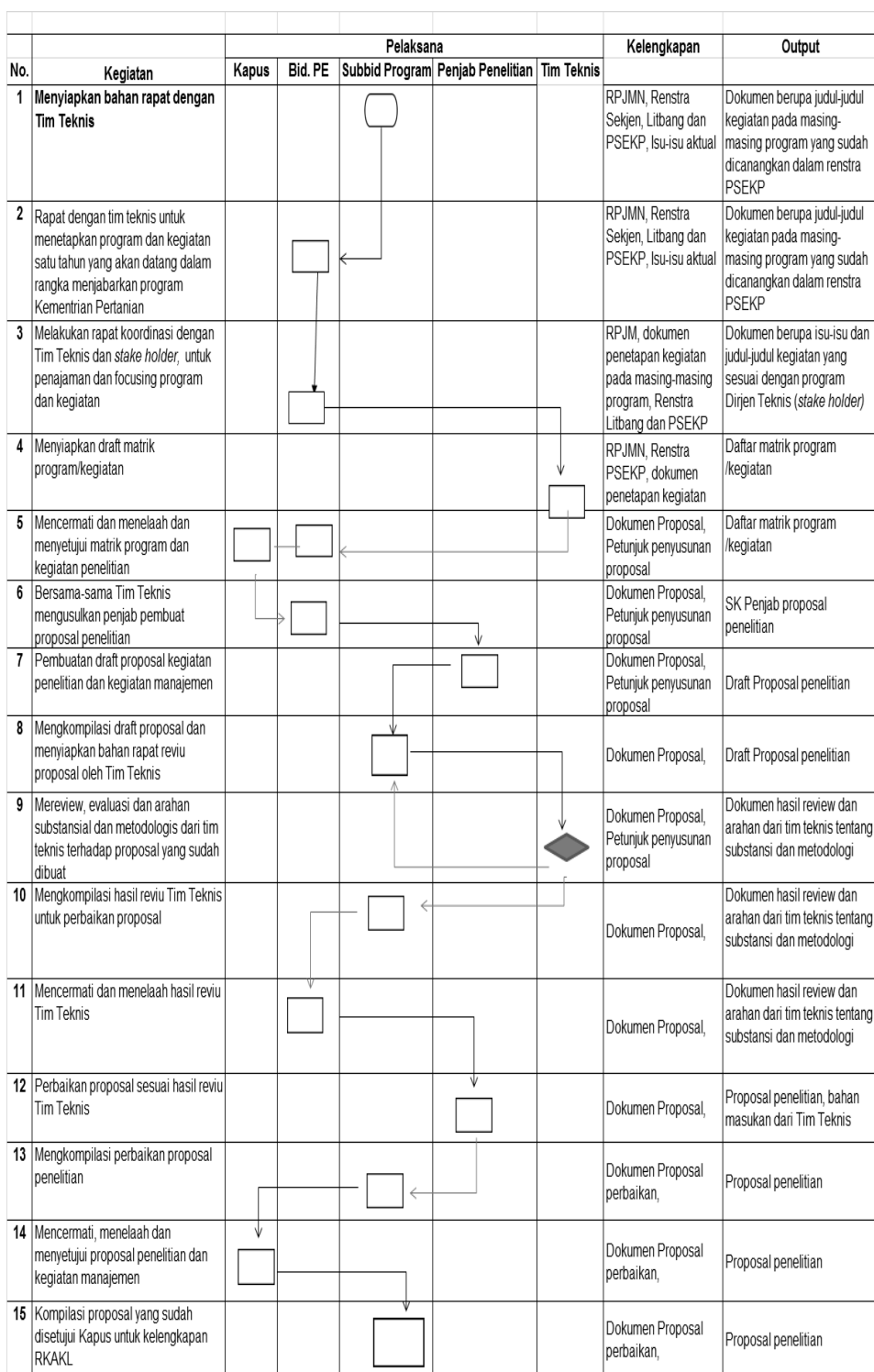
(provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, responden), (e) analisis data dan jenis data untuk menjawab setiap tujuan penelitian, dan (f) perencanaan operasional (SDM, dana, dan lain-lain). Perbaikan-perbaikan tersebut disampaikan kembali kepada penyusun proposal sebagai bahan penyempurnaan proposal operasional yang akan dipresentasikan dalam kegiatan FGD dengan mengundang pihak-pihak terkait. Gambaran ringkas alur perencanaan kegiatan penelitian internal PSEKP dapat dilihat pada Gambar 2.

Seiring dengan tahap-tahap perencanaan kegiatan penelitian tersebut (TOR-RKAKL-Proposal) dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan dalam hal redaksional judul penelitian, rencana kegiatan penelitian, penanggung jawab penelitian, lokasi penelitian maupun biaya/anggaran penelitian. Beberapa penyebab perubahan tersebut antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan tingkat Kementerian Pertanian terkait prioritas kegiatan, (2) penghematan anggaran akibat kebijakan nasional, dan (3) perubahan terkait administrasi kegiatan sehingga berdampak pada pelaksanaan rencana kegiatan.

Berdasarkan hasil pembahasan tim teknis PSEKP, peneliti senior PSEKP, Ketua Kelti dan mempertimbangkan dukungan PSEKP terhadap program Kementerian Pertanian, ketersediaan sumber daya peneliti, serta indikator kinerja utama (IKU), PSEKP merencanakan melakukan tujuh kajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian serta sembilan analisis kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian pada TA 2020. Target tujuh kajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian tersebut lebih rendah dibanding target jumlah kajian pada TA 2019. Judul akhir tujuh kajian/penelitian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian pada TA 2020 dan judul proposal pada TA 2021 dapat dilihat pada Tabel 16 dan Tabel 17.

Tabel 16. Judul penelitian/kajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian PSEKP TA 2020

No.	Judul penelitian/kajian
1.	Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Pertanian
2.	Kinerja dan Manfaat Adopsi Teknologi Tanaman Pangan dan Peternakan Hasil Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
3.	Strategi Peningkatan Produksi Pangan Utama Berkelanjutan
4.	Pengoptimalan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Mendukung Peningkatan Produksi Pangan
5.	Strategi dan Kebijakan Peningkatan Ekspor Kelapa dan Lada
6.	Strategi Peningkatan Investasi Pertanian
7.	Dinamika Sosial Ekonomi Perdesaan (Patanas): Studi Panel di Berbagai Agroekosistem



Gambar 2. Mekanisme perencanaan kegiatan penelitian internal PSEKP

Tabel 17. Judul proposal penelitian/kajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian PSEKP TA 2021

No.	Judul penelitian/kajian
1.	Strategi Pengembangan Korporasi Petani mendukung Pengembangan <i>Food Estate</i> di Kalimantan Tengah
2.	Pengembangan Rantai Pasok dan Strategi Pemulihan Usaha Hortikultura dan Peternakan dari Dampak Pandemi Covid-19
3.	Strategi Pengembangan Pangan Sumber Karbohidrat Alternatif Mendukung Diversifikasi Pangan
4.	Strategi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
5.	Strategi Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian Unggulan
6.	Kemanfaatan BPP sebagai Simpul Pelayanan Pembangunan Pertanian di Tingkat Kecamatan
7.	Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Patanas (Panel Petani Nasional)

Permasalahan yang Menonjol dalam Pelaksanaan Kegiatan di Sub-Bidang Program pada Tahun 2020

Selama kurun waktu 2020, permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan kegiatan di Subbidang Program adalah:

- Sering terjadi perubahan kebijakan di tingkat “atas”, baik terkait waktu, alokasi anggaran, maupun fokus kegiatan. Kondisi tersebut menyebabkan persiapan dan pelaksanaan kegiatan terkesan kurang terencana dengan baik dan mengganggu keseluruhan proses perencanaan. Banyak kasus dijumpai bahwa sebuah kegiatan harus didesign dalam waktu yang sangat singkat, sementara kegiatan tersebut memerlukan koordinasi dan informasi dengan bagian atau bidang yang lain untuk memutuskannya.
- Sistem anggaran untuk membiayai kegiatan belum sepenuhnya kompatibel dengan kebutuhan riil yang diperlukan, sehingga berakibat sebagian dana tidak terserap dengan baik atau harus melakukan revisi anggaran.
- Terlalu seringnya terjadi perubahan *software* dan aplikasi dalam sistem penganggaran.

Selain permasalahan yang umum seperti tersebut di atas, terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam sistem perencanaan dan penganggaran TA 2021 akibat adanya redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) di Kementerian/Lembaga. RSPP tersebut menyebabkan penyederhanaan program dan kegiatan di Kementerian Pertanian, dari semula terdapat sebelas program (yang menggambarkan jumlah eselon I yang ada di Kementan) menjadi hanya lima program. Perubahan tersebut berkonsekuensi pada pemetaan kegiatan di masing-

masing unit eselon II. Dengan penyederhanaan program tersebut, nomenklatur kegiatan di PSEKP bergabung dengan kegiatan di Biro Perencanaan sebagai kegiatan “Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum”.

Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan di Subbidang Program tersebut adalah:

- a. Dokumentasi arsip-arsip perencanaan program dan perbaikan koordinasi kegiatan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan perubahan perencanaan yang bersifat segera/mendadak baik akibat kebijakan Kementan atau Kementerian Keuangan.
- b. Peningkatan kemampuan staf baik terkait dengan operasionalisasi *software*, pemahaman dalam pembebanan mata anggaran dan peraturan-peraturan administratif lainnya, serta selalu melakukan monitoring untuk *updating software* dan informasi lainnya.

V. SINOPSIS PENELITIAN PSEKP TAHUN 2020

5.1. Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Pertanian

Kementerian Pertanian telah menjalankan pembangunan pertanian berbasis kawasan yang dibagi atas kawasan berbasis komoditas (sesuai dengan Permentan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian). Pendekatan kawasan yang terbaru adalah Kostratani (Komando Strategis Pertanian) yang beroperasi di level kecamatan. Korporasi petani merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi petani yang sangat strategis, karena akan menyatukan seluruh sumber daya yang dimiliki petani dan mengelolanya dalam manajemen yang terintegrasi. Seluruh nilai tambah usaha pertanian dari hulu ke hilir akan terkumpul ke petani, karena korporasi merupakan badan usaha milik petani, yang dibentuk dari, oleh, dan untuk petani.

Pilihan pada pembentukan korporasi petani merupakan sebuah terobosan baru kelembagaan yang kuat secara akademis, sehingga petani akan memiliki badan usaha yang kuat untuk menjalankan usaha yang cukup besar dan mengelola berbagai bentuk usaha pertanian pada satu kawasan yang cukup luas. Di tingkat lapang, pengembangan korporasi petani masih pada tahap penyusunan rencana. Dalam hal kebijakan dan pelaksanaan pembangunan pertanian berbasis kawasan, respons pemerintah daerah dan petani cukup besar, meskipun belum efektif mengembangkan seluruh potensi bisnis yang ada di wilayah tersebut.

Berbagai aspek untuk penyusunan Model Kelembagaan Ekonomi Petani di kawasan adalah: (1) jumlah unit usaha yang akan dikembangkan (berdasar wilayah dan waktu); (2) basis unit usaha (komoditas versus wilayah); (3) jenis badan hukum (koperasi, perusahaan, dan lain lain); (4) level unit usaha (koperasi primer, koperasi sekunder); (5) basis keanggotaan dalam KEP (pelaku utama, pelaku usaha, dan lain lain); (6) kerja sama dengan luar (*beneficiaries*, klien, kemitraan, dan lain lain); serta (7) pemenuhan permodalan (sumber, besaran, waktu, besar jasa, pengembalian, kredit, dan lain-lain). Untuk mendapatkan model kelembagaan korporasi petani perlu pendekatan partisipatif dengan petani, mulai dari tahap identifikasi potensi, penyusunan model, dan perancangan kelembagaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan buku pedoman (*manual book*) yang sederhana, informatif dan lengkap, sehingga model kelembagaan korporasi petani yang terbangun seragam dan sesuai dengan *grand design* yang telah disusun Kementan.

Keberhasilan pengembangan korporasi mesti dapat diukur secara kuantitatif, sehingga perlu disusun indikator keberhasilan korporasi petani, sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi, serta untuk menjadikan metode pendampingan lebih terstruktur. Integrasi dengan program Kementan dan pemerintah yang lain perlu dilakukan, karena pada hakekatnya visi dan targetnya sejalan, namun hanya

berbeda institusi pelaksana. Untuk pendampingan yang lebih efektif, maka pendekatan *build-operating-transfer* perlu diterapkan, dimana pendampingan dilakukan secara aktif dengan dukungan (sarana, SDM, keuangan) yang cukup sampai kegiatan bisnis berjalan mandiri.

5.2. Kinerja dan Manfaat Adopsi Teknologi Tanaman Pangan dan Peternakan Hasil Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Seiring dengan semakin majunya perekonomian internasional dan domestik, sektor pertanian pun semakin meningkat perkembangannya. Kegiatan penelitian dan pengembangan juga semakin dituntut berkontribusi dalam perkembangannya. Berbagai dukungan sumber daya termasuk sumber daya manusia semakin ditingkatkan dalam kerangka pelaksanaan riset dan pengembangannya. Penelitian/kajian di lingkup Badan Litbang Pertanian haruslah searah dengan perkembangan tersebut. Investasi yang telah dialokasikan pada kegiatan riset dan pengembangan, diharapkan akan memberikan manfaat (*return*) yang akan diterima (khususnya) baik oleh Balitbangtan maupun oleh pengguna akhir teknologi.

Inovasi teknologi harus bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas sehingga dapat memacu pertumbuhan produksi dan peningkatan daya saing. Inovasi teknologi juga diperlukan dalam pengembangan produk dalam rangka peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan transformasi produk sesuai dengan preferensi konsumen. Berbagai inovasi teknologi telah dihasilkan untuk menjawab tantangan dalam pembangunan pertanian. Jenis inovasi teknologi yang dihasilkan tersebut dapat berupa: varietas, *prototype*, produk dan lainnya. Banyak teknologi yang telah diciptakan namun belum termanfaatkan dengan baik. Badan Litbang Pertanian saat ini penilaian kinerja tidak hanya berbasis *output* tapi juga *outcome*. Muara dari teknologi yang dihasilkan adalah seberapa jauh teknologi tersebut dapat memberikan dampak dalam peningkatan pendapatan petani/pengguna teknologi.

Luas penyebaran varietas unggul baik padi dan kedelai akan meningkat seiring dengan meningkatnya ketersediaan benih serta kebijakan diseminasi teknologi yang dilakukan. Selain itu, upaya penyebaran varietas unggul juga akan semakin tinggi ketika produktivitasnya juga tinggi. Oleh karena itu, dalam menghasilkan teknologi varietas unggul juga diperlukan kematangan (kesiap terapan) teknologi yang dihasilkan. Dalam rangka meningkatkan adopsi teknologi varietas tanaman dan ternak ayam KUB, diperlukan dukungan: ketersediaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas hasil, dukungan pengetahuan dan keterampilan SDM petani/peternak, dukungan dalam kegiatan budi daya pertanaman/usaha ternak, permodalan usaha, dan pemasaran hasil. Dalam rangka penyebaran varietas unggul baru dan galur ayam KUB, diperlukan kerja sama secara sinergi antara lembaga penghasil teknologi Badan Litbang Pertanian dengan pihak industri pengganda

teknologi (pihak swasta). Hal ini diperlukan untuk mendukung keberlanjutan adopsi teknologi hasil Badan Litbang Pertanian.

5.3. Strategi Peningkatan Produksi Pangan Utama Berkelanjutan

Upaya peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan dihadapkan pada berbagai permasalahan dan kendala lain, tidak hanya aspek ekologi, namun juga sosial-budaya, ekonomi, kelembagaan, dan teknologi. Produksi padi masih berpotensi untuk ditingkatkan, namun untuk mencapai target peningkatan produksi padi sebesar 7% per tahun pada periode 2020–2024 tampaknya akan sulit untuk diwujudkan. Peningkatan luas panen jagung yang sangat tajam ditengarai sebagai kesuksesan Program Upsus jagung dengan luas tambah tanam (LTT)-nya. Peningkatan produksi jagung secara umum merupakan kontribusi dari peningkatan produktivitas, baik pada era Orde Baru maupun pada era Reformasi. Program peningkatan produksi padi secara berkelanjutan dilakukan berbasis intensifikasi dan ekstensifikasi. Dari program tersebut, selanjutnya disusun strategi kebijakan dan langkah operasionalnya untuk diimplementasikan pada jangka pendek, menengah, dan panjang.

Untuk meningkatkan produksi padi dan jagung masih diperlukan fasilitasi bantuan sarana produksi prapanen dan pascapanen, pembiayaan, dan penguatan kelembagaan. Sebagai dasar untuk perbaikan implementasi program/kebijakan pada masa depan, perlu dilakukan pemetaan/evaluasi dalam pemanfaatan berbagai bantuan dan penerapan kebijakan selama ini. Dengan memperhatikan karakteristik petani, keragaman budaya bertani, dan karakteristik wilayah, keberadaan penyuluh pertanian masih dibutuhkan, termasuk dalam upaya peningkatan produksi padi dan jagung. Berdasarkan kinerja dan permasalahan penyuluhan saat ini, pemerintah perlu meninjau kembali regulasi yang mengatur penempatan penyuluh pertanian pada unit kerja di kabupaten/kota yang berdampak pada keragaman dalam hal eselonisasi, pendanaan untuk bantuan operasional penyelenggaraan (BOP)/operasional, dan implementasi program di lapangan. Untuk memudahkan pengelolaan tenaga penyuluh, maka status kepegawaian penyuluh pertanian diusulkan berada di tingkat provinsi walaupun wilayah kerjanya berada di tingkat kabupaten.

5.4. Pengoptimalan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Mendukung Peningkatan Produksi Pangan

Peningkatan produksi pangan dapat dilakukan dengan dua cara melalui peningkatan produktivitas dan skala usaha. Petani masih mengalami keterbatasan pembiayaan sehingga belum semua petani telah mengadopsi teknologi yang diintroduksi dan berusaha pada skala optimal. Sebagian dari petani masih memperoleh dukungan pembiayaan dari sektor informal dengan beban bunga relatif tinggi. Berdasarkan hal itu, pemerintah memberikan dukungan pembiayaan berupa kredit program yang saat ini berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kebijakan pemerintah selama periode 2007–2020 telah mendorong evolusi KUR ke arah yang memudahkan bagi petani untuk mengakses KUR. Menurut petani, baik nasabah maupun nonnasabah KUR, persyaratan dan prosedur pengajuan, tingkat suku bunga, jarak rumah petani ke kantor penyalur KUR, sosialisasi, dan kesesuaian jumlah realisasi dengan jumlah pengajuan pinjaman berpengaruh signifikan terhadap keputusan petani untuk memanfaatkan KUR.

Rendahnya tingkat partisipasi petani dapat diinterpretasikan pada dua sisi yang berbeda. *Pertama*, diperlukan upaya mendorong agar petani meningkatkan partisipasi dengan cara: sosialisasi, kemudahan persyaratan dan melakukan penyesuaian, dan kebijakan terobosan. Upaya meningkatkan partisipasi akan meningkatkan produksi, baik melalui peningkatan produktivitas dan/atau peningkatan skala usaha. *Kedua*, petani yang membutuhkan pembiayaan KUR relatif kecil karena sudah memiliki modal dari hasil usaha sendiri dan adanya program subsidi penyediaan sarana produksi yang mendukung usaha petani. Akan tetapi berdasarkan uraian sebelumnya rendahnya partisipasi ini lebih disebabkan oleh penyebab pertama.

Untuk meningkatkan partisipasi petani terhadap pemanfaatan KUR pertanian dilakukan dengan cara: (i) mempersempit senjang antara pedoman yang diterbitkan Komite KUR dan implementasi KUR di daerah oleh penyalur KUR dengan cara sosialisasi, promosi, dan advokasi yang dilakukan secara terkoordinasi dan berjenjang antara pihak terkait; (ii) meningkatkan peran lembaga *linkage* seperti LKMA dan/atau koperasi tani dengan memberi margin tertentu antara penyalur KUR dan lembaga *linkage* dengan cara subsidi bunga yang berbagi; dan (iii) pihak Kementerian Pertanian menerbitkan Petunjuk Teknis KUR Pertanian yang dilengkapi dengan struktur ongkos usaha tani, dan mencantumkan aktivitas hulu-hilir yang merupakan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian sehingga dalam pencatatan di KBLI (Klasifikisasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dapat dimasukkan menjadi produk/output Kementerian Pertanian. Keefektifan kebijakan pembiayaan seperti KUR perlu didukung oleh kebijakan lain, seperti pengendalian impor, terutama produk pangan yang sebagian masih diimpor seperti: gula, daging sapi/kerbau, dan bawang merah.

5.5 Strategi dan Kebijakan Peningkatan Ekspor Kelapa dan Lada

Program peningkatan ekspor pertanian tiga kali lipat (GraTiEks) merupakan salah satu program strategis Kementerian Pertanian pada periode tahun 2020–2024. Program ini diharapkan menjadi akselerasi peningkatan besaran (volume dan atau nilai) ekspor produk perkebunan dan turunannya, sehingga dapat memperebutkan dan memenangkan pasar ekspor dunia. Untuk mewujudkan tujuan ini tentunya tidak mudah, masih terdapat banyak kendala dan tantangan yang dihadapi terkhusus dalam perdagangan kelapa dan lada, mulai dari hulu hingga hilir.

Kinerja produksi dan produktivitas kelapa Indonesia selama sepuluh tahun terakhir menurun akibat penurunan luas tanam, umur tanaman yang sudah tua, dan pengelolaan budi daya yang belum optimal dan masih bersifat konvensional (sebagian besar belum sesuai dengan cara GAP), serta benih yang digunakan masih benih asalan. Kinerja produksi lada Indonesia selama sepuluh tahun terakhir meningkat. Produksi dan produktivitas mengalami pertumbuhan walau masih dengan angka yang kecil, dan areal menghasilkan cenderung mengalami penurunan. Produktivitas lada Indonesia masih jauh di bawah rata-rata dunia dan Vietnam sebagai negara pesaing utama, serta Brazil dan India. Produksi lada Indonesia 96% dihasilkan oleh petani rakyat yang masih mempergunakan cara tradisional.

Upaya percepatan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing produk kelapa dan lada di pasar ekspor dapat dilakukan dengan cara perbaikan kualitas produk melalui pemberdayaan dan penguatan lembaga/balai penelitian dalam memeriksa dan menguji kandungan kotoran, bakteri dan jamur, atau hambatan nontarif (NTM) sehingga memenuhi persyaratan ekspor; pemerintah (pusat dan daerah) bersama pelaku kepentingan, khususnya eksportir, harus bersinergi untuk secara cepat memenuhi semua persyaratan ekspor yang berlaku. Untuk itu, perlu disusun peta jalan (*roadmap*) pelaksanaan program GraTiEks agar setiap langkah dan kegiatan dapat secara sistematis dipetakan, siapa yang bertanggung jawab untuk kegiatan mana, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan; fasilitasi dan mendorong berkembangnya jasa sistem resi gudang (SRG) sesuai amanat UU No. 9/2006. Keberhasilan penyelenggaraan SRG akan menjadi pendorong terbangunnya sistem pergudangan nasional, yang merupakan pilar utama pengelolaan cadangan, kontinuitas pasokan dan stabilisasi harga berbasis mekanisme pasar; dan upaya diplomasi guna mendorong industri kelapa dan lada perlu dilakukan, membuka pasar baru, mempertahankan outlet (pasar ekspor) dan mempromosikan produk tersebut. Demikian juga, upaya percepatan kemudahan layanan penerbitan SKA, pelatihan calon eksportir, optimalisasi kerja sama bilateral dan regional dengan mitra dagang, dan peningkatan akses pasar melalui promosi dan misi dagang, *business matching* secara virtual melalui perwakilan perdagangan di negara mitra menjadi hal penting untuk diimplementasikan sehingga pelaksanaan program GraTiEks dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah juga perlu hadir sebagai fasilitator dalam menyediakan regulasi untuk mengatur dan mengawasi ekspor kelapa butir.

5.6 Strategi Peningkatan Investasi Pertanian

Pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yang tetap positif saat ini menjadi perhatian, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Peningkatan investasi untuk suatu usaha pada komoditas pertanian tertentu menjadi bagian penting dalam melihat suatu prospek dari perkembangan usaha pertanian. Namun demikian, agar semakin banyak minat berinvestasi dibutuhkan persiapan yang matang mengingat

saat ini sedang dalam proses transisi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan investasi termasuk sektor pertanian.

Komponen makro yang memengaruhi investasi pertanian adalah infrastruktur awal untuk memulai bisnis yang meliputi infrastruktur jalan nasional (antarprovinsi), jalan provinsi (antarkabupaten/kota), dan jalan kabupaten (antarkecamatan). Komponen berikutnya adalah pasokan air, sambungan internet, dan biaya komunikasi. Jalan raya, walaupun tidak bebas hambatan, sangat bermanfaat dalam transportasi bahan baku maupun produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Air irigasi maupun air bersih merupakan kebutuhan, untuk berbagai keperluan produksi pertanian di lapang maupun dalam pengolahan produk primer menjadi produk turunan. Sambungan internet yang baik dan biaya komunikasi terjangkau akan mengurangi biaya transaksi dan komunikasi. Akselerasi investasi dan akselerasi pemasaran merupakan komponen berikutnya atau ditambah komponen pertama. Akses pasar, akses modal, stabilitas sosial politik dan perijinan yang cepat sangat dibutuhkan agar investasi berjalan sesuai yang diharapkan.

Beberapa hal yang diperlukan dalam penguatan antarpelaku agribisnis adalah: a) perlunya penguatan lembaga penelitian untuk terus menciptakan varietas yang sesuai dengan permintaan pasar baik untuk dalam negeri dan luar negeri; b) petani didorong untuk dapat menanam pertanaman dengan menggunakan varietas yang sesuai serta melakukan praktek pertanian yang baik (*good agriculture practises*); c) perusahaan pengolah produk pertanian agar dapat mendorong petani untuk menanam varietas unggul menggunakan benih/bibit berkualitas; d) perlunya memperluas ekspor pasar untuk mendongkrak harga di tingkat petani dan produksi dalam negeri, khususnya terutama selama pandemi COVID-19; dan e) lembaga pemerintah, khususnya dinas pertanian kabupaten/kota agar lebih memperhatikan tanaman sekunder yang memiliki prospek yang baik. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kebijakan per komoditas terlihat pada aspek koherensi kebijakan, tata kelola dan lembaga publik, dan kerja sama internasional. Masing-masing aspek akan melekat di K/L terkait sehingga terjadi sinkronisasi kemudahan berusaha sehingga terjadi peningkatan investasi dengan arah yang saling melengkapi.

5.7. Dinamika Sosial Ekonomi Perdesaan (Patanas): Studi Panel di Berbagai Agroekosistem

Berbagai kebijakan dan program pembangunan pertanian dan perdesaan secara terus menerus dan berkesinambungan berkonsekuensi terhadap perubahan alokasi berbagai sumber daya. Implikasi lebih lanjut yaitu pada perubahan struktur ekonomi perdesaan, yang dicerminkan melalui perubahan atau dinamika struktur mata pencaharian masyarakat perdesaan, penggunaan lahan, jenis komoditas utama, dan faktor-faktor lain yang berimplikasi pada peningkatan peran sektor nonpertanian

pada perekonomian perdesaan. Dinamika tersebut mencerminkan proses transformasi pertanian dan perdesaan yang perlu dimonitor, dikaji, dan dievaluasi.

Keberadaan database yang akurat dan komprehensif menjadi syarat keharusan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi dan spesifikasi agroekosistem setempat. Database tersebut perlu didukung oleh keberadaan program pengolahan data (IT) yang handal, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi secara tepat waktu, tepat tujuan, dan sasaran. Kepadatan penduduk yang tinggi di perdesaan Jawa, dapat direlokasi melalui program transmigrasi ke luar Jawa yang diintegrasikan dengan program pengembangan kawasan pertanian. Untuk menarik minat tenaga kerja muda perlu memperkenalkan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi, mekanisasi pertanian, dan teknologi informasi.

Penatagunaan lahan secara lebih optimal dengan mempertimbangkan aspek potensi sumber daya lahan, pertumbuhan ekonomi wilayah, kesempatan kerja, dan aspek ekologis. Pengelolaan limbah pertanian melalui pengembangan pupuk organik dan pertanian organik guna meningkatkan nilai tambah, kesuburan lahan pertanian, dan mengendalikan konversi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian. Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan perlu dilakukan akselerasi pengembangan infrastruktur perdesaan. Kebijakan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur umum harus memperhatikan karakteristik agroekosistem dan komoditas unggulan serta ditujukan mendukung sistem logistik dari sentra produksi ke pusat-pusat pasar. Pengembangan kualitas sarana dan prasarana perdesaan sangat diperlukan untuk pembangunan pertanian, diprioritaskan yang berkenaan dengan aksesibilitas/ transportasi. Dalam operasionalnya dapat diprioritaskan pada perdesaan agroekosistem lahan kering, agroekosistem lahan sawah pasang surut dan lebak.

Kebijakan yang kondusif untuk mendukung pengembangan pertanian di masa mendatang adalah kebijakan dan program yang mampu mendorong partisipasi kaum muda menggeluti pertanian sebagai profesinya. Secara operasional melalui pengembangan inovasi teknologi usaha tani yang secara signifikan dapat meningkatkan produksi dan keuntungan usaha tani. Selain itu, pentingnya pengembangan karakteristik teknologi pertanian yang mampu menarik minat kaum muda untuk menerapkannya. Pada aspek lingkungan hidup dan bencana alam, kurangnya upaya pelestarian lingkungan dan tren kejadian bencana alam yang semakin meningkat dapat mengancam usaha tani dan produksi pertanian. Kebijakan pemerintah harus mampu mendorong praktek usaha tani yang ramah lingkungan melalui usaha tani organik, usaha tani konservasi, serta integrasi tanaman ternak.

VI. PENDAYAGUNAAN HASIL DAN KERJA SAMA PENELITIAN

6.1. Pendayagunaan Hasil

6.1.1. Bentuk-Bentuk Diseminasi Hasil Penelitian dan Analisis Kebijakan

Bentuk-bentuk diseminasi hasil penelitian dan analisis kebijakan berupa jurnal, *newsletter*, buku tematik, leaflet, website, media sosial, dan webinar. Terdapat tiga jurnal yang dikelola PSEKP, dan ketiganya terakreditasi Sinta 2. Media sosial yang digunakan sebagai media diseminasi oleh PSEKP berupa facebook, instagram, twitter, dan yang terbaru youtube.

Saat ini PSEKP mengelola tiga jurnal yaitu Jurnal Agro Ekonomi (JAE), Forum Agro Ekonomi (FAE), Analisis Kebijakan Pertanian (AKP). Setiap tahun naskah yang masuk cukup banyak, namun yang memenuhi standar penilaian naskah tidak banyak sehingga hal tersebut menyulitkan dalam pemenuhan kontinuitas terbitan (Tabel 18).

Tabel 18. Statistik naskah jurnal PSEKP, 2020

Nama jurnal	Naskah masuk	Hasil penilaian naskah		Naskah dalam proses penilaian dan perbaikan			
		Tolak	Sudah terbit	TE	MB	RP	Penulis
Jurnal Agro Ekonomi	78	65	7	-	1	2	3
Forum Agro Ekonomi	25	12	5	-	-	2	6
Analisis Kebijakan Pertanian	27	5	4	7	5	2	4

Keterangan: TE=Tim Editor, MB= Mitra Bestari, RP=Redaksi Pelaksana

1. Jurnal Agro Ekonomi (JAE)

Jurnal Agro Ekonomi (JAE) adalah media ilmiah primer penyebaran hasil-hasil penelitian sosial-ekonomi pertanian dengan misi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional para ahli sosial ekonomi pertanian serta informasi bagi pengambil kebijakan, pelaku, dan pemerhati pembangunan pertanian dan perdesaan. JAE diterbitkan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dua nomor dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan Oktober, terbit perdana pada Oktober 1981. Sejak tahun 2017, untuk menjangkau lebih banyak naskah dan memperkaya artikel JAE, maka PSEKP melakukan kerja sama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) sesuai dengan surat Nomor 726.5/HM.140/A.11/6/2017 dan 1306/SK/PP.PERHEPI/ VI/2017.

Jurnal Agro Ekonomi terbit dalam bentuk tercetak dan daring (online journal system-OJS). Terbitan dalam bentuk OJS dapat diakses pada alamat: <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jae/>. JAE (versi cetak) sudah terakreditasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Sertifikat Akreditasi Nomor 645/AU3/P2MI-LIPI/07/2015. Pada tahun 2018 JAE telah

melakukan akreditasi ulang dan berhasil meraih sertifikat akreditasi dengan Nomor 21/E/KPT/2018 tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 148/M/KPT/2020 JAE ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 2. Akreditasi berlaku selama lima tahun, yaitu Volume 37 Nomor 2 Tahun 2019 sampai Volume 42 Nomor 1 Tahun 2024.



Gambar 3 . Sertifikat akreditasi dan Jurnal Agro Ekonomi yang terbit tahun 2020

Selama tahun 2020 telah diterbitkan JAE dalam bentuk cetak sebanyak dua nomor, yaitu JAE Volume 37 No. 2 Oktober 2019 dan JAE Volume 38 No. 1 Mei 2020, sedangkan terbitan secara OJS terjadwal untuk JAE Volume 38 No. 1 dan Nomor 2. Berikut disajikan JAE yang diterbitkan dalam bentuk tercetak selama tahun 2020 (Tabel 19 dan Tabel 20).

Tabel 19. Judul dan penulis artikel pada Jurnal Agro Ekonomi Volume 37 No. 2, Oktober 2019

No.	Judul	Penulis
1.	Technical Efficiency and Income Level of Sugarcane Farming in Pati Regency	Dwi R. Mulyanti, Jamhari
2.	Dampak Penggunaan Combine Harvester terhadap Kehilangan Hasil Panen Padi di Provinsi Banten	Eka Rastiyanto Amrullah, Ani Pullaila
3.	Efisiensi Teknis Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Sawah di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	Restie Novitaningrum, Suprpti Supardi, Sri Marwanti
4.	Dampak Kebijakan Domestik terhadap Ketersediaan Jagung Untuk Bahan Baku Industri Pengolahan di Indonesia	Veralianta Br Sebayang, Bonar M. Sinaga, Harianto, I Ketut Kariyasa
5.	Dampak Pengembangan Biofuels terhadap Volatilitas Harga Beberapa Komoditas Pangan di Pasar Dunia	Fathimah Sholihah, Nunung Kusnadi

Tabel 20. Judul dan penulis artikel pada Jurnal Agro Ekonomi Volume 38 No. 1, Mei 2020

No.	Judul	Penulis
1.	Penilaian Keberlanjutan Sistem Usaha Kentang dengan Kriteria Multidimensi: Studi Kasus di Dataran Tinggi Dieng, Wonosobo	Rizka Amalia Nugrahapsari, Rima Setiani, Budi Marwoto, Jawal Anwarudinsyah, Sulusi Prabawati
2.	Strategy Formulation of Farmers Capacity Building through Technological Innovation in Disadvantaged Regions of Indonesia	Dewa Ketut Sadra Swastika, Kurnia Suci Indraningsih
3.	Volatilitas dan Transmisi Harga Cabai Merah Keriting pada Pasar Vertikal di Provinsi Bengkulu	Miftahuljanah, Ketut Sukiyono, Putri Suci Asriani
4.	Pemilahan Volatilitas Harga Daging Sapi Menggunakan Metode <i>Ensemble Empirical Mode Decomposition</i>	Fitria Hasanah, Hari Wijayanto, I Made Sumertajaya
5.	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pilihan Petani Atas Pola Tanam di Agroekosistem Lahan Kering	Rangga Ditya Yofa, Yusman Syaukat, Sumaryanto

2. Forum Agro Ekonomi (FAE)

Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi hasil penelitian yang berisi review hasil penelitian sosial ekonomi pertanian di Indonesia, terbit untuk pertama kalinya pada bulan Juli 1982 dengan No. ISSN 0216-4361. FAE memuat *critical review* hasil-hasil penelitian para peneliti PSEKP dan lembaga lainnya. FAE juga menampung naskah-naskah yang berupa gagasan-gagasan ataupun konsepsi-konsepsi orisinal dalam bidang sosial ekonomi pertanian. FAE terbit dua kali setahun pada bulan Juli dan Desember dengan omset 500 eksemplar untuk setiap nomor terbitan. Pada Tahun 2017, untuk menjangkau lebih banyak naskah dan memperkaya artikel FAE, maka PSEKP melakukan kerja sama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) sesuai dengan surat Nomor 726.6/HM.140/A.11/6/2017 dan 1305/SK/PP.PERHEPI/VI/2017.

Pada bulan Juli 2015, FAE mendapat sertifikat terakreditasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Nomor Akreditasi 643/AU3/P2MI-LIPI/07/2015. FAE terakreditasi kembali berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Nomor Sertifikat 21/E/KPT/2018 Tanggal 9 Juli 2018. Akhir tahun 2020 reakreditasi kembali diajukan, dan telah lolos desk administrasi.

Forum Agro Ekonomi terbit dalam bentuk tercetak dan daring (online journal system-OJS). Terbitan dalam bentuk OJS dapat diakses pada alamat: <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/>. Selama tahun 2020, secara tercetak telah diterbitkan FAE Volume 37 Nomor 2 dan FAE Volume 38 Nomor 1, sedangkan secara daring (OJS) terjadwal terbit FAE Volume 38 Nomor 1 dan Nomor 2. Terdapat selisih satu nomor dalam bentuk penerbitan tercetak dengan OJS. Berikut disajikan FAE yang diterbitkan dalam bentuk tercetak selama tahun 2020 (Tabel 21 dan Tabel 22).



Gambar 4. Forum Agro Ekonomi yang terbit tahun 2020

Tabel 21. Judul dan penulis artikel pada Forum Agro Ekonomi Volume 37 Nomor 2, Desember 2019

No.	Judul	Penulis
1.	Dukungan dan Penguatan Peternak dalam Usaha Ternak Kerbau di Provinsi Banten	S. Rusdiana, C. Talib, A. Anggraeni
2.	Green Revolution's Role and Impact: Organic Farming Potential for Indonesian Sustainable Agriculture	Ashari, Juwaidah Sharifuddin, Zainal Abidin Mohammed, Nurul Nadia Ramli, Yong Farmanta
3.	Pertanian Organik: Konsep, Kinerja, Prospek, dan Kendala	Tri Bastuti Purwantini, Sunarsih
4.	Rekonseptualisasi Petani Sebagai Basis Pembangunan Pertanian Indonesia	Syahyuti
5.	Relasi Sosial dan Resiliensi Komunitas Petani Korban Erupsi Gunung Berapi di Kawasan Relokasi	Sri Suharyono, Nurmala K. Panjaitan, Saharuddin

Tabel 22. Judul dan penulis artikel pada Forum Agro Ekonomi Volume 38 Nomor 1, Juli 2020

No.	Judul	Penulis
1.	The Determinants of Sustainable Agricultural Technology Adoption	Ashari, Handewi P. Saliem, M. Maulana, Ening Ariningsih, Kartika Sari Septanti
2.	Pengentasan Rumah Tangga Rawan Pangan dan Gizi: Besaran, Penyebab, Dampak, dan Kebijakan	Agung Hendriadi, Mewa Ariani
3.	Impacts of Upsus Program on The Cost Efficiency and Competitiveness of Rice Production in Indonesia	Adi Setiyanto, Isabelita M. Pabuayon
4.	Prospect for Farmers' Adoption of True Shallot Seed	Bambang Sayaka, Sahat M. Pasaribu, Saktyanu Kristiantoadi
5.	Peranan Petani Milenial Mendukung Ekspor Hasil Pertanian di Indonesia	Rika Reviza Rachmawati, Endro Gunawan

3. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian (AKP)

Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) adalah media jurnal ilmiah yang membahas isu aktual pembangunan pertanian yang memuat artikel analisis kebijakan responsif dan antisipatif pertanian daerah dan nasional. Pada Tahun 2017, untuk menjangkau lebih banyak naskah dan memperkaya artikel AKP, maka PSEKP melakukan kerja sama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) sesuai dengan surat Nomor: 727.7/HM.140/A.11/6/2017 dan Nomor: 1304/SK/PP.PERHEPI/VI/2017.

Analisis Kebijakan Pertanian terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala LIPI Nomor: 672/Akred/P2MI-LIPI/07/2015. Pada tahun 2018, AKP terakreditasi kembali berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Nomor Sertifikat 21/E/KPT/2018 Tanggal 9 Juli 2018. Reakreditasi kembali telah diajukan, dan berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 148/M/KPT/2020 AKP ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 2. Akreditasi berlaku selama lima tahun, yaitu Volume 17 Nomor 2 Tahun 2019 sampai Volume 22 Nomor 1 Tahun 2024.

Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian terbit dalam bentuk tercetak dan daring (*online journal system-OJS*). Terbitan dalam bentuk OJS dapat diakses pada alamat: <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/>. Selama tahun 2020 telah diterbitkan AKP dalam bentuk cetak sebanyak dua nomor, yaitu AKP Volume 17 No. 2 dan AKP Volume 18 No. 1, sedangkan terbitan secara OJS terjadwal untuk AKP Volume 18 No. 1 dan Nomor 2. Berikut disajikan AKP yang diterbitkan dalam bentuk tercetak selama tahun 2020 (Tabel 23, Tabel 24, dan Tabel 25).



Gambar 5. Sertifikat akreditasi dan Jurnal AKP yang terbit tahun 2020

Tabel 23. Judul dan penulis artikel pada Analisis Kebijakan Pertanian Volume 17 Nomor 2, Desember 2019

No.	Judul	Penulis
1.	Riset Pasar Biodiesel B20 di Indonesia: Evaluasi terhadap Produk dan Kesadaran Konsumen	Sachnaz Desta Oktarina, Ratnawati Nurkhoiry, M. Ansori Nasution, Suroso Rahutomo
2.	The Dynamics of Indonesian Consumption Patterns of Rice and Rice-Based Food Eaten Away From Home	Handewi Purwati Saliem, Hermanto, Erma Suryani, Rita Nur Suhaeti, Mewa Ariani
3.	Konsumsi Buah dan Sayur Siswa Sekolah Dasar Penerima Program Gizi Anak Sekolah di Cianjur	Tiurma Sinaga, Anna Vipta Resti Mauludyani, Haiva Nopiany, Marestry Nuzul Annur
4.	Dampak dan Keberlanjutan Program Cetak Sawah di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Lalu Ardhian Mustapa, Yeti Lis Purnamadewi, Arya Hadi Dharmawan
5.	Efisiensi Teknis Usaha Tani Padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Fitri Kartiasih, Adi Setiawan

Tabel 24. Judul dan penulis artikel pada Analisis Kebijakan Pertanian Volume 18 Nomor 1, Juni 2020

No.	Judul	Penulis
1.	Penilaian Kerugian Ekonomi Usaha Tani Padi Sawah dan Status Keberlanjutan Pengelolaan Saluran Irigasi Sekunder Vanderwijck di Yogyakarta	Miftahul Azis, Aceng Hidayat, Ahyar Ismail
2.	Model Reduksi Risiko Kountur berdasarkan Perilaku Petani Jagung di Pulau Madura	Elys Fauziyah
3.	Pengembangan Rantai Pasok Daging Ayam secara Terpadu di Jawa Barat dan Jawa Timur	Saptana, Nyak Ilham
4.	Strategi Komunikasi dalam Tata Kelola Pengembangan Kelapa Sawit di Indonesia	Heldi Yunan Ardian, Delima Hasri Azahari
5.	Dampak Program Raskin terhadap Konsumsi Gizi Rumah Tangga di Pulau Jawa	Eka Rastiyanto Amrullah, Kardiyono, Ismatul Hidayah, Aris Rusyiana

Tabel 25. Analisis Kebijakan Pertanian Volume 18 Nomor 2, Desember 2020

No.	Judul	Penulis
1.	Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani di Kabupaten Lebak, Banten	Ika Setiasih, Suharno, Achmad Suryana
2.	Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur	Sumarsono, Minto, Sulung Rachmawan Wira Ghani, Totok Yulianto
3.	Dinamika dan Struktur Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan di Berbagai Agroekosistem di Indonesia	Sri Hery Susilowati, Erma Suryani, Iwan Setiajie Anugrah, Fajri Shoutun Nida, Achmad Suryana
4.	Partisipasi Tenaga Kerja Pemuda di Sektor Pertanian di Sulawesi Tengah	Eka Nurdianto, Sukamdi, Abdur Rofi
5.	Keberlanjutan Kebun Kelapa Dalam (<i>Cocos Nucifera</i>) Blok Penghasil Tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	Asnelly Ridha Daulay, Araz Meilin

4. Agro Socio-economic Newsletter

PSEKP juga memiliki terbitan berkala berupa *Agro Socio-economic Newsletter* yang merupakan media berbahasa Inggris, diterbitkan dalam upaya memperluas pembaca, baik untuk berbagai mitra dan lembaga riset serta lembaga pemerintahan di dalam negeri dan di luar negeri. *Agro Socio-economic Newsletter* terbit tiga kali dalam setahun, berisi temuan-temuan penelitian PSEKP yang menarik (*research finding*), tinjauan terhadap kebijakan pemerintah yang terbaru tentang pembangunan pertanian (*recent policy development*), kegiatan penelitian PSEKP (*research activities*), publikasi terbaru PSEKP (*publication*), berita kegiatan PSEKP pada forum nasional maupun internasional (*ICASEPS news*).

Selama tahun 2020 terjadwal untuk diterbitkan *Agro Socio-economic Newsletter* Volume 13 Nomor 1 April 2020, Volume 13 Nomor 2 Agustus 2020, dan Volume 13 Nomor 3 Desember 2020. Namun penyusunan *Agro Socio-economic Newsletter* Volume 13 Nomor 3 yang dilakukan bulan Desember, akan dicetak pada tahun anggaran berikutnya, sehingga selama tahun 2020 dicetak *Agro Socio-economic Newsletter* Volume 12 Nomor 3 Desember 2019, Volume 13 Nomor 1 April 2020, dan Volume 13 Nomor 2 Agustus 2020 (Gambar 6).

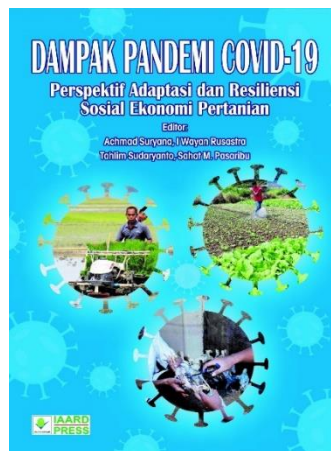
5. Buku Tematik

Judul buku tematik yang diluncurkan PSEKP pada 17 Desember 2020 berjudul: Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian. Penyusunan buku ini relatif cepat, dimulai sejak bulan Juli 2020. Buku ini memuat 44 artikel yang ditulis oleh Peneliti/Analisis Kebijakan/Pustakawan PSEKP, Peneliti lingkup Balitbangtan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan

Ketahanan Pangan. Tim penulis artikel sejak awal dipadukan antara peneliti senior dan junior, agar ada proses pembimbingan Peneliti senior ke junior. Dalam prosesnya, setiap artikel dilakukan dua kali review oleh para pakar yang kompeten di bidangnya. Tim Reviewer terdiri dari delapan orang dan ada empat orang Tim Editor. Buku setebal kurang lebih 1000 halaman memuat enam bab: (1) Prolog; (2) Ekonomi makro dan perdagangan, (3) Manajemen Agribisnis Pangan, (4) Kelembagaan Pertanian dan Pangan, dan (5) Resilensi dan adaptasi, dan (6) Epilog.



Gambar 6. Terbitan Newsletter PSEKP TA 2020



Gambar 7. Buku Bunga Rampai “Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian” PSEKP TA 2020

6. Leaflet

Sesuai target dalam tahun 2020 telah diterbitkan empat leaflet. Dua leaflet yang dibuat adalah mengenai media diseminasi PSEKP, satu di antaranya tentang media diseminasi secara umum dan satu lagi khusus yang terkait dengan adanya pandemi

Covid-19. Satu leaflet menyajikan tentang Perpustakaan khusus yang dikelola PSEKP, dan satu sisanya mengenai Program *Food Estate* Lahan Rawa yang melibatkan peneliti PSEKP di dalamnya (Tabel 26).

Tabel 26. Daftar judul leaflet, 2020

No.	Judul
1.	Mewujudkan Lumbung Pangan dari Program Food Estate Lahan Rawa di Kalimantan Tengah
2.	Media Diseminasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
3.	Perpustakaan PSEKP
4.	Jendela Covid-19 PSEKP

7. Website dan Media Sosial

Website

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) juga menggunakan media daring sebagai media diseminasinya, yang dapat diakses pada alamat <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/>. Website PSEKP memiliki menu home, profil, layanan publik, informasi publik, galeri, Covid-19 (Tabel 27).

Website menampilkan berbagai kegiatan dan informasi seputar PSEKP. Unggahan untuk website tidak terjadwal, untuk fitur tertentu pembaruan isi dilakukan setiap tahun, dan ada juga unggahan yang dilakukan jika ada kegiatan tertentu.

Tabel 27. Isi website PSEKP, 2020

Menu	Submenu	Subsubmenu
Home		
Profil	Sejarah	
	Visi & Misi	
	Tupoksi	
	Struktur organisasi	
	SDM	Pejabat struktural
		Pejabat fungsional
	Fasilitas pendukung	
	Perpustakaan	
	Agenda kegiatan	
Layanan publik	Publikasi	Analisis kebijakan
		Laporan hasil penelitian

Tabel 27. Isi website PSEKP, 2020 (lanjutan)

Menu	Submenu	Subsubmenu
		Policy brief
		Opini peneliti
		Jurnal Agro Ekonomi
		Forum Penelitian Agro Petani
		Analisis Kebijakan Pertanian
		Newsletter
		Buku tematik
		Prosiding
		Monograph
		Working paper
		Booklet & leaflet
	Magang/praktik kerja lapang	
	Patanas	Layanan data
		Dinamika indikator perdesaan
Informasi publik	Laporan PPID	
	Renstra	
	Laporan kinerja	
	DIPA	
	RKA KAL	
	Daftar asset	
	Penetapan kinerja	
	Laporan tahunan	
	Indeks kepuasan masyarakat	
	Matriks arsip surat	
	SOP	
Galeri		
Covid-19	Regulasi dan Program	
	Berita	
	Opini	
	Policy brief	

Fitur Jendela Covid-19

Mendukung upaya penanganan masalah yang diakibatkan pandemi Covid-19, PSEKP berinisiatif mendiseminasikan informasi yang berkaitan dengan Covid-19

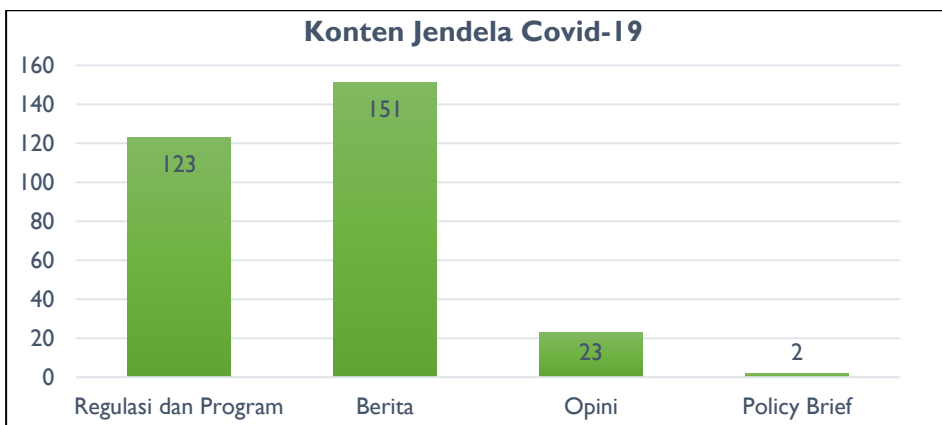
melalui fitur pada website PSEKP yang disebut Jendela Covid-19 (JC-19) yang dapat diakses pada alamat: <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/covid-19>. Fitur Jendela Covid-19 (JC-19) ini merupakan salah satu menu website PSEKP, mulai diunggah sejak bulan Juli 2020.

Informasi dan pengetahuan yang disampaikan melalui Jendela Covid-19 ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sekaligus menjadi bagian dari edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang Covid-19 serta pengaruhnya terhadap pembangunan sektor pertanian pada masa depan. Empat topik konten fitur ini adalah Regulasi dan Program, Berita, Opini, dan Policy Brief. Regulasi dan Program: (1) Fitur “Regulasi dan Program” berisi beragam regulasi, pedoman teknis, dan petunjuk operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait Covid-19. Fitur ini juga dilengkapi beragam informasi mengenai berbagai program yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam menangani dan menghadapi pandemi Covid-19, (2) Berita. Fitur “Berita” berisi beragam informasi atas berbagai kegiatan dan kejadian pada masa Pandemi Covid-19 di sektor pertanian, yang dikemas dalam suatu berita, (3) Opini. Fitur “Opini” berisi beragam pemikiran disertai opini para penulis mengenai hal-hal yang dapat dilakukan dalam menghadapi Pandemi Covid-19, khususnya di sektor pertanian, dan (4) Policy Brief. Fitur “Policy Brief” berisi informasi rekomendasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 di sektor pertanian, yang dikemas dalam suatu berita.

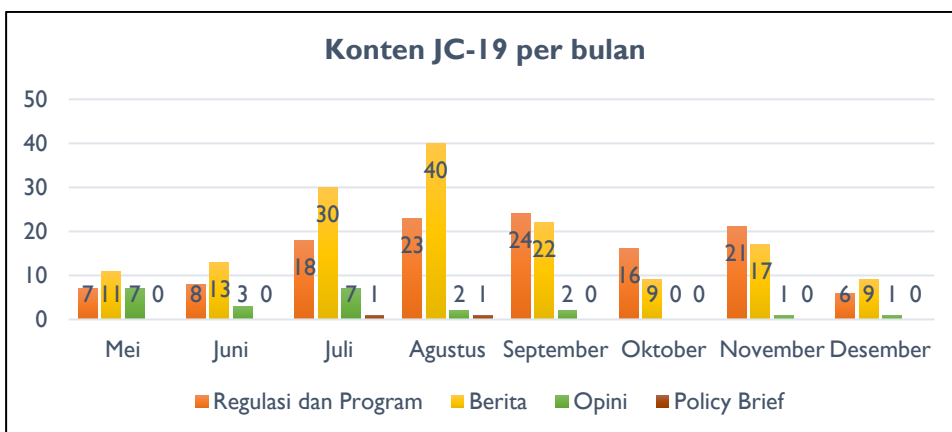
Selama tahun 2020, Jendela Covid-19 telah mengunggah 299 konten, yang berasal dari halaman Regulasi dan Program, Berita, Opini, dan Policy Brief. Konten tentang Berita Covid-19 merupakan yang terbanyak diunggah (151 konten atau sebesar 51%), disusul oleh konten tentang Regulasi dan Program (123 konten atau 41%), sedangkan bahwa halaman berita memiliki konten terbanyak selama tahun 2020, yaitu sebanyak dari Opini hanya memiliki 23 konten atau 8% dan halaman Policy Brief hanya sebanyak 2 konten atau 1% (Gambar 8).

Konten JC-19 pertama kali diunggah Mei 2020. Jumlah konten yang diunggah setiap bulan fluktuatif. Konten terbanyak terdapat pada Agustus 2020. Halaman Regulasi dan Program memiliki 23 konten, Berita memiliki 40 konten, Opini memiliki 2 konten, dan Policy Brief memiliki 1 konten (Gambar 9).

Gambar 9 menunjukkan pada bulan September 2020, terjadi penurunan jumlah konten pada website Jendela Covid-19, yaitu, halaman Regulasi dan Program memiliki 24 konten, Berita memiliki 44 konten, Opini memiliki 2 konten, dan Policy Brief tidak memiliki konten. Salah satu penyebab utama penurunan jumlah konten ini adalah kesibukan peneliti dan analisis kebijakan lingkup PSEKP dan pihak lainnya yang terlibat, dalam berbagai kegiatan yang harus segera diselesaikan pada menjelang akhir tahun anggaran. Kesibukan lain yang membuat sumber daya teralihkan adalah proses penyusunan Buku Bunga Rampai Covid-19 (BBRC).



Gambar 8. Sebaran isi konten website Jendela Covid-19, 2020



Gambar 9. Sebaran jumlah konten per bulan, 2020

Penurunan jumlah konten terus berlanjut hingga Bulan Oktober 2020. Halaman Regulasi dan Program memiliki 16 konten, Berita memiliki sembilan konten, sedangkan halaman Opini dan Policy Brief tidak memiliki konten sama sekali. Pada bulan ini proses pembuatan BBRC yang dilakukan dua kali revidi oleh para tim ahli (pakar) masih terus berlangsung.

Pada bulan November 2020, isi konten JC-19 sedikit mengalami peningkatan. Hal ini karena proses pembuatan BBRC sudah pada tahap akhir. Namun, kegiatan di lapangan mulai marak dilakukan, sehingga peningkatan jumlah konten pun tidak terlalu signifikan. Halaman Regulasi dan Program memiliki 21 konten, Berita memiliki 17 konten, Opini memiliki 1 konten, dan Policy Brief tidak memiliki konten.

Pada penghujung tahun, yaitu Desember 2020, jumlah konten website kembali mengalami penurunan. Halaman Regulasi dan Program memiliki 6 konten, Berita

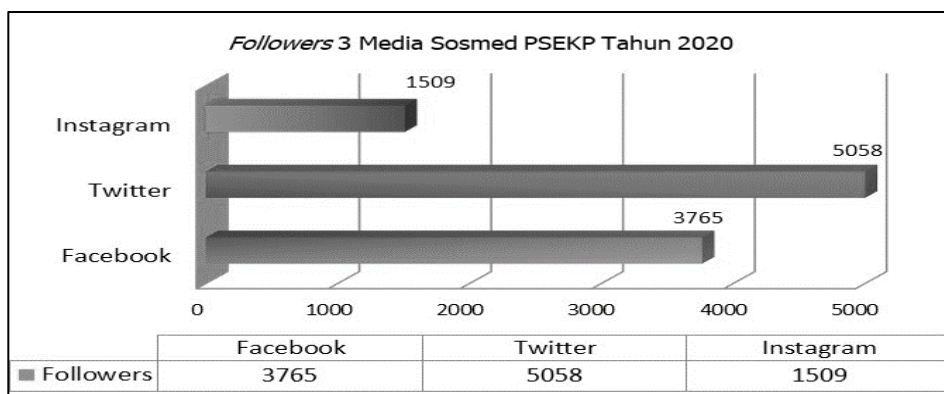
memiliki 9 konten, Opini memiliki 1 konten, dan Policy Brief tidak memiliki konten. Pada bulan ini pembuatan BBRC sudah selesai dan telah diluncurkan pada awal bulan Desember. Namun demikian, mengingat bahwa bulan ini merupakan akhir tahun anggaran, maka fokus kegiatan lebih ditujukan pada penyelesaian beberapa kegiatan sebelum tahun anggaran 2020 berakhir. Di sisi lain, berita maupun regulasi dan program yang terkait dengan Covid-19 juga sudah semakin jauh berkurang. Saat ini, masyarakat sudah mulai berangsur kembali menjalani kehidupan dengan tatanan hidup kenormalan baru.

Media Sosial

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian juga memiliki media sosial. Media sosial yang dikelola ditujukan sebagai sarana komunikasi terkait kebijakan, rencana kerja, serta capaian kinerja PSEKP khususnya dan Kementerian Pertanian pada umumnya kepada masyarakat luas. PSEKP memiliki empat buah akun media sosial, yaitu facebook, twitter, instagram dan Youtube akun tersebut memiliki nama akun, sebagai berikut:

1. Facebook : Psekp Kemtan
2. Twitter : @PSEKP_KEMENTAN
3. Instagram : @psekp_kemtan
4. Youtube : PSEKP Litbang

Keempat akun media sosial tersebut memiliki jumlah *followers* yang berbeda. Dikarenakan akun pada media sosial facebook masih menggunakan *personal account*, maka pada media sosial ini PSEKP tidak memiliki *followers*, tetapi hanya memiliki *friends* saja. Keragaan *followers* pada masing-masing media sosial disajikan pada Gambar 10.



Gambar 10. Keragaan *followers* pada masing-masing akun media sosial, 2020

Pada Gambar 10 dapat diketahui bahwa dari ketiga akun media sosial yang dimiliki PSEKP, twitter memiliki *followers* paling banyak, yaitu sebanyak 5058

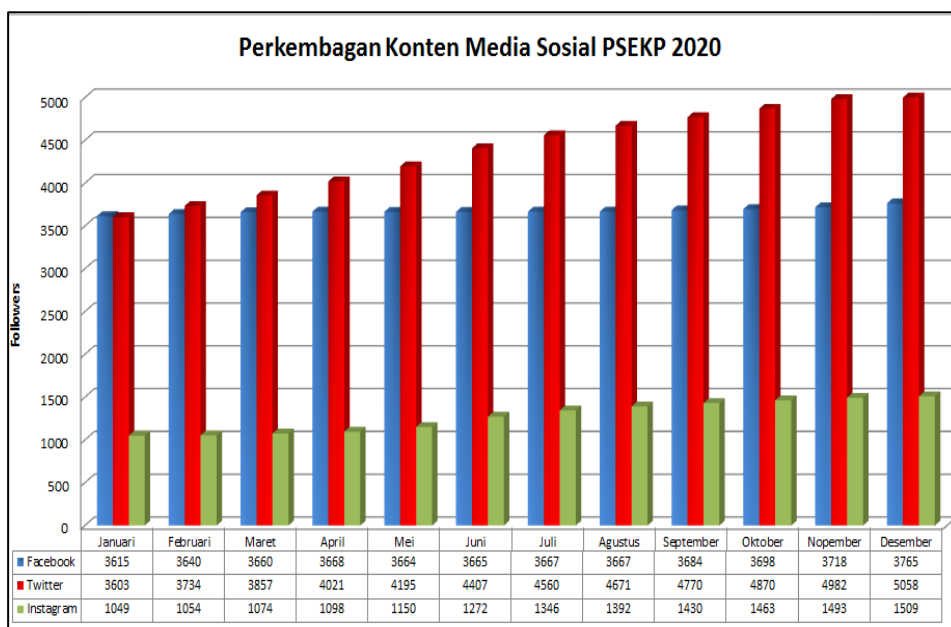
followers. *Followers* pada media sosial facebook sebanyak 3.765 *followers*. Sementara, *followers* pada media sosial instagram hanya sepertiganya saja dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu sebanyak 1.509 *followers*. Media sosial youtube relatif masih baru sehingga jumlah *subscribenya* tidak sebanyak tiga media sosial sebelumnya baru 24 *subscribers*.

Konten Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu sarana yang efektif dalam melakukan komunikasi, edukasi, promosi, bahkan diseminasi dari suatu hasil inovasi teknologi maupun kebijakan hingga regulasi yang akan disosialisasikan kepada masyarakat. Media sosial menjadi sarana yang efektif karena daya jangkauannya yang sangat luas, tidak terbatas ruang dan waktu.

Unggahan medsos PSEKP (facebook, instagram, dan twitter) dilakukan setiap hari, tak terkecuali hari libur. Unggahan medsos umumnya merupakan *reposting* berita dari Kementan, juga berita tentang kegiatan yang dilakukan oleh PSEKP sendiri.

Selama kurun tahun 2020, keempat media sosial PSEKP dapat dikatakan cukup aktif dalam mengunggah informasi, baik itu terkait dengan PSEKP maupun Kementerian Pertanian pada umumnya. Banyaknya konten yang di-*posting* pada masing-masing media sosial di tiap bulannya, disajikan pada Gambar 11.



Gambar 11. Jumlah konten masing-masing media sosial per bulan, 2020

Konten pada media sosial twitter lebih banyak dibandingkan dengan facebook maupun instagram (Gambar 11). Walaupun pada empat bulan pertama di awal tahun twitter PSEKP belum banyak memiliki konten, namun pada bulan Mei hingga Desember, twitter memiliki postingan paling banyak. Konten terbanyak kedua yang di-posting di akun media sosial adalah facebook. Juga terlihat bahwa konten facebook tidak terlalu fluktuatif, berbeda dengan akun twitter lebih terlihat fluktuasinya. Sementara pada media sosial instagram, jumlah konten yang diunggah paling sedikit dibandingkan dua media sosial sebelumnya.

Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan medsos dan solusinya

1. Media sosial PSEKP pada akun facebook dan instagram, masih menggunakan *personal account*. Sementara untuk sosialisasi kegiatan lembaga pemerintah, sebaiknya menggunakan *business account*. Penggunaan *business account* akan memudahkan para admin dan pengambil kebijakan untuk mengetahui kinerja dari masing-masing akun media sosial tersebut melalui data statistik yang tersedia di masing-masing media sosial. Disarankan pada pengelolaan media sosial di tahun mendatang, baik itu facebook maupun instagram sudah menggunakan *business account*.
2. Selama tahun 2020, konten-konten yang diunggah pada masing-masing akun media sosial lebih banyak merupakan *repost* dari akun Kementerian Pertanian, sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan kinerja dari PSEKP. Pengelolaan media sosial pada tahun mendatang akan diupayakan untuk lebih memperbanyak konten tentang kegiatan PSEKP.
3. Keberadaan media sosial youtube sebagai media diseminasi PSEKP relatif masih baru. Pemanfaatan media ini perlu dukungan SDM dan *hardware* yang lebih memadai, khususnya untuk membuat konten, berupa video maupun *podcast*.
4. Sarana dan prasarana operator (admin sosmed) perlu ditingkatkan untuk memudahkan dan meningkatkan mutu kinerja para admin.
5. Peningkatan kapasitas SDM para admin sosmed secara merata.

8. Webinar dan Focus Group Discussion

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan pertanian (PSEKP), Kementerian Pertanian, pada tanggal 1 Juli 2020 telah menyelenggarakan webinar bertema: **“Antisipasi Setelah Pandemi Covid-19: Bersama Membangun untuk Memantapkan Sistem Pangan dan Menyejahterakan Petani”**. Webinar dihadiri lebih dari 500 orang yang berasal dari berbagai lembaga, seperti akademisi, lembaga penelitian dari dalam dan luar Kementan, asosiasi, swasta, kementerian/lembaga luar Kementan.

Pengantar Webinar disampaikan oleh Kepala PSEKP, Dr. Sudi Mardianto, dilanjutkan arahan dan pembukaan oleh Sekjen Kementerian Pertanian, Dr.

Momon Rusmono. Webinar dipandu oleh Dr. Sahat Pasaribu (PSEKP), menampilkan tiga pembicara dan Pembahas dari lembaga yang berbeda. Pembicara dari Bapenas yaitu Ir. Anang N.S. Noegroho, MEM, Direktur Pangan dan Pertanian, menyampaikan makalah berjudul “Arah Pembangunan Pangan dan Pertanian Pasca-Pandemi”. Penyampaian materi kedua oleh Prof. Pantjar Simatupang (peneliti senior PSEKP), dengan judul “Pendekatan Baru Sistem Pangan Berkelanjutan Pasca-Covid-19”, Pemateri ketiga, Dr. Bayu Krisnamurthi (Dosen Departemen Agribisnis IPB/Ketua Asosiasi Agribisnis Indonesia/Ketua Penasehat Perhepi, Wamentan 2010-2011, Wamendag 2011-2014) menyampaikan paparan berjudul “Lansekap Ekonomi Pertanian Indonesia (2020–dan selanjutnya)”.

Webinar ini menghadirkan Pembahas utama yaitu Prof. Imam Mujahiddin, Staf Khusus Menteri Pertanian, dan Dr. Rusman Heriawan (Wamentan 2011-2014). Selain itu, mengundang pembahas tamu yaitu Prof. Erizal Jamal (Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian), Dr. Abdul basit (Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian), dan Dr. Handewi P. Saliem (PSEKP).

Berdasarkan hasil diskusi dalam webinar tersebut, disampaikan saran kebijakan operasional: “Bersama membangun untuk memantapkan sistem pangan dan menyejahterakan petani”. Butir-butir yang tercakup dalam saran sebagai berikut:

1. Memberdayakan dan menyiagakan petani mampu berproduksi pada masa Covid-19.
2. Memfasilitasi kelancaran distribusi dan rantai pasok pangan.
3. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
4. Memastikan produktivitas kerja petani tinggi dan harga produk petani stabil dan wajar.
5. Mengkapitalisasi “adaptasi kreatif sesaat” menjadi perilaku permanen untuk mendukung sistem pangan berkelanjutan: e-commerce, rantai pasok informal/komunitas, solidaritas sosial, pola makan baru.
6. Bersama membangun sistem pangan: partisipatif dan sinergis: pemerintah/pemda, swasta/BUMN, masyarakat/petani.

Saran kebijakan operasional untuk Kementan, Bappenas dan semua adalah: **pertama**, memberdayakan dan menyiagakan petani agar mampu berproduksi di masa Covid-19. Harus ada protokol, stimulus agar petani mampu berproduksi dengan baik-baik. **Kedua**, memfasilitasi kelancaran distribusi dan rantai pasok. Kerena tadi ada hambatan dari Covid ini sehingga bagaimana upaya menjaganya. **Ketiga**, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ada banyak upaya dengan bagaimana mengembangkan cadangan pangan, lumbung pangan masyarakat, itu juga termasuk dalam konteks menjaga stabilitas dan harga pangan. Tetapi memang cadangan pangan pemerintah menjadi hal yang penting dikembangkan di point

ketiga ini. **Keempat**, memastikan produktivitas kerja tinggi dan harga produk petani stabil dan wajar, dapat dilakukan melalui teknologi, *frontier*, *smart farming*, korporasi petani, kawasan pertanian. Pendekatan-pendekatan itu di *down to earth* kan sehingga bisa meningkatkan produktivitas kerja petani dan bisa juga menjaga harga produk pertanian secara baik. **Kelima**, mengkapitalisasi adaptasi kreatif sesaat menjadi perilaku permanen untuk mendukung sistem pangan berkelanjutan: e-commerce membantu kebuntuan rantai pasok itu dapat dikapitalisasikan, rantai pasok informal/komunitas itu juga bagaimana mengkapitalisasinya dalam membangun sistem pangan pada level komunitas masyarakat, solidaritas sosial, dan juga pola makan baru karena menggunakan pendekatan *demand driven* lantas itu akan men-*detect* produk pangan apa yang perlu dikembangkan. **Keenam**, membangun infrastruktur digital pertanian. Tidak bisa lagi dengan yang biasa-biasa, tidak hanya menyiapkan perangkat kerasnya menyiapkan internetnya tetapi juga SDM dan sebagainya. **Ketujuh**, bersama membangun sistem pangan partisipatif dan sinergis. Pemerintah dengan Pemda, swasta dan BUMN, masyarakat dan juga para petani. **Kedelapan**, setelah disepakati pendekatannya ke sistem pangan, lantas bagaimana mengkoordinasinya, mengoperasionalisasinya, mengeksekusinya di level pemerintahan nampaknya Badan Pangan Nasional merupakan sesuatu yang sangat penting untuk hadir didalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini karena apabila tidak lantas konsep sistem pangan yang dipikirkan itu tentu akan susah diimplementasikan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Focus Group Discussion (FGD) dan workshop telah beberapa kali diselenggarakan selama tahun 2020. Tujuannya adalah membahas topik tertentu, mencari masukan, merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dibahas, juga untuk merumuskan usulan kebijakan untuk disampaikan pada pihak berwenang/pengambil keputusan di tingkat atas (Tabel 28).

Tabel 28. Topik kegiatan FGD/workshop yang diselenggarakan Subbid PH, 2020

No.	Topik kegiatan FGD/workshop	Volume kegiatan
1.	FGD Menjaga Stabilitas Harga Pangan Strategis.	1 kali
2.	Pembahasan “Kebijakan Subsidi Pupuk dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas dan Ketepatan Sasaran Subsidi” (Menindaklanjuti arahan Mentan).	1 kali
3.	Melaksanakan Workshop Copy Editor	1 kali
4.	FGD Kebijakan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	1 kali
5.	Workshop Penandatanganan Kerja Sama PSEKP dan STIS-BPS	1 kali
6.	FGD Pengelolaan Jurnal Ilmiah Terindeks Scopus	1 kali
7.	FGD Pengelolaan Jurnal Ilmiah Penerapan Aplikasi dalam Penyuntingan	1 kali

Tabel 28. Topik kegiatan FGD/workshop yang diselenggarakan Subbid PH, 2020 (lanjutan)

No.	Topik kegiatan FGD/workshop	Volume kegiatan
8.	FGD Kondisi Pertanian pada Masa Covid-19	1 kali
9.	Webinar “Antisipasi Setelah Pandemi Covid-19: Bersama Membangun untuk Memantapkan Sistem Pangan dan Menyejahterakan Petani”	1 kali
10.	FGD Penyusunan Buku Bunga Rampai Covid-19 (BBRC)	2 putaran, @ 8 sesi
11.	Peluncuran Buku Bunga Rampai Covid-19 dengan tema “Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian”	1 kali
12.	Melaksanakan kegiatan FGD Pembahasan Artikel JAE, FAE, dan AKP	3 kali
13.	FGD Strategi Membangun Usaha Pertanian di Tengah Pandemi Covid-19	1 kali

6.1.2. Distribusi Publikasi

Terbitan dalam bentuk tercetak dibagikan kepada berbagai pihak, baik dengan cara dikirim atau diberikan langsung. Pengiriman dilakukan dua kali setahun, umumnya kepada instansi atau lembaga dan perorangan (penulis, Mitra Bestari), sedangkan untuk Dewan Redaksi yang peneliti PSEKP buku/jurnal disampaikan secara langsung. Buku/jurnal/terbitan lainnya juga dibagikan kepada khalayak dalam kegiatan pameran atau kegiatan temu ilmiah lainnya.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jika biasanya PSEKP mencetak jurnal sebanyak 500 eksemplar setiap nomor terbitan, maka untuk tahun 2020 hanya mencetak sebanyak 150 eksemplar per nomor terbitan. Dengan demikian pihak yang menjadi tujuan pengiriman jurnal terbitan tahun 2020 juga dikurangi.

Jurnal dan terbitan lainnya yang didistribusikan pada tahun 2020, mencakup juga terbitan tahun 2019 akhir. Penerima jurnal dan buku juga berkurang. Penerima publikasi PSEKP yaitu (1) Perpustakaan lingkup Kementan, (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi, (3) Perpustakaan Pemerintah Daerah, (4) Pejabat lingkup Kementan, (5) Pejabat di luar Kementan, (6) lainnya (penulis, Tim Editor, Mitra Bestari, pameran, dan lain-lain).

6.1.3. Perpustakaan

Perpustakaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan salah satu bentuk unit pelaksana dari Subbidang Pendayagunaan Hasil PSEKP. Di dalam tugas dan fungsinya Perpustakaan PSEKP termasuk perpustakaan khusus yang melayani kebutuhan para peneliti, baik peneliti dari dalam maupun

dari luar PSEKP, yang memerlukan berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian di bidang sosial ekonomi pertanian. Bahan-bahan pustaka yang dikoleksi berupa bahan tercetak, pangkalan data (*database*), dan internet

Bahan Pustaka memegang peranan penting dalam kegiatan penelitian. Oleh sebab itu sebagai unit pelaksana penyedia informasi Perpustakaan PSEKP berusaha mengembangkan diri dalam penyediaan informasi, sesuai kebutuhan pemustaka yang makin dinamis khususnya yang berupa bahan pustaka digital. Sepanjang tahun 2019 Perpustakaan PSEKP berusaha mengembangkan diri dengan melakukan berbagai kegiatan yang sesuai dengan Tupoksi. Kegiatan tersebut terutama bertujuan untuk meningkatkan mutu pengembangan dan layanan perpustakaan.

Tujuan utama dari pengelolaan perpustakaan adalah meningkatkan mutu layanan, baik bagi pemustaka di dalam (internal) maupun di luar (eksternal) unit kerja PSEKP. Untuk mencapai tujuan utama tersebut dilaksanakan lima sasaran program, yaitu (1) pengadaan bahan pustaka, (2) pengolahan bahan pustaka, (3) pelayanan perpustakaan, (4) perpustakaan digital, dan (5) administrasi; yang dibuat dalam bentuk Laporan Kegiatan Perpustakaan PSEKP Tahun 2020.

Pengadaan Bahan Pustaka

Pengadaan bahan pustaka dengan cara pembelian pada tahun 2020 dapat terealisasi 137 eks buku (101 judul) dengan menyerap 99,71% dari besarnya anggaran pengadaan bahan pustaka tahun 2020 sebesar Rp29.000.000,- setelah mengalami revisi anggaran. Dalam melengkapi bahan pustaka juga pengadaan lewat hadiah atau hibah dan tukar menukar masih berjalan seperti tahun sebelumnya.

Jenis bahan pustaka yang diadakan adalah buku dan jurnal terbitan dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, perpustakaan mengumpulkan karya tulis ilmiah para peneliti dan akademisi yang tidak atau belum diterbitkan seperti makalah seminar hasil penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Perpustakaan PSEKP juga menerima hadiah berupa buku, jurnal, dan majalah dari berbagai instansi pemerintah dan swasta dan juga hibah dari perorangan serta tukar menukar.

Pengolahan Bahan Pustaka

Perpustakaan PSEKP tergolong dalam jenis perpustakaan khusus, dan sudah mengembangkan koleksinya selaras dengan fungsinya sebagai Perpustakaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Oleh karena itu, koleksi yang dimilikinya harus menunjang program penelitian serta relevan dengan berbagai bidang yang sesuai dengan misi PSEKP. Koleksi Perpustakaan PSEKP diutamakan pada beberapa jenis bahan pustaka berupa referensi, buku teks, majalah, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan sejenisnya yang berkaitan dengan bidang sosial ekonomi, baik dalam bentuk tercetak maupun media rekam lainnya. Koleksi bahan pustaka di Perpustakaan PSEKP pada tahun 2020 tersaji pada Tabel 29 berikut.

Tabel 29. Koleksi bahan pustaka di Perpustakaan PSEKP, 2020

No.	Koleksi	2019	2020
1.	Buku*	9.739	10.080
2.	Buku tentang teknologi pertanian**	398	443
3.	IPTAN	8.135	8.135
4.	Majalah	727	772
5.	Majalah pertanian**	77	110
6.	Seminar	1.134	1.134

Keterangan: *) Laporan Hasil Penelitian terhitung dalam database buku

**) Sudah terhitung dalam Buku/Majalah di atasnya

Penelusuran melalui serverlib Perpustakaan PSEKP tahun 2020 lebih berkembang sesuai target penambahan file-file PDF sehubungan dengan telah dilengkapinya kegiatan berupa: (a) Penelusuran database katalog on-line, (b) Laporan Hasil Penelitian dalam bentuk PDF File, (c) Kliping Berita Pertanian dalam bentuk Digital yang terbitan setiap harinya, (d) Berbagai koleksi ebook, dan (e) Publikasi Statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik yang disajikan dalam bentuk File PDF untuk terbitan setiap terbitannya. Penelusuran tersebut sudah bisa diakses dari Gedung A dan B kantor PSEKP Cimanggu.

Koleksi perpustakaan digital juga dilayankan kepada pemustaka merupakan hasil pengolahan yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan digital agar koleksi perpustakaan bisa ditemukan kembali dengan cepat dan tepat, sehingga kegiatan pustakawan pun lebih banyak melakukan penelusuran internet dan menyimpannya dalam bentuk file di komputer masing-masing. Oleh karena itu, pada tahun-tahun yang akan datang disarankan agar pengalihan buku cetak koleksi perpustakaan menjadi buku elektronik segera terwujud agar koleksi perpustakaan tidak hanya dimanfaatkan oleh peneliti PSEKP saja tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh kalangan dengan jangkauan yang lebih luas. Untuk mewujudkan hal tersebut memang dibutuhkan anggaran yang jauh lebih besar dari anggaran yang ada saat ini. Sementara pada saat ini, fasilitas dan anggaran yang dimiliki perpustakaan untuk mengalihkan koleksi buku cetak menjadi buku elektronik belum memadai.

Pelayanan Perpustakaan

Perpustakaan memberikan kesempatan kepada pemustaka untuk memanfaatkan jasa penelusuran bahan pustaka, baik dengan cara datang langsung ataupun melalui internet. Penelusuran langsung dapat menggunakan fasilitas OPAC (*On-line Public Acces Catalog*) atau fasilitas penelusuran internet di website. Hasil penelusuran dapat berupa judul literatur atau data yang lain. Literatur yang dimaksud diambil di rak buku untuk dibaca di perpustakaan atau difotocopi. Selain itu, perpustakaan juga melayani permintaan melalui e-mail dan SMS. Dengan fasilitas ini pemustaka

mendapat layanan tanpa harus datang ke perpustakaan, sedangkan bahan pustaka yang diperlukan dapat dikirim dalam bentuk fotocopy atau file.

Pemustaka yang datang langsung ke Perpustakaan pada tahun 2020 sebanyak 45 orang, sedangkan yang melakukan layanan permintaan data langsung melalui e-mail sebanyak 29 orang. Pemustaka PSEKP selain peneliti, mahasiswa, petugas dari instansi pemerintah, pegawai swasta, pelajar dan pemustaka.

Perkembangan Perpustakaan Digital

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perpustakaan PSEKP bekerja sama dengan seluruh Perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian dengan mengembangkan perpustakaan digital. Melalui jaringan internet di Gedung A dan B PSEKP, pemustaka dapat mengakses alamat server Perpustakaan PSEKP, yaitu <http://serverlib/psekp/> pada alamat tersebut dapat diakses link untuk pengolahan data katalog perpustakaan PSEKP dan statistik BPS yang sudah diolah oleh Pusdatin Kementan dalam bentuk Basis Data Statistik Pertanian, SIM Pangan Strategis dan SIM Harga Komoditas Pertanian.

Perpustakaan digital PSEKP pada tahun 2020 berhasil membuat penelusuran digital/ebook khususnya untuk terbitan PSEKP dan luar PSEKP, dalam bentuk arsip PDF sebanyak 26.441 file, yang dapat diakses dengan beberapa alamat link yang sudah tersedia di antaranya menu Laporan Hasil Penelitian PSEKP, Patanas, Ejournal PSEKP, Kliping Koran Digital, koleksi ebook, Naskah Orasi Profesor Riset PSEKP, dan menu penelusuran buku-buku series terbitan BPS. Pada alamat tersebut di atas juga dapat diakses Laporan Hasil Penelitian PSEKP dari tahun 2000-2020 sebanyak 260 judul penelitian dalam bentuk file PDF, Laporan Hasil Penelitian Patanas Tahun 2003-2020 sebanyak 17 judul, dan kliping digital dalam bentuk Opini Sepekan sebanyak 1054 terbitan yang terbit tiap harinya dari tahun 2016-2020.

Perpustakaan Digital PSEKP juga dapat diakses secara off-line jurnal terbitan PSEKP: Jurnal Agro Ekonomi, Forum Penelitian Agro Ekonomi, dan Analisis Kebijakan Pertanian dengan alamat di <http://serverlib/ejurnal/>. Jumlah artikel yang sudah diupload sebanyak 958 judul dari pertama kali terbit.

Perpustakaan digital untuk koleksi terbitan luar PSEKP khususnya terbitan BPS telah diupload sebanyak 1373 judul dalam bentuk PDF. Penelusuran Pemustaka PSEKP dilengkapi juga buku elektronik publikasi statistik merupakan seri publikasi buku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan melalui statistik survei di Indonesia dalam bentuk full PDF series, di antaranya:

- Buku Statistik Indonesia Tahun 1994–2020 dapat diakses di alamat: <http://serverlib/bps/>
- Buku Statistik Harga Produsen dan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi untuk Tahun 2011–2020 dapat diakses di alamat: <http://serverlib/bps2/>

- Buku Statistik Harga Konsumen dan Indikator Ekonomi untuk Tahun 2011–2020 dapat diakses di alamat: <http://serverlib/bps2/>
- Buku Struktur Ongkos di Indonesia untuk Tahun 2006–2019 dapat diakses di alamat: <http://serverlib/bps3/>
- Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2003–2019 dapat diakses di alamat: <http://serverlib/bps4/>
- Buku Statistik Nilai Tukar Petani di Indonesia Tahun 2002–2020 dapat diakses di alamat: <http://serverlib/bps5/>
- Buku Statistik Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia untuk Tahun 2007–2019 dapat diakses di alamat: <http://serverlib/bps6/>
- Buku Statistik Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2005–2019 dapat diakses di alamat <http://serverlib/bps7/>
- Buku Statistik Keadaan Pekerja di Indonesia Tahun 2007–2020 dapat diakses di alamat <http://serverlib/bps8/>
- Buku Statistik Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2011–2020 dapat diakses di alamat <http://serverlib/bps9/>
- Buku Statistik Industri Manufaktur Indonesia Tahun 2009–2020 dapat diakses di alamat <http://serverlib/bps10/>
- Buku Statistik Buletin Perdagangan Luar Negeri terdiri dari Ekspor dan Impor Barang-Barang Tahun 2006-2020 diakses di alamat <http://serverlib/bps11/>

Selain OJS alamat i-Tani PSEKP juga dapat diakses melalui alamat serverlib/psekp/. i-Tani merupakan kumpulan publikasi lingkup kementerian pertanian dalam bentuk format digital (ebook/PDF file). Pada menu penelusuran ebook terdapat banyak koleksi e-book, dan ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak, koleksi ebook sampai dengan sekarang terdapat 558 judul. Semoga ebook yang disajikan dapat bermanfaat bagi pemustaka perpustakaan PSEKP. Adapun menu ebook PSEKP yang dapat diakses, adalah sebagai berikut:

1. Ebook PSEKP tahun 2004–2019;
2. Ebook Terbitan Internasional;
3. Ebook Satu Data, BPS (terbitan terbaru BPS);
4. Ebook Infografis BPS Tahunan;
5. Statistik Pertanian, Kementerian Pertanian, tahun 2012–2019;
6. Statistik Harga Komoditas Pertanian, Kementerian Pertanian, tahun 2011–2019;
7. Statistik Produksi Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, tahun 2008–2015;

8. Statistik Dirjen Hortikultura;
9. Statistik Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian, tahun 2008–2018;
10. Statistik Dirjen Perkebunan;
11. Statistik Ditjen PSP (Prasarana dan Sarana Pertanian), tahun 2011–2015;
12. Statistik Makro Sektor Pertanian, Kementerian Pertanian, tahun 2015–2018;
13. Statistik Ditjen PKH (Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan), tahun 2010–2019;
14. Ebook Pengetahuan Islam (232 judul).

Kegiatan Administrasi dan Penataan Perpustakaan 2020

Kegiatan administrasi perpustakaan yang dilakukan pada tahun 2020 mencakup:

- a. Dalam kegiatan administrasi surat menyurat terdapat 21 buah surat masuk dan 24 buah surat keluar;
- b. Membuat Leaflet dan Panduan Perpustakaan Digital 2020;
- c. Menginventarisasi buku dibeli dan yang dipinjam;
- d. Melaksanakan rapat koordinasi kegiatan perpustakaan.

Pada tahun 2020 telah dilakukan penataan perpustakaan untuk ruang baca dan ruang kerja pengelola perpustakaan. Sehingga saat ini perpustakaan mempunyai ruang koleksi dan ruang baca yg cukup nyaman dan luas. Diruang koleksi juga sudah dilengkapi dengan alat untuk scan-foto yang bisa dimanfaatkan oleh Pemustaka.

6.2. Kerja Sama Penelitian

Kegiatan kerja sama yang dilakukan PSEKP pada TA 2020 melanjutkan kegiatan kerja sama penelitian dengan *The Australian Centre for International Agriculture Research* (ACIAR) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI), yang terdiri dari lima kegiatan hibah. Adapun rincian dari kegiatan kerja sama dengan lembaga luar negeri dimaksud di atas dapat dilihat pada Tabel 30 dan uraian lebih lanjut dari setiap kegiatan kerja sama dapat dilihat berikut ini.

a. *Improving Milk Supply Competitiveness and Livelihoods in Smallholder Dairy Chains in Indonesia (IndoDairy)*

Kegiatan penelitian ini merupakan kerja sama antara Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan *Australian Centre for International Agricultural Research* (ACIAR). Unit kerja Badan Litbang Kementerian Pertanian yang terlibat dalam kegiatan ini adalah PSEKP dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak). Periode pelaksanaan kegiatan mulai tahun 2016 hingga 2019. Dalam kegiatan penelitian ini terbagi dalam tiga

komponen. Komponen pertama terkait aspek penyusunan reviu kebijakan persusuan dan rantai pasok yang akan dilakukan oleh IPB, komponen kedua terkait kegiatan pengumpulan data primer (*baseline survey*) di Provinsi Jawa Barat yang menjadi tanggung jawab PSEKP, dan komponen ketiga terkait pelatihan teknologi kepada peternak susu sapi perah akan dilaksanakan oleh Puslitbangnak.

Tujuan umum penelitian ini adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas susu sapi perah di Indonesia. Khusus komponen kedua yang menjadi tanggung jawab PSEKP, kegiatan ini mempunyai dua kegiatan utama, yaitu: (1) melakukan reviu dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait kebijakan persusuan di Indonesia, dan (2) melakukan survei rumah tangga peternak sapi perah di Provinsi Jawa Barat.

Tim Peneliti PSEKP telah menyelesaikan kegiatan *baseline survey* di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017. Lokasi *baseline survey* mencakup Kabupaten Bandung Barat, Garut, Cianjur, dan Bogor. Jumlah responden seluruhnya sebanyak 600 rumah tangga. Data primer yang dikumpulkan pada tahun 2017, selanjutnya diolah dan dianalisis pada tahun 2018. Data hasil *baseline survey* lebih lanjut digunakan sebagai bahan untuk *IndoDairy policy workshop* yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2018 di Bogor.

Pada tahun 2019 dilaksanakan juga resurvei lokasi penelitian sebelumnya, yaitu di KBPS Pengalengan dari tanggal 13–16 Juni 2019 untuk melihat dinamika dan updating hasil analisis tahun sebelumnya dan juga data struk pembayaran susu segar ke peternak periode Januari 2016–Mei 2019 serta perkembangan manajemen kandang dan pengelolaan MCP/MCP-M. Lalu untuk wilayah KPGS Cikajang Garut survei yang sama dilakukan pada tanggal 26–29 September 2019. Tim penelitian PSEKP bersama tim pelaksana lain baik dari Litbang Kementan dan IPB bersama dengan *expert* dari ACIAR melaksanakan Annual Meeting Tahun ke-3 pada tanggal 28 Oktober 2019 di IICC IPB Bogor untuk mengkoordinasikan progress kegiatan seluruh tim dan penetapan rencana kegiatan akhir masing-masing tim. Di tahun akhir kegiatan kerja sama ini juga dilaksanakan analisis data terakhir sebagai bahan untuk penyusunan laporan akhir kegiatan kerja sama ini.

Di tahun 2020, hibah ini melanjutkan fokus pada penyiapan laporan akhir penelitian (Annual Report 2020), yang terdiri dari berbagai kegiatan dan pertemuan serta rapat mulai dari finalisasi dan publikasi artikel hasil penelitian, finalisasi Laporan Survey, dan pelatihan terkait Comcare and AgrilImpact.

Sebagai dampak pandemi global Covid19, tim *expert* dari University of Adelaide diputuskan untuk tidak mengunjungi Indonesia sesuai kebijakan pembatasan perjalanan antarnegara selama 2020, padahal tim ini seharusnya melaksanakan *endline survey* atau survei akhir untuk memperkirakan dampak dari kegiatan hibah ini bagi petani susu sapi perah. Berdasarkan komunikasi antara ACIAR dengan University of Adelaide serta PSEKP maka diputuskan kegiatan *endline survey* termasuk anggaran yang ada di University of Adelaide dialihkan (*commissioned*) ke

PSEKP. Sehingga hibah IndoDairy ini mengalami dua kali amandemen yaitu amandemen pertama adalah perpanjangan masa kontrak ke 31 Desember 2020 dari 31 Juli 2020. Amandemen kedua adalah pengalihan implementasi *endline survey* ke tim peneliti PSEKP termasuk anggaran yang akan ditanggung oleh University Adelaide dan masa kontrak diperpanjang menjadi 30 Juni 2021.

b. *Agricultural Policy Research to Support Natural Resource Management in Indonesia's Upland Landscapes (IndoGreen)*

Kegiatan penelitian ini merupakan kerja sama antara PSEKP, Puslitbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Internasional Center for Agro-Forestry* (ICRAF), dan *University of Adelaide dan University of New England*, Australia. Kontrak kegiatan IndoGreen telah ditandatangani oleh Kepala Balitbang Pertanian pada tanggal 26 Maret 2018.

Telah dilakukan dua kali *workshop* di tahun 2018, yaitu *Planning Workshop* pada tanggal 31 Januari 2018 di PSEKP, Bogor dan *Workshop on Methodology* pada tanggal 3–4 September 2018 di Hotel Santika, Bogor. Pada *workshop* tersebut dilakukan pembahasan/diskusi terkait metodologi yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian ini, diantaranya (1) alat/metode/program (ekonometrik) yang akan digunakan untuk menjawab tujuan penelitian, identifikasi kebutuhan data; (2) perkembangan studi dan informasi dari masing-masing wilayah/lokasi penelitian (Merangin-Jambi, Pagar Alam-Sumsel dan Saguling-Jabar) dan susunan rencana studi selanjutnya; (3) modul dan variabel yang akan digunakan dalam survei serta identifikasi data-data lain yang dibutuhkan untuk dikumpulkan guna menjawab tujuan penelitian; dan (4) sistem pendekatan yang akan digunakan di masing-masing wilayah/lokasi penelitian berdasarkan situasi dan kondisi yang ada berdasarkan kunjungan lapang sebelumnya. Selain dihadiri Tim IndoGreen gabungan PSEKP (Kementan) dan P3SEKPI (KemenKLH), *workshop* tersebut juga dihadiri oleh peserta dari WWF, ICRAF, dan *University of Adelaide*, Australia.

Pada tahun 2019 beberapa kegiatan utama penting antara lain: survei lapang tanggal 31 Maret–3 April 2019 di Desa Lebak Muncang Bandung dan Desa Muka Payung untuk mengamati dan mengeksplorasi kondisi lahan di calon lokasi survei ini untuk menjadi pertimbangan tim peneliti dalam penentuan sampel lokasi kemudian. Survei ini dilaksanakan oleh tim peneliti PSEKP bersama *expert team* dari *University of Adelaide* Australia dan tim peneliti ICRAF. Lalu setelah penyempurnaan kuesioner rumah tangga oleh tim peneliti, dilaksanakan survei lapang pada tanggal 28 April–4 Mei 2019 di sembilan desa di Kabupaten Bandung Barat dan empat desa di Kabupaten Bandung. Untuk melakukan verifikasi lanjutan ke beberapa desa yang belum diverifikasi sebelumnya di Kabupaten Bandung maka tim peneliti kembali melakukan survei lapang di Kabupaten Bandung dari 15–19 Mei 2019.

Pada tanggal 18–19 Juni 2019 dengan menggunakan aplikasi dan kuesioner *online* CommCare (ACIAR) tim melaksanakan uji coba survei *online* di Kabupaten Bandung. Dalam survei ini dilaksanakan juga koordinasi dengan petani, PPL, dan

dinas pertanian. Survei rumah tangga petani sendiri dilaksanakan pada tanggal 11 Juli–6 Agustus 2019 di lokasi survei yaitu Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan mewawancarai sekitar 500 rumah tangga petani yang tersebar di 22 desa di kedua kabupaten tersebut. Selama wawancara ini seluruh enumerator disupervisi oleh Tim Peneliti dari PSEKP, ICRAF, dan ACIAR.

Sebagai bagian dari tujuan untuk mensosialisasikan penelitian dan hasil sementara dari survei lapang maka tim mengorganisir suatu FGD yang berjudul Kebijakan Nasional dan Lokal dalam Penerapan Teknologi Pertanian Dataran Tinggi di Bogor pada tanggal 16 Oktober 2019. Dalam kegiatan FGD ini masing-masing tim melaporkan perkembangan dan temuan lapang selama survei dan memeriksa serta membahas hasil enumerasi yang sudah diinput didalam tabel CommCare. Juga dibahas *progress inputing* data dalam database.

Tahun 2020 kegiatan utama untuk hibah ini masih melanjutkan survey lapang, FGD, workshop dan pelatihan, serta penulisan laporan survey. Juga difinalisasi beberapa rencana artikel hasil penelitian yang akan dipublikasikan baik nasional maupun internasional. Dimulai dengan workshop pemantapan laporan hasil survey di Hotel Haris Sentul pada bulan Januari 2020, yang dilanjutkan dengan workshop di IPB Dramaga dan Hotel Lor In Sentul pada bulan Februari 2020.

Pada bulan Maret 2020, telah dilaksanakan survei lapang ke Jawa Barat di Bandung Barat yang dipadukan dengan kegiatan Workshop Capacity Building In Enhancement on Upland Management terkait dengan *action-research* pengembangan usaha kopi terintegrasi bagi petani. Lalu dilanjutkan dengan penulisan laporan terkait survei dan *workshop* ini.

Pada akhir tahun 2020 di bulan Oktober–Desember, tim bersama dengan tim expert bersama baik dari IPB maupun ICRAF dan Puslitbang Sosek Kehutanan fokus pada penyelesaian Laporan Akhir kegiatan 2020 dan penajaman artikel hasil penelitian terkait melalui beberapa kali seri FGD dan konsinyasi.

Berdasarkan pembicaraan dengan ACIAR dan University of Adelaide, mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, maka untuk tahun 2021 diperkirakan tim *expert* dari University of Adelaide Australia tidak dapat melakukan perjalanan luar negeri ke Indonesia sesuai kebijakan pembatasan perjalanan antarnegara maka mulai dipersiapkan administrasi perpanjangan masa kontrak hibah ini menjadi mundur ke 31 Desember 2022 dari semula 31 Desember 2021. Dan kegiatan survei yang tadinya akan dilaksanakan dan dibiayai oleh University of Adelaide akan dilimpahkan (*commissioned*) ke PSEKP.

c. *Development of Area-Wide Management Approaches for Fruit Flies in Mango for Indonesia (IndoAWM)*

Kegiatan penelitian ini merupakan kerja sama penelitian antara PSEKP, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura (Puslitbanghorti, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian), Universitas Gajah Mada, dan ACIAR. Kontrak

telah ditandatangani oleh PSEKP, Puslitbanghorti, UGM dan ACIAR pada bulan November 2018.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan, pihak donor melaksanakan *inception meeting* yang diselenggarakan di Cirebon pada tanggal 3–7 Desember 2018. Seluruh instansi yang terlibat dalam kegiatan ini hadir. Dalam *inception meeting* dilakukan pembahasan desain kegiatan untuk masing-masing instansi yang terlibat. Implementasi kegiatan penelitian efektif akan dilaksanakan mulai awal tahun 2019.

Survei lapang dilaksanakan pada tanggal 18–22 Juni 2019 di Kabupaten Cirebon dan Indramayu untuk melakukan konfirmasi kooperator program, *checklist* responden, *list* petani yang pernah berpartisipasi dalam program ACIAR sebelumnya, dan *list contact person* calon mitra ke depan dalam survei lapang serta test kuesioner ke petani mangga. Dilanjutkan dengan *coaching enumerator* di PSEKP pada tanggal 22–23 Juli 2019. Survei *baseline* nya sendiri dilaksanakan pada tanggal 24 Juli–4 Agustus 2019 di Kabupaten Cirebon dan Indramayu.

Tim juga melaksanakan FGD dan sosialisasi untuk *review progress* dan penulisan *paper* tim di Mall AEON Bintaro Banten dan Ditjen Hortikultura. Dalam FGD ini dilibatkan juga selain petani mangga lokasi penelitian, juga para pelaku pedagang mangga di Jakarta dan Banten bersama-sama dengan dinas pertanian setempat dan ditjen terkait.

Berbagai kegiatan di tahun 2020 merupakan kelanjutan dari tindak lanjut dari kegiatan tahun 2019 seperti *resurvey* atau survei lanjut, kegiatan FGD dalam rangka sosialisasi dan penulisan laporan survei serta artikel hasil penelitian. Survei kembali dilaksanakan di Cirebon pada bulan Februari 2020, lalu ke Indramayu serta Cirebon kembali di bulan Oktober akhir sampai dengan awal November 2020.

Tim peneliti IndoAWM juga berkesempatan atas undangan dan fasilitasi ACIAR mempresentasikan paper hasil penelitian dalam acara Australian Agriculture and Resources Economics Society (AARES) di Perth, Australia pada bulan Februari 2020. Lalu pada tahun 2020 juga telah dilaksanakan *workshop* dan *training* peningkatan kapasitas tim peneliti tentang analisis rantai nilai dan metodologinya.

Hasil penelitian IndoAWM ini juga telah berhasil dipublikasikan di jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 38 No 1 tahun 2020. Tim juga sedang memfinalisasi artikel penelitian lainnya selama 2020 ini.

d. Inclusive Agricultural Value Chain Financing (IndoFinance)

Kegiatan penelitian ini merupakan kerja sama penelitian antara PSEKP dan IFPRI serta ACIAR. Kegiatan penelitian kerja sama ini ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2019 dan telah memenuhi seluruh proses serta tahapan administrasi sesuai peraturan pengelolaan hibah yang berlaku, tim juga telah memulai kegiatannya diawal bulan April 2019. Telah dilaksanakan *Inception Workshop* pada tanggal 29–30

April 2019 di Aula Ismunadji PSEKP Bogor, dengan mengundang *expert* dari IFPRI dan ACIAR serta narasumber dari Bank BRI, LKA Bali, Jogja dan NTT.

Tim peneliti IndoFinance pada bulan Mei 2019 telah melaksanakan beberapa kali pertemuan dan diskusi dalam rangka mengumpulkan informasi dan data terkait pembiayaan sektor pertanian ke lembaga terkait di Jakarta seperti Direktorat Pembiayaan, Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian, kantor IFAD di Jakarta dan kantor FAO di Jakarta. Tim juga telah mengadakan beberapa kali rapat internal untuk membahas persiapan kegiatan prasurevei dan survei. Kegiatan pra survei di Jawa Barat telah dilaksanakan dua kali yaitu ke Kabupaten Cianjur pada tanggal 13–17 Mei 2019 dan ke Kabupaten Ciamis pada tanggal 20–24 Mei 2019. Melalui pra survei ini didapatkan berbagai data, informasi dan perkembangan terkini kegiatan pembiayaan di sektor pertanian terutama di subsektor hortikultura seperti cabe dan sayuran. Juga didapatkan beberapa masukan dan saran bagi perbaikan kuesioner petani dan kelompok tani ke depan.

Tim melaksanakan prasurevei lanjutan pada bulan Juni di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilanjutkan dengan prasurevei di Provinsi Sumatera Utara pada bulan Juli tanggal 9–13 Juli 2019. Dalam kegiatan prasurevei dilakukan diskusi, pengumpulan data dan informasi tentang pembiayaan pertanian mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan koperasi. Hasil dan tindak lanjut dari prasurevei ini adalah data dan informasi tentang pembiayaan inklusif di tingkat provinsi dan kota. Prasurevei tahap kedua, dilaksanakan pada tanggal 28 Juli–1 Agustus 2019 di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Terakhir pada tanggal 19–24 Agustus dilakukan prasurevei di Provinsi Bali. Tim peneliti telah mengolah data dan informasi hasil kunjungan prasurevei di semua lokasi serta menuliskan laporan baik laporan pendahuluan (*preliminary report*), dan juga laporan kemajuan (*progress report*) ke IFPRI dan *expert team* serta melakukan diskusi dan penajaman substansi laporan bersama.

Pada tahun 2020, tim peneliti melanjutkan kegiatan survei lapang ke-2 lokasi yang belum selesai pada tahun 2019, yaitu ke Sumatera Utara pada bulan Januari 2020. Dilanjutkan kemudian ke Jawa Timur pada akhir Februari 2020. Dengan demikian seluruh lokasi rencana survei lapang telah komplit dilaksanakan. Tim Peneliti kemudian fokus dalam menyelesaikan laporan survei total (keseluruhan), untuk dapat dikompilasi dan dikonsolidasikan data, informasi, dan hasil analisisnya kedalam draft Laporan Akhir hibah yang rencananya disampaikan pada awal 2020 yang lalu.

Tetapi mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19, rencana workshop dan diskusi penulisan Laporan Akhir dengan tim *Expert* dari IFPRI Washington DC dibatalkan karena pembatasan perjalanan luar negeri dan antisipasi paparnya. Berdasarkan pembicaraan dengan IFPRI dan ACIAR lalu disepakati untuk memperpanjang masa kontrak hibah ini ke April 2020. Tetapi karena rupanya kondisi Covid-19 semakin mengalami kenaikan dan eskalasi, masa kontrak IndoFinance ini disepakati untuk diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020.

Dalam masa perpanjangan ini tim peneliti fokus dalam finalisasi Laporan Akhir bersama-sama dengan tim *expert* dari IFPRI melalui pertemuan dan diskusi virtual (*online*).

Selama pertengahan sampai akhir 2020, difinalisasi Laporan Akhir kegiatan penelitian kerja sama ini antara tim peneliti PSEKP dengan *expert team* IFPRI di Washington DC. Bersamaan dengan itu tim peneliti Indofinance juga mempersiapkan *policy brief*, dokumen hasil penelitian, dan rancangan metodologi dan implementasi survei tahap ke-2 yang di akhir 2020 dibicarakan dan akan disepakati kemudian administrasi amandemen kontrak terkait tahap ke-2.

e. *Understanding The Drivers of Successful and Inclusive Rural Regional Transformation: Sharing Experiences and Policy Advices in Bangladesh, China, Indonesia and Pakistan (IndoTransform)*

Kegiatan penelitian ini merupakan kerja sama penelitian antara PSEKP dan ACIAR. Kegiatan penelitian kerja sama ini ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2019 dan telah memenuhi seluruh proses serta tahapan administrasi sesuai peraturan pengelolaan hibah yang berlaku, melalui penerbitan nomor register hibah dari Kementerian Keuangan. Masa kontrak awal hibah IndoTransform ini akan berakhir 1 Juli 2022.

Kegiatan penelitian kerja sama ini bertujuan untuk: 1. menganalisis definisi dari transformasi pedesaan, 2. menganalisis indikator kesuksesan suatu transformasi pedesaan, 3. menganalisis faktor-faktor yang menentukan kesuksesan suatu transformasi pedesaan, dan 4. saling tukar pengalaman dan pelajaran dari berbagai negara terkait transformasi pedesaan, serta 5. merekomendasikan kebijakan dan program yang dapat mendorong implementasi suatu transformasi pedesaan yang sukses. Tim peneliti dari PSEKP dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto dibantu beberapa peneliti senior dan junior di PSEKP.

Hibah kerja sama penelitian ini diimplementasikan bersama beberapa *partner* internasional dan nasional yaitu dari lembaga InterCafe IPB yang dipimpin oleh Prof. Nunung Nuryanto, dan dari Australia adalah Australian National University yang dipimpin oleh Prof. Chunlai. Kegiatan hibah yang disepakati dimulai di tahun 2020 ini, tapi dengan pertimbangan kejadian pandemi global Covid-19, PSEKP dan ACIAR sepakat untuk menunda jadwal mulainya hibah ini yang karena pembatasan perjalanan luar negeri dari berbagai negara. ACIAR bersama seluruh *partner* sepakat untuk memulai kegiatan penelitian hibah ini pada awal 2021 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Keuangan untuk penundaan sekaligus perpanjangan masa akhir kontrak hibah IndoTransform ini. Ringkasan kerja sama PSEKP TA 2020 dapat disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30. Ringkasan kegiatan kerja sama penelitian PSEKP TA 2019

Nama Donor	Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)	Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)	Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)	International Food Policy Research Institute-ACIAR	Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)
Judul kerja sama penelitian	Improving Milk Supply Competitiveness and Livelihood in Smallholder Chains in Indonesia	Agricultural Policy Research to Support Natural Management in Indonesia's Upland Landscapes	Development of Area-Wide Management Approaches for Fruit Flies in Mango for Indonesia, Philippines, Australia, and the Asia-Pacific Region	Inclusive Agriculture Value Chain Financing	Understanding The Drivers of Successful and Inclusive Rural Regional Transformation: Sharing Experiences and Policy Advises in Bangladesh, China, Indonesia, and Pakistan
UK/UPT pelaksana	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Nama peneliti utama	Dr. Erwidodo	Dr. Erwidodo	Dr. Handewi P.S.	Dr. Sahat M. Pasaribu	Prof. Dr. Tahlum Sudaryanto
Tanggal mulai proyek	9 Agustus 2017	1 Februari 2018	25 September 2018	1 Februari 2019	11 Desember 2019
Tanggal berakhir proyek	30 Juni 2021	31 Desember 2022	1 Juli 2023	31 Desember 2022	1 Juli 2023
Nilai hibah	Rp3.954.822.435	Rp2.421.455.098,56	Rp1.432.704.000	Rp2.715.000.000	Rp936.000.000
Nomor register	2YYMH8ZA	2JNEH3FA	2QKBIPA	2DCBX28A	2NX53DSA

VII. EVALUASI DAN PELAPORAN

7.1. Kegiatan Subbidang Evaluasi dan Pelaporan

Struktur organisasi Subbidang Evaluasi dan Pelaporan PSEKP berada dalam lingkup Bidang Program dan Evaluasi. Secara umum cakupan tugas Subbidang Evaluasi dan Pelaporan, antara lain: (1) mengkoordinir kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian, (2) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan manajemen/pelayanan dukungan penelitian dan administrasi institusi, (3) melaksanakan kegiatan seminar proposal dan hasil penelitian, (4) menyusun Laporan Kinerja (LAKIN), dan (5) menyusun berbagai laporan institusi yang bersifat reguler maupun nonreguler, baik untuk keperluan Sekretariat Jenderal maupun Kementerian Pertanian. Tugas pelaporan dilaksanakan secara paralel dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Koordinasi kegiatan monev dilaksanakan mulai dari pelaksanaan seminar proposal, penyusunan dan perbaikan proposal operasional, penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) penelitian, penyusunan *outline* penelitian, penyusunan kuesioner, penyusunan review terkait penelitian yang akan dilaksanakan, penyusunan laporan kemajuan, seminar hasil penelitian, pengecekan kelengkapan laporan akhir hasil penelitian hingga penyusunan bahan diseminasi hasil penelitian. Secara umum pelaksanaan kegiatan monev pada tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Terkait dengan kegiatan pelaporan, Subbidang Evaluasi dan Pelaporan bertugas menyusun berbagai macam laporan dari hasil penelitian untuk kepentingan institusi yang ditujukan kepada *stakeholders* atau pengguna lainnya. Penyusunan laporan yang sifatnya rutin bulanan adalah bahan untuk Rapat Pimpinan tingkat Sekretariat Jenderal dan Kementerian Pertanian, dan laporan kinerja penyerapan anggaran melalui aplikasi yang diatur dalam PMK 249/2011 Kemenkeu, sementara itu yang sifatnya rutin triwulanan adalah pelaporan pada aplikasi *e-monev* BAPPENAS.

Kegiatan lain yang cukup penting dan sudah terlaksana dengan baik adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) yang bersifat rutin tahunan. LAKIN merupakan laporan yang berisi kinerja institusi pada tahun yang bersangkutan. LAKIN PSEKP dari tahun ke tahun mengalami perbaikan dan penyempurnaan, khususnya menyangkut format laporan. Pembuatan LAKIN PSEKP sampai saat ini tidak mengalami hambatan yang berarti, kecuali cukup sulit dalam melakukan pengukuran manfaat dan dampak hasil penelitian mengingat output yang dihasilkan dari penelitian sosial ekonomi bukanlah teknologi yang bersifat *tangible* (teknologi yang dapat dilihat secara fisik), melainkan berupa pengetahuan, rumusan rekomendasi kebijakan yang bersifat *intangible*. Dengan demikian, manfaat maupun dampak atas hasil-hasil penelitian/pengkajian PSEKP umumnya tidak dapat dirasakan

oleh masyarakat dalam jangka pendek. Manfaat dan dampak penelitian/pengkajian PSEKP baru terlihat setelah rekomendasi kebijakan menjadi kebijakan pemerintah.

Pelaporan rutin tahunan lainnya yang juga telah dilakukan dengan baik adalah Laporan Tahunan PSEKP tahun 2019 yang menguraikan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum, Bidang Program dan Evaluasi, serta Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil. Materi pokok yang disajikan dalam laporan tahunan tersebut meliputi organisasi PSEKP, sumber daya manusia, sarana dan prasarana penelitian, program, pendayagunaan hasil analisis dengan publikasi, dan kerja sama penelitian, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, disajikan pula sinopsis hasil-hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan PSEKP selama tahun 2020.

7.2. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan penelitian dan pengembangan adalah kegiatan penelitian yang menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang bersifat netral. Selain kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti, diperlukan dukungan pelayanan institusi secara keseluruhan. Keduanya diperlukan dalam satu kesatuan yang saling terkait secara fungsional sehingga bisa memperoleh keluaran (*output*) penelitian sesuai kebutuhan pengguna (*stakeholders*). Kegiatan monitoring dan evaluasi (*monev*) sangat membantu dalam memberikan umpan balik (*feed back*) untuk menyempurnakan sistem yang ada menjadi lebih baik.

Kegiatan *monev* PSEKP selama tahun 2020 mencakup *monev* kegiatan penelitian dan *monev* kegiatan pendukung penelitian. *Monev* kegiatan penelitian dilakukan terhadap seluruh tahapan kegiatan penelitian mulai dari: (1) tahap persiapan dengan materi meliputi: proposal operasional, juklak penelitian, rencana laporan (*outline*), serta kuesioner (*outline* kuesioner data primer dan sekunder); (2) tahap pelaksanaan penelitian dengan materi meliputi: kuesioner, laporan perjalanan, *entry/input* data (baik data primer maupun sekunder), dan laporan tengah tahun; (3) tahap pengolahan data dan penulisan dengan materi meliputi pengolahan data, tabulasi, dan tabel analisis data primer dan sekunder, serta draft laporan; (4) seminar akhir penelitian, laporan akhir dan laporan final. Sedangkan *monev* pelayanan penelitian dilakukan terhadap kelengkapan administrasi dan kinerja pelayanan sebagai pendukung penelitian, yang meliputi pelayanan keuangan, pengolahan data atau komputerisasi, perpustakaan, publikasi, kendaraan dan sarana penelitian. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan agar hasil-hasil penelitian bisa berkualitas dan bermanfaat bagi para pengguna.

7.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TA 2020

Pelaksanaan kegiatan *Monev* penelitian lingkup PSEKP TA 2020 dilakukan oleh Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk melalui Surat Keputusan

Kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Nomor: B-26/Kpts/OT.160/A.111/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Tim Pelaksana Monev sebagai berikut:

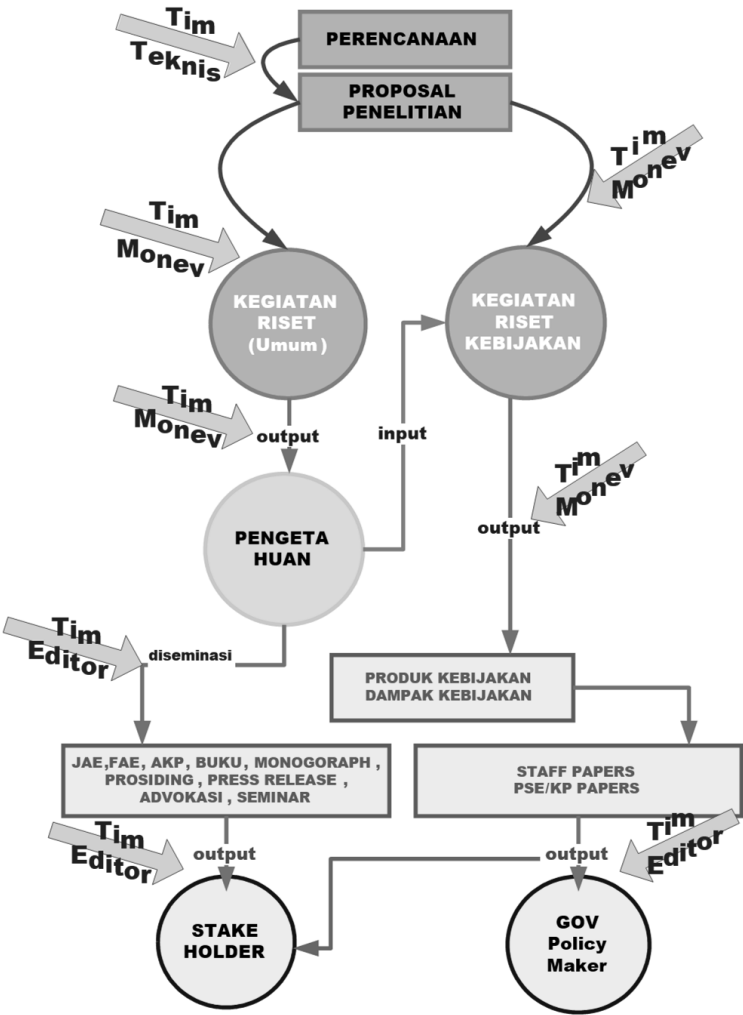
- Pengarah : Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Penanggung Jawab : Kepala Bidang Program dan Evaluasi (merangkap anggota)
Ketua : Dr. Nyak Ilham (merangkap anggota)
Wakil Ketua : Dr. Sahat M. Pasaribu (merangkap anggota)
Sekretaris : Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan (merangkap anggota)
Anggota : 1. Dr. Sri Hery Susilowati
2. Dr. Kurnia Suci Indraningsih
3. Dr. Bambang Sayaka
4. Dr. Adang Agustian
5. Dr. Ening Ariningsih
6. Dr. Saktyanu K. Dermoredjo
7. Dr. Herlina Tarigan
8. Ir. Mewa Ariani, M.S.
9. Dr. Iwan Setiajie Anugrah
Kesekretariatan : 1. Juni Hestina, S.E., M.Si (Staf Subbidang EP)
2. Ahmad Makky Ar-Rozi, S.Sos. (Staf Subbidang EP)
3. Fajri Shoutun Nida, S.P. (Staf Subbidang EP)
4. Nur Intan Syamsiah (Staf Bidang Program dan Evaluasi)

Tugas Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi adalah: (1) melakukan pemantauan proses pelaksanaan kegiatan penelitian mulai tahap awal hingga akhir, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan penelitian dari rencana yang telah ditetapkan dan membantu memberikan solusi jika terjadi penyimpangan, (2) memberikan penilaian terhadap hasil penelitian menurut tahapan penelitian sekaligus memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan, dan (3) melaporkan hasil kerja kepada Kepala Pusat secara berkala atau pada saat diperlukan serta mentaati ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi terfokus pada kegiatan penelitian mulai penyusunan proposal operasional hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Sementara tahapan penjarangan judul penelitian hingga tersusunnya proposal merupakan bagian tugas Tim Teknis. Sedangkan Tim Editor bertugas menangani *output* penelitian menjadi berbagai

produk publikasi ilmiah yang ditujukan baik untuk *stakeholders* maupun pengguna lainnya. Keterkaitan ketiga tim tersebut dapat dilihat pada Gambar 12.

Secara garis besar Subbidang Evaluasi dan Pelaporan telah melakukan kegiatan seperti: membantu mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian, mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dukungan penelitian dan administrasi institusi, melaksanakan kegiatan seminar proposal dan seminar laporan hasil penelitian reguler dan analisis kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan hasil penelitian, laporan institusi, baik untuk keperluan Sekretariat Jenderal maupun Kementerian Pertanian, dan Laporan Kinerja (LAKIN).



Gambar 12. Bagan Keterkaitan Tim Teknis, Tim Monev, dan Tim Editor di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

7.3.1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian

Agar tercipta kesesuaian antara perencanaan (*input*), pelaksanaan penelitian dan pengolahan data/informasi (*proses*), serta pelaporan (*output*), maka perlu dirancang metode pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang baik agar tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat tercapai. Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian PSEKP telah dituangkan dalam Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2020. Kegiatan *money* pada tahun 2020 ini ditujukan terhadap tujuh judul penelitian yang sumber dananya dari APBN (DIPA) TA 2020.

Monitoring dan Evaluasi Tahap I

Perencanaan merupakan tahap awal dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim peneliti dan seluruh bidang pelayanan di lingkup PSEKP. Perencanaan yang dilakukan menyangkut tiga aspek, yaitu: (a) jenis dan lokasi kegiatan yang akan dilakukan, (b) susunan tim dan jadwal kegiatan, dan (c) rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Setiap tim peneliti dan bidang pelayanan hendaknya menyusun perencanaan yang menyangkut ketiga aspek tersebut. Tujuannya adalah agar dapat dirancang sinkronisasi antara kegiatan penelitian dan kegiatan pelayanan dalam rangka meningkatkan kinerja institusi.

Pada tahap awal, pelaksanaan penelitian di lingkup PSEKP secara substantif meliputi dua kegiatan, yaitu: (a) menyusun proposal operasional yang merupakan acuan bagi seluruh rangkaian kegiatan penelitian, dan (b) mempersiapkan bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk merealisasikan kegiatan yang telah dirancang dalam proposal operasional, seperti petunjuk pelaksanaan (*juklak*), kuesioner, rencana kerangka laporan penelitian (*outline*), dan penulisan tinjauan pustaka yang terkait dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan.

Kegiatan tersebut memiliki peranan penting untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan pertanian, baik di tingkat nasional maupun daerah. Proposal yang disusun dengan baik menurut kaidah-kaidah ilmiah diharapkan dapat menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas. Oleh karena itu, proposal harus didukung dengan bahan dan perlengkapan yang memadai, seperti petunjuk pelaksanaan dan kuesioner sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder di lapangan. Kegiatan monitoring evaluasi pada tahap awal bertujuan untuk menyempurnakan bahan kelengkapan survei.

Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi tahap awal pada tahun 2020 diawali dengan kegiatan seminar proposal operasional untuk mengevaluasi relevansi penelitian yang akan dilakukan dengan masalah pembangunan pertanian di tingkat nasional. Seminar proposal operasional penelitian PSEKP TA 2020 dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Februari 2020 di Auditorium Ismunadji PSEKP. Jumlah proposal yang diseminarkan pada tahun 2020 sebanyak tujuh judul

penelitian yang sumber dananya berasal dari DIPA PSEKP. Kegiatan seminar proposal bertujuan untuk mempertajam dan menyempurnakan arah, tujuan serta sasaran kegiatan penelitian PSEKP pada TA 2020. Kegiatan seminar proposal operasional penelitian PSEKP DIPA TA 2020 dilakukan dengan mengundang berbagai *stakeholders* terkait, yaitu Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian; Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian; dan instansi di luar Kementerian Pertanian seperti Perguruan Tinggi, Bappenas, dinas yang menangani pertanian di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, serta seluruh staf peneliti dan analis kebijakan PSEKP.

Dalam upaya mempertajam dan menyempurnakan arah, tujuan serta sasaran kegiatan hasil penelitian, telah diundang pembahas dari Institut Pertanian Bogor (IPB); UNILA/InterCafe IPB; Bidang Perbankan, Kemenko Perekonomian; Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas; Direktorat Pengembangan Produk Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan; Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal; Biro Perencanaan; Puslitbangtan, Badan Litbang Pertanian; FKPR Balitbangtan; dan peneliti senior PSEKP. Langkah ini ditempuh agar rencana penelitian yang disusun dalam proposal operasional dapat dievaluasi secara obyektif oleh pihak lain, terutama yang menyangkut kaidah-kaidah ilmiah dalam pelaksanaan penelitian, serta sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Hasil seminar proposal ini selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka penajaman proposal operasional. Pelaksanaan seminar proposal penelitian TA 2020 seperti yang terlihat pada Gambar 13.

Berdasarkan hasil seminar proposal tersebut, selanjutnya Tim Peneliti melakukan penyempurnaan proposal operasional. Kemudian dilakukan diskusi internal atau rapat pleno Monev tahap I oleh Tim Monev untuk mengevaluasi perbaikan proposal operasional sesuai dengan masukan dari seminar proposal yang telah dilakukan sebelumnya. Evaluasi perbaikan proposal operasional tersebut selain mengacu hasil koreksi Tim Evaluator Proposal juga mengacu pada notulen seminar proposal. Langkah ini merupakan cara yang ditempuh dalam memantau dan mengevaluasi kesiapan tim peneliti untuk melaksanakan kegiatan



Gambar 13. Seminar proposal tim penelitian TA 2020, 11–12 Februari 2020

penelitian sesuai dengan proposal operasional. Tujuan diskusi tersebut adalah: (a) untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan, (b) evaluasi materi penelitian dan penyempurnaan bahan pengumpulan data lapangan, baik data primer maupun data sekunder, dan (c) menciptakan sinkronisasi kegiatan yang akan dilakukan oleh tim penelitian dengan bidang pelayanan terkait.

Dalam monitoring dan evaluasi internal tersebut dilihat pula aspek yang berkaitan dengan kelengkapan pelaksanaan penelitian, yaitu: kesesuaian proposal operasional, petunjuk pelaksanaan penelitian (juklak), rencana kerangka laporan penelitian dan kuesioner. Hasil penilaian kegiatan monitoring dan evaluasi melalui Rapat Pleno Tim Monev untuk masing-masing tim penelitian selanjutnya dimasukkan dalam tiga kategori penilaian, yaitu: (1) Kategori I: tidak bermasalah, artinya jika ada perbaikan dapat dilakukan tanpa menghentikan kegiatan penelitian, (2) Kategori II, perlu perbaikan bahan kelengkapan survei sesuai rekomendasi Tim Monev, artinya tim penelitian harus melakukan perbaikan sebelum turun ke lapang, dan (3) Kategori III, perlu perbaikan bahan kelengkapan survei sesuai rekomendasi Tim Monev, setelah perbaikan tersebut disetujui oleh Tim Monev dan Kepala PSEKP maka Tim Peneliti dapat melakukan kegiatan lapang. Hasil penilaian ini dikeluarkan oleh Tim Monev dalam bentuk Surat Keterangan Hasil Monitoring (SKHM) yang telah ditandatangani oleh Ketua Tim Monev dan pihak manajemen (Kabid Program dan Evaluasi). Selanjutnya SKHM tersebut diserahkan kepada setiap tim peneliti dan tim peneliti diberi hak jawab paling lambat tujuh hari setelah menerima SKHM tersebut.

Monitoring dan Evaluasi Tahap II

Dalam proses pelaksanaan penelitian, terdapat tiga macam obyek monitoring dan evaluasi, yaitu: (1) Laporan perjalanan dilakukan oleh Subbag Keuangan dan Perlengkapan, (2) Laporan pengolahan data dilakukan oleh Tim Pengolah Data, dan (3) Laporan Kemajuan dinilai oleh Tim Monev. Pada Monev tahap II, evaluasi difokuskan pada tujuh judul penelitian yang sumber dananya dari DIPA PSEKP 2020.

Rapat Pleno Monev tahap II dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik, perbaikan yang dilakukan oleh tim peneliti dituangkan pada laporan akhir penelitian. Adapun kegiatan Rapat Pleno Monev tahap II dapat dilihat pada Gambar 14.

Laporan Perjalanan

Pembuatan laporan perjalanan oleh tim peneliti bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapang agar dapat diantisipasi pemecahan masalahnya, (2) mendapatkan bahan perumusan kebijakan dari temuan dan isu-isu aktual hasil temuan di lapang, (3) tertib



Gambar 14. Rapat Pleno Monev Tahap II pada tanggal 28–29 Juli 2020

administrasi, dan (4) penyempurnaan rencana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Rincian obyek monitoring dan evaluasi untuk laporan perjalanan mencakup:

- (1) Perkembangan pengumpulan data (primer dan sekunder) sesuai dengan rencana yang dirumuskan dalam proposal.
- (2) Temuan dan isu aktual yang perlu ditindaklanjuti. Salah satu tujuan monitoring dan evaluasi tahap ini adalah untuk memperoleh bahan *policy brief*.
- (3) Jadwal kegiatan. Pengecekan jadwal kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan dan penyempurnaan rencana kegiatan selanjutnya.
- (4) Penyelesaian administrasi. Secara administratif, serapan dana harus seimbang dengan volume kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu penyelesaian administrasi yang terkait dengan perjalanan kegiatan penelitian merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (5) Temuan masalah dalam pelaksanaan penelitian. Dalam proses pengumpulan data di lapang kemungkinan akan ditemui berbagai masalah dan hambatan, oleh karena itu dengan kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini berbagai kendala dalam pelaksanaan penelitian dan dapat diupayakan solusi pemecahannya.

Laporan perjalanan dibuat sesuai dengan frekuensi perjalanan tim penelitian ke lapangan. Secara umum, seluruh tim peneliti pada tahun anggaran 2020 telah menyusun laporan perjalanan dengan baik. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain adalah: kurang terbukanya beberapa instansi serta responden tertentu, seperti pedagang besar, eksportir dan industri pengolahan hasil pertanian sehingga kesulitan dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, juga kondisi pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020 yang menghambat kegiatan penelitian ke lapangan.

Pengolahan Data

Monitoring dan evaluasi terhadap pengolahan data dilakukan untuk mengantisipasi masalah dalam pengolahan data serta meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian pengolahan dan analisis data. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan ini adalah target atau rencana penyelesaian dibanding tingkat pencapaian pada masing-masing tahap kegiatan. Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi pada pengolahan data dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan masing-masing penelitian. Untuk menertibkan pelaksanaan pengolahan data, telah dibuat peraturan bahwa setiap tim peneliti yang akan berangkat ke lapangan (dimulai pada tahap II) harus sudah menyerahkan isian kuesioner dari survei tahap sebelumnya. Isian data dalam kuesioner harus sudah teredit dengan baik oleh Tim Peneliti.

Data yang diolah dalam kegiatan pengolahan data ini meliputi data primer dan sekunder yang mendukung kegiatan penelitian. Data primer biasanya diperoleh melalui wawancara di lapang, baik di tingkat petani, kelompok tani atau lembaga perdesaan lainnya, penggilingan padi, industri pengolahan hasil pertanian, pedagang, eksportir, dan lain-lain, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran data-data yang dipublikasikan oleh instansi terkait maupun melalui internet. Data primer yang diolah dari kuesioner jumlah dan ketebalannya bervariasi setiap tim peneliti. Jumlah kuesioner yang besar dari masing-masing tim peneliti membutuhkan pengaturan dalam pengerjaannya, terutama pada tahap *entry data* dan proses validasi data. Proses *input data* dan pengolahan data menggunakan sistem FIFO (*First In First Out*), artinya tim peneliti yang menyerahkan kuesioner lebih dulu akan di-*entry* dan diolah lebih dulu, demikian seterusnya sehingga tercipta kelancaran dalam kegiatan pelayanan penelitian ini. Di samping itu dari pihak peneliti sendiri diharapkan kesadarannya untuk secepatnya menyerahkan kuesioner, data-data maupun informasi yang diperoleh dari lapang agar tidak terjadi penumpukan di bagian *entry data* dan pengolahan data, terutama pada tengah dan akhir tahun. Tahun 2020 ini ada beberapa tim yang melakukan pengolahan data diinternal tim.

Evaluasi Laporan Kemajuan

Tujuan utama kegiatan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan adalah untuk: (1) meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil penelitian, (2) meningkatkan kualitas hasil penelitian, dan (3) memonitor hasil monev sebelumnya secara berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan kegiatan penelitian dapat selesai tepat waktu dan diperoleh hasil sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan pengalaman, kontrol yang cukup ketat terhadap pembuatan laporan tengah tahun sangat membantu ketepatan tim peneliti dalam menyelesaikan laporan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Format dan isi laporan kemajuan sudah diatur dalam Pedum Monev.

Berdasarkan format laporan kemajuan, maka tim peneliti sebenarnya telah mempersiapkan sebagian draft laporan hasil penelitian.

Secara umum seluruh Tim Peneliti telah menyusun laporan kemajuan dengan baik sesuai format yang ditentukan. Selain itu, tim peneliti umumnya juga telah menyerahkan laporan kemajuan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tim penelitian dapat melanjutkan proses penyelesaian penelitian dengan melaksanakan kegiatan survei lapang, proses pengolahan data dan penyelesaian draft laporan.

Monitoring dan Evaluasi Tahap III

Pada tahap III, monitoring dan evaluasi difokuskan pada penyusunan draft laporan akhir penelitian. Monev tahap III dilakukan setelah kegiatan seminar hasil penelitian. Berdasarkan seminar hasil penelitian tersebut, tim peneliti diharapkan memperoleh banyak masukan dari pembahas dan peserta guna penyempurnaan laporan akhir. Tim peneliti melakukan perbaikan draft penelitian sesuai dengan hasil masukan dari pembahas dan hadirin peserta seminar. Tim peneliti juga memperoleh masukan dari Tim Monev yang telah ditugaskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Seminar Hasil Penelitian

Kegiatan seminar PSEKP merupakan mata rantai penting untuk penyempurnaan hasil penelitian. Kegiatan seminar hasil penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Desember 2020 di Auditorium Ismunadi dan Zoom Meeting PSEKP, Bogor. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan seminar dilakukan dengan kombinasi *offline* dan *online*. Narasumber, Moderator, beberapa Pembahas, dan peneliti serta analis kebijakan lingkup PSEKP hadir *offline*. Kegiatan seminar hasil penelitian tersebut bertujuan untuk mempertajam dan menyempurnakan hasil kegiatan penelitian PSEKP untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pada TA 2020. Kegiatan seminar hasil penelitian PSEKP TA 2020 dilakukan dengan mengundang berbagai *stakeholders* terkait, yaitu Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian; Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian; dan instansi di luar Kementerian Pertanian seperti Perguruan Tinggi, Bappenas, dinas yang menangani pertanian di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, serta seluruh staf peneliti dan analis kebijakan PSEKP.

Kegiatan seminar hasil difokuskan kepada konsistensi antara judul, tujuan penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Umpan balik yang diperoleh dalam seminar hasil tersebut digunakan untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan akhir penelitian serta penyusunan *Policy Brief* (Gambar 15).



Gambar 15. Kegiatan seminar hasil penelitian PSEKP, 10–11 Desember 2020

Draft Laporan Akhir Penelitian

Penulisan draft laporan akhir penelitian merupakan salah satu tahap atau mata rantai penting dalam proses pelaksanaan kegiatan penelitian. Pada tahapan ini, jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana penelitian dengan pelaksanaan atau hasil yang diperoleh tim peneliti dapat segera dilakukan koreksi atau penyesuaian. Indikator evaluasi terdiri atas empat komponen utama, yaitu: (1) konsistensi proposal dengan laporan hasil penelitian, (2) koherensi pelaporan terkait kedalaman dan ketajaman hasil pembahasan, perumusan kesimpulan dan implikasi kebijakan, (3) aspek editorial yang menyangkut redaksional, penyajian tabel, kelengkapan pustaka, dan (4) ketepatan waktu penyelesaian laporan dan konsistensi format serta isi laporan sesuai dengan Juklak Monev TA 2020.

Pada tahap penyusunan draft laporan akhir penelitian, ada tiga aspek yang penting diperhatikan, yaitu: (1) konsistensi antara proposal dan laporan hasil penelitian, (2) perlunya perbaikan dari segi koherensinya, dan (3) perlunya penyempurnaan dari sisi redaksional. Dari sisi substansi, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa secara umum tim peneliti telah menyusun draft laporan hasil penelitian sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, konsistensi antara judul, tujuan, metodologi, hasil dan pembahasan dan kesimpulan serta implikasi kebijakan secara umum telah tersusun dengan baik. Terkait ketepatan waktu dalam penyelesaian draft laporan akhir, secara umum sudah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Draft laporan hasil penelitian yang dievaluasi Tim Monev diharapkan sudah mengakomodir seluruh masukan dari seminar.

Berdasarkan hasil evaluasi Monev tahap III, tim penelitian melakukan perbaikan/revisi draft laporan akhir menjadi Laporan Akhir Penelitian Tahun 2020. Pada setiap akhir tahun anggaran, tim peneliti selain menyelesaikan laporan akhir penelitian, juga harus menyusun *Policy Brief* (dalam Bahasa Indonesia dan *optional* dalam Bahasa Inggris) dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Laporan akhir perlu mendapatkan penekanan khusus karena merupakan produk akhir yang akan menjadi bahan referensi untuk kegiatan penelitian lanjutan atau penelitian lain yang relevan. Dalam rangka diseminasi hasil penelitian terdapat sejumlah *output* yang perlu dikomunikasikan kepada stakeholders utama dan masyarakat pengguna iptek sosial ekonomi dalam arti luas. Bahan diseminasi

tersebut meliputi bahan rapat pimpinan di tingkat Sekretariat Jenderal dan Kementerian Pertanian, materi untuk forum diskusi *ad hoc* di PSEKP, forum tingkat nasional, bahan publikasi/penerbitan ilmiah (baik terbitan PSEKP maupun di luar PSEKP) dan bahan laporan tahunan PSEKP TA 2020. Tim peneliti wajib menyiapkan bahan diseminasi tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga penelitian, PSEKP diharapkan mampu memberikan hasil-hasil penelitian yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya. Pengguna hasil-hasil penelitian PSEKP secara umum adalah *stakeholders* pembangunan pertanian di tingkat pusat, daerah, dan akademisi. Mengingat hasil penelitian PSEKP sangat bermanfaat bagi *stakeholders*, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian mendatang seyogyanya mengakomodasikan aspirasi para pengguna hasil penelitian PSEKP, terutama para *stakeholders* di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian masukan dan saran-saran dari *stakeholders* tersebut akan lebih menyempurnakan kegiatan penelitian yang akan dilakukan.

Penyusunan *policy brief* otoritas penilaiannya berada di tangan struktural dengan finalisasi koreksi dan saran perbaikan dari Kepala PSEKP. Di sisi lain, otoritas penilaian bahan publikasi PSEKP dilakukan sepenuhnya oleh Dewan Redaksi. Dengan mengacu pada prosedur tersebut, maka evaluasi terhadap bahan diseminasi dalam konteks pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dibatasi sampai pada penentuan status materi tersebut. Hal tersebut merupakan kewajiban dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka statusnya adalah apakah peneliti telah memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan materi diseminasi tersebut. Kalau persyaratan kelengkapan pengajuan ini belum dipenuhi, perlu dikemukakan faktor-faktor penyebabnya sehingga dapat dicarikan jalan keluarnya.

Keluaran atau *output* penelitian (data dan laporan) lingkup PSEKP telah didokumentasikan secara baik. Dokumentasi data dibedakan atas data primer dan data sekunder. Dokumentasi yang terkait data primer meliputi: (1) kuesioner dan Buku Kode Variabel, dan (2) file data hasil *entry*. Dokumentasi yang terkait data sekunder meliputi: (1) dokumen asli (buku, CD), (2) dokumen olahan, dan (3) file data hasil pengolahan data. Secara umum hasil-hasil penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian PSEKP dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:

Pertama, sintesis pertimbangan dan advokasi kebijakan pembangunan pertanian. Hasil penelitian ini digunakan untuk memberikan opsi rumusan kebijakan (sintesis), pemikiran akademis mengenai evaluasi kebijakan pembangunan pertanian (pertimbangan) dan memperjuangkan suatu kebijakan yang dianggap layak dan patut atau menolak kebijakan yang dianggap tidak layak dan tidak patut (advokasi). Sintesis kebijakan disampaikan langsung kepada pimpinan Kementerian Pertanian. Selain itu, PSEKP juga memiliki media reguler Analisis Kebijakan Pembangunan Pertanian sebagai sarana penyuluhan, diseminasi dan diskusi kebijakan.

Kedua, rekayasa model inovatif kelembagaan pembangunan pertanian. Kelembagaan merupakan faktor penting dalam mengatur hubungan antarmanusia untuk penguasaan faktor produksi yang langka. Keberlanjutan sistem produksi dimungkinkan apabila inovasi teknologi dapat memberikan manfaat bagi pengguna. Mengingat pentingnya faktor kelembagaan dalam pembangunan pertanian, maka PSEKP memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aspek kelembagaan ini.

Ketiga, analisis deskriptif mengenai kinerja dan dinamika lingkungan strategis pembangunan pertanian yang meliputi: (1) ekonomi makro dan mikro serta perdagangan internasional, (2) pengelolaan sumber daya dan agribisnis berkelanjutan, (3) sistem inovasi teknologi pertanian, (4) ketahanan pangan dan kemiskinan, dan (5) dinamika sosial ekonomi perdesaan. Hasil penelitian ini, berupa parameter mengenai perilaku ekonomi makro dan mikro untuk menunjang analisis maupun perumusan model kebijakan pembangunan pertanian. Parameter-parameter tersebut merupakan landasan untuk penyusunan model simulasi maupun analisis perumusan kebijakan. Hasil analisis deskripsi digunakan untuk menyusun *highlight* situasi terkini kinerja pembangunan pertanian dan lingkungan strategisnya. Laporan singkat ini dibuat dan disampaikan secara reguler kepada pimpinan Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan *well informed policy making*.

7.3.2. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Penelitian

Dalam melaksanakan fungsi penelitiannya, PSEKP didukung oleh beberapa bidang manajemen penelitian, yaitu: aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian. Kelima bidang manajemen penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka mendukung kegiatan penelitian di PSEKP. Dengan demikian diharapkan keluaran yang dihasilkan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja manajemen penelitian.

Pelayanan Keuangan

Untuk kelancaran administrasi keuangan, kegiatan penelitian perlu didukung pelayanan keuangan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelayanan keuangan adalah untuk meningkatkan ketepatan perencanaan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Instrumen kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelayanan keuangan adalah DIPA yang dirinci berdasarkan jenis pengeluaran, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial. Sebelum pelaksanaan penelitian ke lapang, kegiatan monitoring dan evaluasi juga melibatkan pihak peneliti dengan pelaksana keuangan untuk penyesuaian jadwal keberangkatan dan hal-hal teknis yang berkaitan dengan prosedur keuangan di lapang yang harus dilakukan oleh peneliti.

Indikator yang digunakan pada kegiatan ini adalah perencanaan, pelaksanaan dan solusi pemecahan masalah. Dalam pelaksanaan kinerja keuangan yang berhubungan dengan kegiatan penelitian, terlihat adanya kemudahan dalam pencairan dana. Hal ini tampak dalam pencairan dana relatif berjalan lancar. Di samping kegiatan ke lapang, pencairan dana untuk perjalanan dinas ke wilayah Jabodetabek untuk pengumpulan data sekunder dan informasi lainnya juga mengalami kemudahan.

Pelayanan Pengolahan Data

PSEKP dalam melaksanakan kegiatan penelitian didukung oleh pelayanan pengolahan data yang bertugas untuk memasukkan/*entry* data (primer dan sekunder) serta informasi yang diperoleh dari lapang serta mengolah data tersebut sesuai dengan kebutuhan peneliti. Indikator yang digunakan pada kegiatan *monev* layanan pengolahan data adalah: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), dan (2) *Hardware*. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi sumber daya manusia adalah: (1) jumlah orang, (2) pembagian kerja, dan (3) kompetensi. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi *hardware* adalah: (1) jumlah komputer tersedia, (2) kapasitas, dan (3) manajemen pemanfaatan *hardware*. Sedangkan indikator yang digunakan dalam jadwal kerja pengolahan data untuk setiap judul penelitian adalah: (1) perencanaan dan (2) pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan data, bila dilihat dari sisi pengadaan sarana prasarana telah tersedia dengan baik, seperti: jumlah tenaga input data, validasi data dan pengolahan data, perangkat komputer, printer, dan sarana pendukung lainnya. Ketersediaan sarana pengolahan data yang sudah cukup memadai. Unit pengolahan data, selain melakukan kegiatan pengolahan data penelitian, juga melakukan kegiatan database PSEKP, seperti *entry* data, *updating* data, dan melayani permintaan data sekunder untuk para peneliti. Mengingat banyaknya kegiatan tersebut, maka perlu dilakukan pengaturan waktu sedemikian rupa sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Agar pekerjaan terdistribusi merata, maka setiap judul penelitian mempunyai penanggungjawab untuk *entry* data dan pengolahan data.

Kegiatan pengolahan data biasanya mengikuti irama kegiatan peneliti. Pada saat peneliti melakukan *prasurvei*, unit pengolahan data biasanya mulai membuat *screen form* untuk persiapan *entry* data. Pada saat tengah dan akhir tahun biasanya kegiatan pengolahan data cukup padat. Input data dan pengolahan data yang dilakukan oleh tim penelitian biasanya dilakukan secara bersamaan, akibatnya proses input dan pengolahan data tersebut menumpuk di tengah dan akhir tahun.

Database

Seiring dengan perkembangan teknologi, data dan informasi untuk bahan penelitian sebagian diperoleh dari *database* yang dimiliki PSEKP. Data dan

informasi selain dimanfaatkan untuk analisis/kajian perumusan kebijakan, juga diperlukan dalam menunjang implementasi kebijakan, monitoring, maupun evaluasi. Suatu rekomendasi kebijakan yang baik harus memenuhi syarat: tepat dalam memahami permasalahan, tepat dalam perumusan tujuan, konsisten dengan Haluan Negara, antisipatif terhadap dinamika empiris, dan realistis (dalam arti dapat diimplementasikan), berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak tanpa mengorbankan prinsip efisiensi dan keberlanjutan dalam pembangunan. Syarat-syarat seperti itu dapat dipenuhi hanya jika rekomendasi kebijakan dihasilkan dari suatu kajian, analisis, ataupun studi yang relevan dan berlandaskan prinsip-prinsip penelitian ilmiah.

Dalam penelitian ilmiah, peranan data sangat strategis. Bahkan pada hakekatnya nilai hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh data dan informasi yang menjadi bahan analisisnya. Guna memenuhi kebutuhan terhadap data yang berkualitas dan dengan cepat dapat diperoleh, maka manajemen data merupakan salah satu aktivitas pokok dari suatu lembaga/instansi; terlebih pada suatu lembaga penelitian. Manajemen data yang baik bukan hanya membantu terciptanya pelaksanaan penelitian yang baik tetapi juga mempermudah sistem verifikasi data dan informasi antar lembaga terkait.

Output yang dihasilkan oleh suatu lembaga penelitian adalah data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta rekomendasi kebijaksanaan. Oleh karena sifatnya untuk mendukung pemecahan masalah, maka hampir semua penelitian yang ditujukan untuk menghasilkan *output* tersebut adalah penelitian terapan. Sebagai pengguna utama, maka *stakeholder* terpenting adalah pemerintah. Meskipun demikian, *user* lain juga sangat banyak, misalnya para peneliti, mahasiswa, petani, peternak, wartawan, dan lain sebagainya. Sejak beberapa tahun yang lalu, PSEKP telah melakukan aktivitas manajemen data. Dalam kegiatan ini, tercakup tiga aspek: (a) pengembangan sistem *database*, (b) pengembangan kapabilitas programmer dan analis, (c) pengembangan infrastruktur pendukung. Ketiga aspek itu mutlak dibutuhkan dalam mewujudkan sistem data yang berdaya guna.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan *database* tahun 2020 hasilnya cukup banyak dan bervariasi, yaitu dari *updating* (pemutakhiran) data, *entry* data baru sampai pada pengadaan data yang sudah dikelola oleh lembaga lain, seperti BPS, Bank Indonesia, Deperindag, WTO, dan FAO. Kegiatan *database* tahun 2020 merupakan kelanjutan dari kegiatan *database* yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Dalam rangka penyempurnaan *database*, pada akhir tahun 2020 dilakukan kegiatan sosialisasi *database* untuk menyampaikan hasil-hasil kegiatan yang dilakukan tim *database* sampai dengan tahun 2020 sekaligus menjangkir respons dan masukan dari para peneliti PSEKP.

Pada tahun 2020, kegiatan *database* melakukan pemutakhiran data, penambahan jenis/subyek data yang dimasukkan ke dalam *database* PSEKP, serta melakukan penyusunan format *database* dalam bentuk *long-format* agar lebih

memudahkan pengguna untuk pengambilan data dalam *database*. Dengan penyusunan format *database* dalam bentuk *long-format*, pemutakhiran dan perluasan jenis/subyek data yang dimasukkan ke dalam *database*; diharapkan pelaksanaan kegiatan penelitian dapat didukung oleh *database* PSEKP. Data yang ditampilkan dalam *database* secara umum adalah series hingga tahun 2019 dan beberapa variabel (seperti data ekspor-impor, harga) hingga tahun 2020, namun ada beberapa jenis data yang belum sampai ke data terkini (*current data*). Hal ini disebabkan beberapa kendala, seperti publikasi dari instansi terkait belum keluar, perubahan format tabel/jenis data yang ditampilkan oleh instansi terkait, dan sebagainya. Namun demikian, ke depan Tim Database akan terus melakukan pemutakhiran/*updating* data serta perluasan jenis data baru yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penelitian PSEKP.

Tim Database juga mengolah dan menyajikan data Potensi Desa (Podes) 2008 dan 2018, sebelum mengolah data maka perlu mencermati kode/nama variabel-variabel yang digunakan pada data kuesioner Podes 2008 dan 2018. Dalam penggunaan data Podes dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan desa berbasis data potensi desa. Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan indeks komposit tertimbang dari 42 indikator yang menggambarkan tingkat pembangunan di desa. 42 indikator tersebut tergabung dalam 12 variabel dan lima dimensi. Dimensi tersebut adalah: (1) pelayanan dasar, (2) kondisi infrastruktur, (3) aksesibilitas/transportasi, (4) pelayanan umum, dan (5) penyelenggaraan pemerintahan. Setiap indikator memiliki kontribusi terhadap IPD. Besarnya kontribusi setiap indikator menggambarkan besarnya pengaruh indikator tersebut terhadap dimensi dan IPD. Besarnya kontribusi setiap indikator dihitung menggunakan metode Analisis Komponen Utama (*Principal Component Analysis*).

Sebagai contoh untuk menghitung nilai IPD masing-masing desa contoh Patanas di semua agroekosistem, yaitu dengan menyusun matriks 42 (indikator) x 45 (jumlah desa Patanas). Selanjutnya dari nilai IPD masing-masing desa tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kemajuan pembangunan suatu desa. Nilai indeks mempunyai rentang 0 s/d 100. Pengelompokkan desa menjadi tiga kategori yaitu: (1) Desa mandiri, jika nilai IPD > 75, yaitu desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik; (2) Desa berkembang, jika nilai IPD lebih dari 50, namun kurang atau sama dengan 75, yaitu desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup memadai; (3) Desa tertinggal, jika nilai IPD kurang atau sama dengan 50, yaitu desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim (BPS 2019). Analisis perkembangan desa menurut agroekosistem dikelompokkan ke dalam Pulau Jawa

dan Luar Jawa, dengan pertimbangan selama ini terjadi disparitas pembangunan wilayah dan desa di Jawa dan Luar Jawa. Tampak bahwa desa-desa contoh di Jawa didominasi dengan tingkat “berkembang”, hanya satu desa dengan kategori tertinggal yaitu Desa Cimahi, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut yaitu desa yang merupakan agroekosistem lahan kering berbasis tanaman hortikultura (cabai merah). Sementara itu terdapat satu desa mandiri yaitu Desa Rejosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, di desa tersebut terdapat satu sekolah menengah, juga terdapat pasar desa yang cukup maju.

Untuk mendukung bahasan dari penelitian Patanas, Tim Database juga mengolah dan menyajikan data hasil Sensus Pertanian 2013 yang dirinci menurut variabel karakteristik, jumlah petani menurut jenis lahan yang dikuasai, jumlah petani yang menanam Pajale, luas tanam, dan total luas penguasaan lahan. Sebenarnya data tersebut sebagian sudah diolah pada kegiatan tahun sebelumnya (2019), sehingga pada tahun 2020 merupakan pengembangan olah data yang lebih luas, tidak hanya yang menanam pajale, tetapi juga rumah tangga tani yang menanam komoditas lain (hortikultura, tanaman perkebunan) sesuai basis komoditas yang digunakan pengategorian pada penelitian Patanas 2020/2012.

Selain cakupan data sekunder, sejak tahun 2012 kegiatan database PSEKP mulai dilakukan inisiasi untuk menyusun data primer yang berasal dari hasil survei lapang kegiatan penelitian di lingkup PSEKP, di antaranya adalah kegiatan penelitian Panel Petani Nasional (Patanas) dan kegiatan lainnya. Namun karena kondisi pandemi Covid-2019, beberapa penelitian terkendala sehingga yang menggunakan data primer tidak banyak, dan sebagian besar mengolah dari data sekunder. Sehubungan dengan itu kegiatan penyusunan data primer ini dilanjutkan walaupun relatif terbatas, dengan demikian Tim Database lebih banyak mengolah data sekunder sesuai kebutuhan tim masing-masing (di luar kegiatan utama Tim Database).

7.3.3. Pelayanan Perpustakaan

Keberadaan unit perpustakaan sangat penting dan vital dalam menunjang kegiatan penelitian, khususnya dalam bidang sosial ekonomi pertanian. Evaluasi pelayanan perpustakaan penting dilakukan dan indikator yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi, yaitu: (1) stok buku/bahan pengetahuan, (2) penyajian dan pelayanan, (3) tingkat pemanfaatan menurut pengguna, (4) tingkat pemanfaatan menurut bahan, dan (5) masalah yang dihadapi.

PSEKP memiliki satu unit perpustakaan dengan koleksi buku dan majalah ilmiah yang cukup lengkap, baik yang berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Koleksi buku di unit perpustakaan diuraikan pada Tabel 29. Selain itu, perpustakaan PSEKP juga mempunyai sejumlah koleksi prosiding, laporan-laporan statistik dan laporan hasil penelitian, khususnya yang berkaitan dengan penelitian sosial ekonomi pertanian. Untuk melengkapi kebutuhan informasi terkini yang

dibutuhkan oleh para peneliti, maka perpustakaan ini juga berlangganan koran Kompas, Republika, Bisnis Indonesia, Sinar Tani serta majalah Trubus. Unit perpustakaan ini dikelola oleh lima orang pustakawan. Jumlah koleksi buku dan majalah akan terus berkembang seiring dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial ekonomi pertanian.

Pengguna layanan unit Perpustakaan diperuntukan bagi semua kalangan, sedangkan untuk layanan peminjaman buku hanya dikhususkan untuk pegawai lingkup PSEKP saja. Pelayanan kepada pengguna perpustakaan tersebut diberikan dengan dua cara, yaitu *open access* untuk peneliti PSEKP dan *closed access* untuk pengguna di luar PSEKP. Pada tahun 2020, jumlah pemustaka yang langsung datang ke Perpustakaan PSEKP sebanyak 45 orang, sedangkan yang melakukan layanan permintaan data melalui e-mail sebanyak 29 orang.

Judul buku/pustaka yang dipinjam sedikit mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya pelayanan secara *online* terhadap para peneliti PSEKP. Untuk membantu mempermudah pengguna dalam menelusuri pustaka yang dimiliki, perpustakaan PSEKP telah dilengkapi dengan empat buah unit komputer yang digunakan untuk melayani konsumen dalam mendukung kecepatan pencarian pustaka. Selain itu komputer tersebut juga digunakan untuk menyimpan data-data pustaka yang tersedia. Kenyamanan pengunjung perpustakaan semakin bertambah dengan dilengkapinya ruangan baca dengan sistem pendingin udara.

7.3.4. Evaluasi Pelayanan Publikasi

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan publikasi, indikator yang digunakan dalam evaluasi ini adalah: (1) perencanaan, yang terdiri dari rencana penerbitan, rencana distribusi, dan jadwal, (2) distribusi, yang terdiri dari lingkup PSEKP, Badan Litbang Pertanian, Perguruan Tinggi, dan lainnya. Indikator perencanaan dan pelaksanaan yang dimaksud dalam konteks ini ditekankan pada penerbitan dan distribusi dari masing-masing penerbitan yang dilakukan PSEKP.

Salah satu tugas PSEKP adalah mengomunikasikan hasil-hasil penelitian sosial ekonomi pertanian yang dalam pelaksanaannya dapat berupa publikasi. Beberapa publikasi yang diterbitkan oleh PSEKP adalah: (1) Jurnal Agro Ekonomi (JAE), (2) Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE), (3) Analisis Kebijakan Pertanian (AKP), (4) Prosiding hasil seminar, (5) Buku tematik, (6) Laporan tahunan, (7) *Newsletters*, dan (8) Laporan hasil penelitian.

Berbagai macam media publikasi tersebut disediakan oleh PSEKP dan digunakan sebagai wadah untuk menampung kebutuhan peneliti dalam mempublikasikan tulisan atau makalahnya. Jurnal Agro Ekonomi merupakan media ilmiah penyebaran hasil-hasil penelitian sosial ekonomi pertanian untuk menunjang pengembangan dan penelitian di Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi memuat hasil-hasil penelitian sosial ekonomi pertanian dengan misi meningkatkan

kecakapan, pengetahuan dan profesionalisme para ahli sosial ekonomi pertanian dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan pertanian, pangan, sumber daya, dan pembangunan ekonomi. Dalam JAE, kekuatan metodologi penelitian sangat diperhatikan, jurnal ini diterbitkan dua kali setahun. Forum Penelitian Agro Ekonomi adalah media ilmiah komunikasi hasil penelitian yang berisi *review* hasil penelitian sosial ekonomi pertanian di Indonesia, memuat “*critical review*” hasil-hasil penelitian para peneliti PSEKP dan lembaga lainnya. Jurnal FAE juga menampung naskah-naskah yang berupa gagasan atau konsepsi orisinal dalam bidang sosial ekonomi pertanian, diterbitkan dua kali setahun. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian adalah media ilmiah yang membahas isu aktual kebijakan pertanian yang memuat artikel analisis kebijakan pertanian dalam bentuk gagasan, dialog, dan polemik, diterbitkan dua kali dalam setahun.

Adanya berbagai media penerbitan ilmiah di PSEKP, maka peneliti PSEKP dapat menyalurkan ide, pemikiran, dan kajian ilmiah yang berkaitan dengan sosial ekonomi pertanian dengan baik. Bagi peneliti yang kreatif akan semakin mudah dalam meningkatkan jenjang fungsional penelitiannya. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa ketersediaan media yang cukup banyak tersebut sangat membantu peneliti dalam meningkatkan dan memelihara jabatan fungsional penelitiannya. Salah satu yang mungkin perlu mendapat perhatian manajemen adalah ketepatan waktu penerbitan yang masih belum seluruhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Website dan Internet

Sebagai unit kerja yang khusus menangani kegiatan penelitian sosial ekonomi pertanian di Kementerian Pertanian, PSEKP telah lama membina hubungan kerja sama dengan lembaga penelitian baik di dalam negeri maupun luar negeri. Seringkali institusi dalam dan luar negeri membutuhkan data dan informasi hasil penelitian PSEKP. Sebagai institusi publik, maka sudah selayaknya jika PSEKP memiliki sarana untuk dapat menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna.

Untuk lebih memberikan pelayanan yang optimal dan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan melalui diskusi dengan publik, pelayanan publikasi PSEKP juga telah membangun situs atau website sendiri dengan alamat: <http://www.pse.litbang.pertanian.go.id>. Website ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat maupun *stakeholders* yang membutuhkan data dan informasi mengenai kegiatan PSEKP dan layanan perpustakaan selama 24 jam penuh. Situs atau website tersebut juga menjadi sarana komunikasi hubungan kerja antara PSEKP dengan institusi lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk lebih memberikan kenyamanan dan kecepatan pengguna dalam mengakses situs PSEKP tersebut, saat ini sedang dibuat tampilan baru.

Juga telah dibangun perpustakaan digital, namun hanya dapat diakses dalam lingkungan kantor PSEKP melalui jaringan internet dengan alamat <http://digilib.litbang.pertanian.go.id/~psekp/>. Selain itu, juga sedang disusun program informasi opini yang dirancang untuk memberikan pandangan atau tanggapan terhadap masalah pembangunan pertanian terkini. Berita dan kegiatan PSEKP maupun Kementan juga dapat disebarluaskan melalui media sosial yang dikelola PSEKP yaitu facebook, twitter, instagram, dan youtube.

Selain website, PSEKP juga telah membangun jaringan internet di setiap ruangan peneliti dan pejabat struktural. Layanan informasi tersebut dilakukan dengan pemasangan instalasi *Local Area Network* (LAN). Instalasi ini memiliki 2 unit switch yang masing-masing memiliki 24 port sehingga maksimal CPU yang dapat dijadikan jaringan adalah 48 unit terminal yang tersebar di seluruh gedung, mulai dari Gedung A di depan dan Gedung B di belakang. Pembangunan jaringan internet ini dimaksudkan agar para peneliti dan pejabat struktural dapat mengakses perkembangan informasi secara cepat dan murah. Selain itu, adanya jaringan internet ini akan mempermudah peneliti dalam mengakses data dari berbagai institusi di seluruh dunia. Dengan demikian diharapkan kegiatan penelitian sosial ekonomi pertanian dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

7.3.5. Sarana Penelitian

Indikator yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelayanan sarana penelitian adalah: (1) rencana pengadaan, yang terdiri dari jadwal, jenis, dan jumlah; dan (2) realisasi pengadaan, yang terdiri dari jadwal, jenis, dan jumlah. Kedua indikator tersebut juga akan dilihat jika terdapat permasalahan yang dijumpai oleh pelayanan penelitian dan cara pemecahan masalah.

Sarana penelitian yang dimaksud dalam konteks ini adalah sarana alat tulis kantor (ATK) terdiri dari tonner, tinta printer, kertas, flash disk, dan lainnya. Setiap tim dapat mengajukan kebutuhan ATK-nya sesuai kebutuhan untuk penelitian baik menjelang survei maupun saat kegiatan di kantor. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan penelitian, peneliti telah dilengkapi fasilitas komputer dan jaringan internet yang tersedia di setiap ruangan peneliti. Untuk kelancaran komunikasi internal kantor disediakan pula telepon penghubung antarruangan sehingga memudahkan komunikasi antar-pegawai, baik di dalam kantor maupun menerima telpon dari luar kantor. Bahkan untuk kenyamanan kerja, maka di setiap ruangan peneliti telah dilengkapi dengan fasilitas *air condition* (AC). Ruang rapat yang lengkap dengan fasilitas yang memadai sudah tersedia.

Lampiran I. Pengadaan bahan pustaka TA 2020

No.	Uraian	Banyaknya
1	Statistik Indonesia Tahun 2019	2 eks
2	Hasil Survei Pertanian, Antar Sensus (SUTAS) 2018	1 eks
3	Statistik Infrastruktur Indonesia 2019	1 eks
4	Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal	1 eks
5	Daya Saing dan Rantai Nilai Inklusif Industri Peternakan	1 eks
6	Indikator Ekonomi, Bulan April s/d September 2019	6 eks
7	Laporan Perekonomian Indonesia 2019	1 eks
8	Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019	1 eks
9	Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019	1 eks
10	Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2019	1 eks
11	Keadaan Pekerja Agustus 2019	1 eks
12	Pengeluaran Konsumsi Penduduk Indonesia, Susenas 2019 Buku 1, 2, dan 3	3 eks
13	PDRB menurut Kabupaten Kota 2014-2018	1 eks
14	Tinjauan Regional PDRB Kabupaten Kota 2018 (Buku 1,2, 3, 4, dan 5)	5 eks
15	Statistik Pendapatan Nasional 2018	1 eks
16	Analisa Mobilitas Tenaga Kerja 2018	1 eks
17	Perhitungan dan Analisa Kemiskinan Makro Indonesia 2019	1 eks
18	Indeks Pembangunan Manusia 2018	1 eks
19	Indikator Ekonomi Oktober 2019	1 eks
20	Buletin Impor September & Oktober 2019	2 eks
21	Buletin Ekspor 2018 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September, dan Oktober)	8 eks
22	Buletin Impor 2018 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli, Agustus, September, dan Oktober)	11 eks
23	The American Economic Review, Vol.109 No.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, 2019	10 eks
24	Economic Development and Cultural Change Volume 67 Number 1, 2, 3, dan 4, 2019	4 eks
25	The American Economic Review, Vol.110 No.1 2020	1 eks
26	Statistik Indonesia 2020	2 eks
27	PDRB menurut Lapangan Usaha 2015–2019	1 eks
28	Indikator Ekonomi November–Desember 2019	2 eks
29	Indikator Ekonomi Januari–Februari 2020	2 eks
30	Aplikasi Ekonometrika dengan E-Views, Stata dan R	2 eks
31	Pengembangan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	1 eks

Lampiran I. Pengadaan bahan pustaka TA 2020 (lanjutan)

No.	Uraian	Banyaknya
32	Perekonomian Indonesia	1 eks
33	Perubahan Model Kepemimpinan Ideal	1 eks
34	Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan	1 eks
35	Revolusi Industri 4.0 Siap Menghadapi dan Menyambut Tantangan Revolusi Industri 4.0	1 eks
36	Dinamika Penerapan Supply Chain Management	1 eks
37	Gambut dan Pengetahuan Ekologi Tradisional, Kebijakan, Degradasi dan Restorasi	1 eks
38	Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Edisi ketiga)	1 eks
39	Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views	1 eks
40	Fundamen Konsep Pembangunan Inklusif Berdaya Saing	1 eks
41	Indikator Ekonomi Maret - Juni 2020	4 eks
42	Buletin Import Januari-April 2019	4 eks
43	Buletin Expor November dan Desember 2019	2 eks
44	Nilai Tukar Petani 2019	1 eks
45	Statistik Nilai Tukar Petani 2016-2018	1 eks
46	Sampling Error Estimasi Hasil Survei Struktur Ongkos Tanaman Hortikultura (SUH) 2018	1 eks
47	Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia 2019	1 eks
48	8 Komoditas Strategis di Indonesia Tahun 2019	1 eks
49	Statistik Export Tahun 2019 (Buku 1 dan 2)	2 eks
50	Statistik Import Tahun 2019 (Buku 1, 2, dan 3)	3 eks
51	Keadaan Angkatan Kerja, Februari 2020	1 eks
52	Keadaan Pekerja, Februari 2020	1 eks
53	Diagram Timbang Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan (Hasil Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017)	1 eks
54	Diagram Timbang Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Hortikultura (Hasil Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017)	1 eks
55	Bulletin Export 2019, Januari, Februari, Maret, Mei, Juli, dan Agustus 2019	6 eks
56	Buku Indonesia dan COVID-19	1 eks
57	Stategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal	1 eks
58	Media dan Gender (sebuah pengantar)	1 eks
59	Gender dan Pembangunan	1 eks
60	Analisis Gender dan Transformasi Sosial	1 eks

Kawasan Inovasi Pertanian Cimanggu
Jl. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111, Telp. (0251) 8333964, Faks. (0251) 8314496
E-mail : psekp_litbang@gmail.com, psekp@pertanian.go.id, Website: <http://pse.litbang.pertanian.go.id>

